



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



LAPORAN KINERJA BKKPN KUPANG TAHUN 2025



2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TIM PENYUSUNAN

Pengarah

Imam Fauzi (Kepala BKKPN Kupang)

Ketua/Manajer Tim

Muhammad Ramli Firman (Kepala Subbagian Umum)

Anggota

Riyan Afif Al Ihsan (APJK Ahli Pertama)

Kontributor:

Tim Tata Kelola Kinerja
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2025. Laporan Kinerja disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BKKPN Kupang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis BKKPN Kupang selama Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) selaku Unit Kerja atasan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini, dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Kupang, 9 Februari 2026


Imam Fauzi
Kepala BKKPN Kupang



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025. Pada pelaporan Kinerja Tahun 2025 data capaian dan target kinerja BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder https://bit.ly/SAKIP_DJPK. Capaian kinerja organisasi BKKPN Kupang Tahun 2025 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) adalah **107,20 (Baik)**.

Seluruh Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada Tahun 2025 berhasil **tercapai** dengan detail rincian capaian pada tabel berikut:

Tabel 1 Detail Target dan Capaian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025

Indikator Kinerja		Tahun 2025		
No	Uraian	Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05	89,12	104,79
IKU 2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2	11	120
IKU 3	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai)	90	97,52	108,35
IKU 4	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1	1	100
IKM 5	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%)	70	91,85	120
IKM 6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	89	92,63	104,08
IKM 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5	100	120
IKM 8	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4	4	100
IKM 9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	80	87,36	109,20
IKM 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95	98,40	103,58
IKM 11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100	100	100
IKM 12	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85	89,52	105,32
IKM 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	70	80,50	115
IKM 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (%)	76	100	120
IKM 15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai)	91	100	109,89
IKU 16	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	2	2	100

Berdasarkan data dari aplikasi OM-SPAN, Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar Rp59.385.564.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project*-LAUTRA, namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.899.860.000,- sehingga pagu anggaran optimal yang dapat



digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp50.485.704.000. **Realisasi anggaran** total pada tahun 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebesar **Rp49.078.257.396**, sehingga persentase realisasi anggaran adalah 82,64% berdasarkan pagu anggaran total atau **97,21%** berdasarkan pagu efektif.

Selain itu, BKKPN Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (**PNBP**) BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.000.000, dengan realisasi pendapatan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.853.984.901,-** atau tercapai **220,23%** dari target.

Pada tahun 2025 BKKPN Kupang telah memperoleh total 15 penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dilakukan, seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Daftar Penghargaan BKKPN Kupang di Tahun 2025

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan BKKPN Kupang di Tahun 2025 terdapat tantangan yang menjadi perhatian yaitu:



1. Masih terdapat 1 kawasan konservasi yang belum berstatus berkelanjutan pada penilaian EVIKA 2025
2. Target predikat WBBM belum tercapai di tahun 2025
3. Pengelolaan kearsipan masih belum optimal karena kekurangan SDM Kearsipan

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara secara berkala
2. Melakukan monitoring pembangunan zona integritas secara bulanan dan melaksanakan manajemen resiko kegiatan secara berkala.
3. Mengusulkan penyediaan SDM Kearsipan, mengusulkan sertifikasi SDM kearsipan dan melakukan penyusutan arsip kantor.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUNAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis 2025-2029.....	10
2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	19
3.1.1 IKU 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang	19
3.2 Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang....	33
3.2.1 IKU 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	33
3.3 Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	40
3.3.1 IKU 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang	40
3.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	47
3.4.1 IKU 4. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.....	47



3.5 Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	53
3.5.1 IKU 5. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang	53
3.5.2 IKU 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang	63
3.5.3 IKU 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang	71
3.5.4 IKU 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang	76
3.5.5 IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang	80
3.5.6 IKU 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang.....	86
3.5.7 IKU 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang	91
3.5.8 IKU 12. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang	96
3.5.9 IKU 13. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang	103
3.5.10 IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	109
3.5.11 IKU 15. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang..	114
3.6 Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	119
3.6.1 IKU 16. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.....	119
3.7 Akuntabilitas Keuangan	126
3.8 Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan	129
BAB IV PENUTUP	131
4.1 Kesimpulan	131
4.2 Rekomendasi.....	133
4.3 Tindaklanjutan.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Detail Target dan Capaian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025	iv
Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025	15
Tabel 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025	18
Tabel 4 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	20
Tabel 5 Capaian Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025	21
Tabel 6 Hasil Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025.....	21
Tabel 7 Perbandingan Nilai EVIKA Masing-masing Kawasan Konservasi di tahun 2024 dan 2025.....	23
Tabel 8 Perbandingan Capaian Nilai EVIKA Nasional Tahun 2025.....	23
Tabel 9 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.....	26
Tabel 10 Data Keterlibatan Gender Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Nilai EVIKA BKKPN Kupang 2025.....	27
Tabel 11 Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025	34
Tabel 12 Perbandingan Capaian Kemitraan Nasional Tahun 2025	36
Tabel 13 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2025	37
Tabel 14 Capaian Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang Tahun 2025.....	40
Tabel 15 Data Penerbitan Izin dan Perolehan PNPB di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025.....	41
Tabel 16 Perbandingan Capaian Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2025	43
Tabel 17 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang.....	45
Tabel 18 Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025	48
Tabel 19 Perbandingan Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil Nasional Tahun 2025.....	50
Tabel 20 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	51
Tabel 21 Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP	54
Tabel 22 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025 ..	54
Tabel 23 Rincian Hasil Penilaian PM SAKIP BKKPN Kupang Tahun 2025..	55
Tabel 24 Perbandingan Aspek Penilaian PM SAKIP tahun 2024 dan 2025 ..	55
Tabel 25 Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Nasional Tahun 2025	56

Tabel 26 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.....	59
Tabel 27 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Bobot Nilai.....	63
Tabel 28 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025.....	64
Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA BKKPN Kupang Tahun 2025	64
Tabel 30 Perbandingan Nilai IKPA BKKPN Kupang Tahun 2024 dan 2025	65
Tabel 31 Perbandingan Capaian Nilai IKPA Nasional Tahun 2025	66
Tabel 32 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang	69
Tabel 33 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025	72
Tabel 34 Perbandingan Nilai NKPA BKKPN Kupang Tahun 2024 dan 2025	73
Tabel 35 Perbandingan Capaian Nilai NKPA Nasional Tahun 2025	74
Tabel 36 Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025.....	76
Tabel 37 Perbandingan Capaian Laporan SPIP Nasional Tahun 2025.....	78
Tabel 38 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Laporan SPIP pada lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025	79
Tabel 39 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025.....	80
Tabel 40 Perbandingan Capaian Nilai IP ASN BKKPN Kupang Tahun 2024 dan 2025.....	82
Tabel 41 Perbandingan Capaian IP ASN Nasional Tahun 2025	83
Tabel 42 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang tahun 2025	84
Tabel 43 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025	86
Tabel 44 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Nasional Tahun 2025	89
Tabel 45 Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang	91
Tabel 46 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Nasional Tahun 2025	92
Tabel 47 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BKKPN Kupang tahun 2025.....	93
Tabel 48 Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang Tahun 2025.....	96
Tabel 49 Detail Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang 2025.....	97



Tabel 50 Perbandingan Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Nasional Tahun 2025	99
Tabel 51 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang tahun 2025.....	100
Tabel 52 Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang.....	105
Tabel 53 Perbandingan Capaian Nilai Kearsipan Tahun 2024 dan 2025..	106
Tabel 54 Perbandingan Capaian Nilai Kearsipan Nasional Tahun 2025 ...	106
Tabel 55 Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025.....	109
Tabel 56 Perbandingan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Nasional Tahun 2025.....	111
Tabel 57 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Nasional Tahun 2025	112
Tabel 58 Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang Tahun 2025.....	115
Tabel 59 Perbandingan Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nasional Tahun 2025	116
Tabel 60 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BKKPN Kupang	117
Tabel 61 Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025	120
Tabel 62 Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional Tahun 2025.....	122
Tabel 63 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut pada lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025.....	123
Tabel 64 Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2025.....	126
Tabel 65 Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Tahun 2025	128
Tabel 66 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Daftar Penghargaan BKKPN Kupang di Tahun 2025	v
Gambar 2 Wilayah Kerja BKKPN Kupang	5
Gambar 3 Struktur Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2025	6
Gambar 4 Mekanisme Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025	7
Gambar 5 Profil Data Pegawai BKKPN Kupang Tahun 2025	8
Gambar 6 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	10
Gambar 7 Visi dan Misi Presiden	11
Gambar 8 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat	12
Gambar 9 Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2025	17
Gambar 10 Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi	20
Gambar 11 (Kiri) Inovasi Sila Dalipatik di Kawasan Konservasi Laut Banda dan (Kanan) Inovasi Taman Karang Piracora di Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	25
Gambar 12 Survei Kondisi Habitat dan Ekosistem Kawasan Konservasi ...	28
Gambar 13 Survei Biota Laut Dilindungi Kawasan Konservasi	29
Gambar 14 Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi	29
Gambar 15 Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi	30
Gambar 16 Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi	30
Gambar 17 Sosialisasi Pemangku Kepentingan di Kawasan Konservasi ...	31
Gambar 18 Bimtek dan Sertifikasi Selam Pengelola Kawasan Konservasi ..	31
Gambar 19 Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi	31
Gambar 20 Respon Cepat Penanganan Ancaman Sumberdaya Kawasan Konservasi	32
Gambar 21 Penguatan Masyarakat Di Kawasan Konservasi	32
Gambar 22 Perbandingan Capaian Kemitraan Tahun 2024 dan 2025	35
Gambar 24 Inisiasi Kemitraan Konservasi	38
Gambar 25 Finalisasi Kemitraan Konservasi	38
Gambar 26 Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Konservasi	38
Gambar 27 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Konservasi	39
Gambar 28 Data Permohonan Izin Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi 2025	42
Gambar 29 Inovasi Gerai Pelayanan Sini Situ	44
Gambar 30 Halaman Dashboard Aplikasi SEAPARK	45
Gambar 31 Pembukaan Gerai Pelayanan Sini Situ di Rote Ndao	46
Gambar 32 Identifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	52
Gambar 33 Dashboard Inovasi MonSTERA	57
Gambar 34 Inovasi Taman Karang Piracora	58
Gambar 35 Verifikasi Pelaporan Online	60
Gambar 36 Penyusunan Laporan Kinerja	60
Gambar 37 Finalisasi Dokumen Perencanaan	61
Gambar 38 Reviu Laporan Kinerja	61

Gambar 39 Dialog Kinerja Tahun 2025	61
Gambar 40 Evaluasi SAKIP Lingkup DJPK Tahun 2025	61
Gambar 41 Pleno SAKIP Lingkup DJPK Tahun 2025	62
Gambar 42 Monitoring pelaksanaan program kegiatan berkala	62
Gambar 43 Tampilan Nilai IKPA BKKPN Kupang Tahun 2025 di Aplikasi OM-SPan	65
Gambar 44 Penerapan Inovasi Plakat	68
Gambar 45 Kegiatan Monitoring Rutin Bulanan Pelaksanaan Anggaran ...	70
Gambar 46 Detail Rincian Capaian Kinerja Nilai NKPA BKKPN Kupang Tahun 2025.....	72
Gambar 47 Tampilan Nilai IP ASN BKKPN Kupang pada Aplikasi IP ASN SDMAO KKP	81
Gambar 48 electronic millennial learning KKP	84
Gambar 49 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pegawai BKKPN Kupang 2025	85
Gambar 50 Detail pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 pada aplikasi SIDAK KKP	87
Gambar 51 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang pada Tahun 2024 dan 2025	88
Gambar 52 Penyampaian Tindak Lanjut melalui SIDAK	90
Gambar 53 Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2024	94
Gambar 54 Penyusunan dan Penelaahan RKBMN 2027	94
Gambar 55 Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester 1 Tahun 2025	95
Gambar 56 Perbandingan Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 dan 2025	98
Gambar 57 Sharing Session PZI Poltek KP Kupang	101
Gambar 58 Pemantauan Pembangunan ZI Oleh Tim Penilai Internal KKP	101
Gambar 59 Internalisasi Pembangunan ZI bersama Kejati NTT	101
Gambar 60 Pemantauan Tindak Lanjut Pembangunan ZI	101
Gambar 61 Monitoring berkala pemenuhan dokumen pembangunan ZI menuju WBBM setiap bulan	102
Gambar 62 Hasil Nilai Audit Kearsipan Internal BKKPN Kupang 2025....	105
Gambar 63 Internalisasi Instrumen dan Identifikasi Bukti Dukung pada Pengawasan Internal Kearsipan.....	108
Gambar 64 Kegiatan Audit Kearsipan Internal Lingkup KKP Tahun 2025	108
Gambar 65 Tampilan Persentase Rencana Umum Pengadaan BKKPN Kupang tahun 2025 di aplikasi SIRUP.....	110
Gambar 66 Pengumuman Rencana Umum PBJ pada SIRUP	113
Gambar 67 Tampilan Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang tahun 2025 pada aplikasi Pelikan	115
Gambar 68 Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2025	118



Gambar 69 Pengisian Kuesioner & Unggah Data Dukung (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang tahun 2025 pada Aplikasi PELIKAN telah 100%	118
Gambar 70 Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Bagi Pembudidaya Rumput Laut Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu	124
Gambar 71 Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	125
Gambar 72 Realisasi Belanja BKKPN Kupang Tahun 2025.....	127
Gambar 73 Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Tahun 2025	128
Gambar 74 Penghargaan BKKPN Kupang hingga Tahun 2025	130



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Perjanjian Kinerja
LAMPIRAN 2	Data Dukung Capaian Nilai EVIKA
LAMPIRAN 3	Data Dukung Capaian Kemitraan Konservasi
LAMPIRAN 4	Data Dukung Capaian Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
LAMPIRAN 5	Data Dukung Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil
LAMPIRAN 6	Data Dukung Capaian Nilai PM SAKIP
LAMPIRAN 7	Data Dukung Capaian Nilai IKPA
LAMPIRAN 8	Data Dukung Capaian Nilai NKPA
LAMPIRAN 9	Data Dukung Capaian Laporan SPIP
LAMPIRAN 10	Data Dukung Capaian Indeks Profesionalitas ASN
LAMPIRAN 11	Data Dukung Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
LAMPIRAN 12	Data Dukung Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK
LAMPIRAN 13	Data Dukung Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM
LAMPIRAN 14	Data Dukung Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
LAMPIRAN 15	Data Dukung Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP
LAMPIRAN 16	Data Dukung Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik
LAMPIRAN 17	Data Dukung Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; serta (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang juga menerapkan SAKIP, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang selama Tahun 2025.

1.3 Isu Strategis

Pada saat ini BKKPN Kupang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatan. Tantangan tersebut diantaranya:

1. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum seluruhnya dikelola secara berkelanjutan;



2. Peran aktif masyarakat di kawasan konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum optimal dalam mendukung pengelolaan;
3. Implementasi Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Pelayanan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi belum optimal;
4. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Kawasan Konservasi Belum Terkelola Secara Optimal;
5. Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi Wilayah kerja BKKPN Kupang belum terkelola dan terdata dengan baik; dan
6. Penguatan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Perolehan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BKKPN Kupang menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan; (2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumberdaya ikan, dan/atau situs budaya tradisional; (3) Pelaksanaan jejaring dan kemitraan dibidang konservasi sumber daya ikan; (4) Pengelolaan sistem, data, dan informasi; serta. (5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dengan tugas pokok dan fungsi BKKPN tersebut, maka diharapkan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dapat dilaksanakan dengan terencana serta melibatkan semua

stakeholder, sehingga terwujud pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang Mengelola 8 Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sebagaimana berikut:

1. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu



TNP Laut Sawu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu memiliki luas 3.355.352,82 Ha yang terdiri dari wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas 557.837,40 Ha dan wilayah perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.512,42 Ha;

2. Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan memiliki luas 2.268,59 Ha;

3. Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan



Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi

Sulawesi Selatan. Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya memiliki luas 49.923,55 Ha

4. Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku



Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku. Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya memiliki luas 2.371,85 Ha;

5. Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua



Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua. Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya memiliki luas 177.411,35 Ha;

6. Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya memiliki luas 325.084,92 Ha yang terdiri dari :

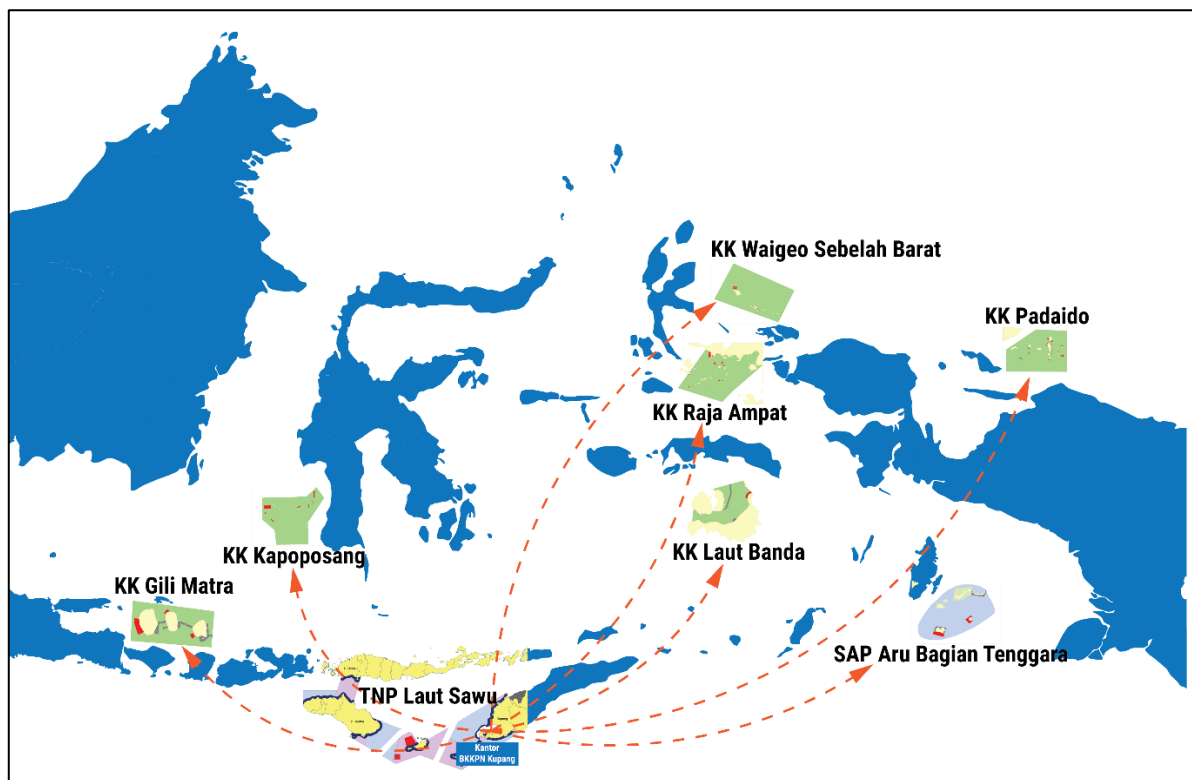
- Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya seluas 267.209,16 Ha; dan
- Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya seluas 57.875,75 Ha;

7. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara



SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara memiliki luas 114.000 Ha.

Kawasan konservasi perairan nasional yang merupakan wilayah kerja BKKPN Kupang sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat pada gambar berikut:

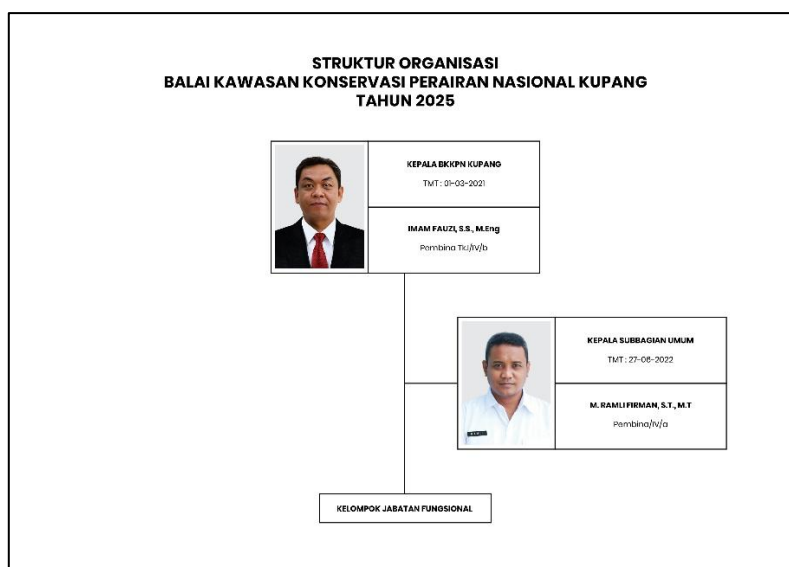


Gambar 2 Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, struktur organisasi BKKPN Kupang dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKKPN Kupang telah melaksanakan pola kerja dan mekanisme kerja yang lincah, kolaboratif dan dinamis dalam upaya peningkatan kinerja, mekanisme kerja BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:

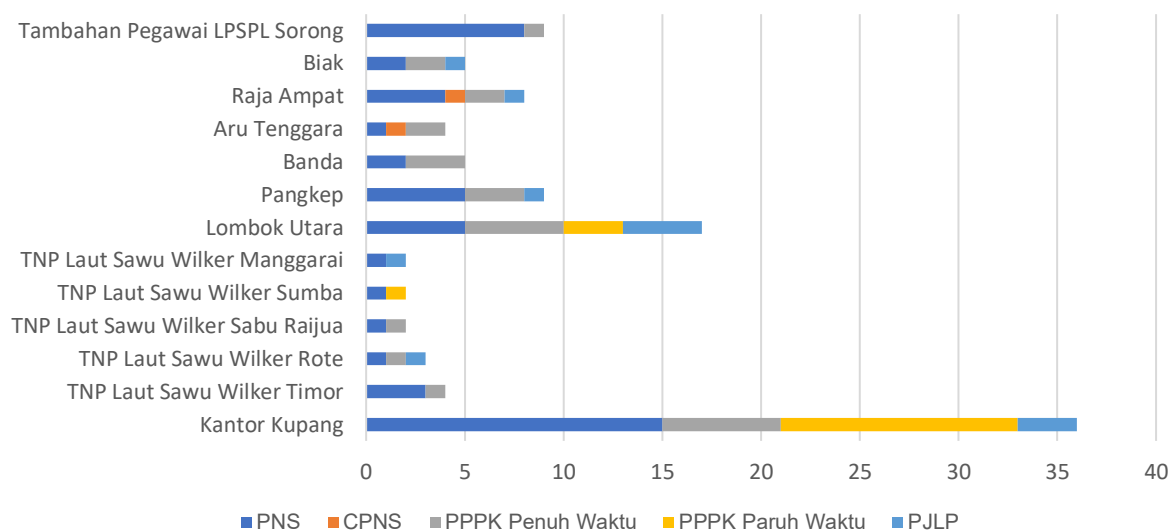


Gambar 4 Mekanisme Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

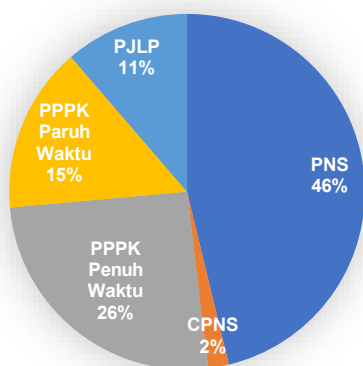
Hingga akhir Tahun 2025, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang memiliki 105 orang pegawai, dimana Jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja BKKPN Kupang (TNP Laut Sawu, Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang, Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Taman di Perairan Laut Banda, Taman di Perairan Kepulauan Padaido, Taman di Perairan Waigeo Sebelah Barat dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat, SAP Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Kantor di Kupang serta tambahan pegawai di Sorong). Total PNS sebanyak 49 orang, CPNS sebanyak 2 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu sebanyak 27 orang, PPPK Paruh Waktu sebanyak 16 orang dan PJLP sebanyak 28 orang. Secara garis besar keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang dapat dilihat pada grafik berikut:



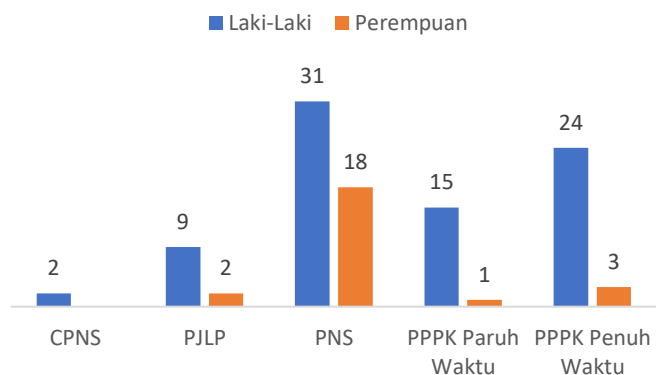
Sebaran Lokasi Penempatan Pegawai



Status Kepegawaian



Jenis Kelamin Pegawai



Gambar 5 Profil Data Pegawai BKKPN Kupang Tahun 2025



1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 BKKPN Kupang adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (strategic issue), tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan;

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis serta indikator dan target indikator kinerja BKKPN Kupang tahun 2025.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

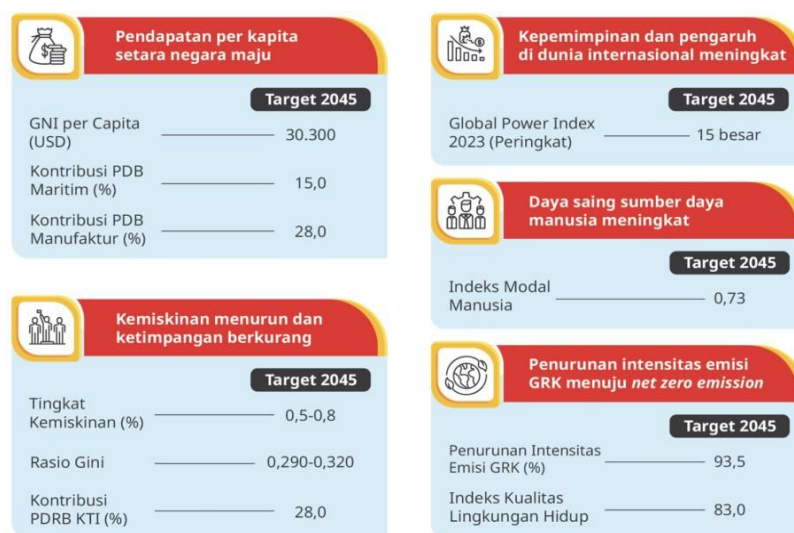
4. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 dengan 5 sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6 Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan dalam 8 misi yang dikenal dengan Delapan Asta Cita yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Gambar 7 Visi dan Misi Presiden

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup Pembangunan diberbagai sektor serta Langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Keseluruhan Upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air 2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara 3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi 4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Pemberantasan Kemiskinan 6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba 7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat 8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif 10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas 11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup 12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan 14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya 15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi 16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Gambar 8 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2025-2029, disusun Rencana Strategis KKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2024-2029.

Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan kelautan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian dan/atau penambahan terhadap Indikator Kinerja BKKPN Kupang, dimana terdapat penambahan indikator kinerja baru (4 indikator) dan penyesuaian indikator kinerja (2 indikator). Indikator baru yang merupakan penambahan indikator kinerja dan dipergunakan pada tahun 2025 adalah

1. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai).
2. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen).
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai).
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai).

Sedangkan indikator yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Nilai), sebelumnya adalah Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)
2. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai), sebelumnya adalah Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang (Nilai)

Perjanjian kinerja BKKPN Kupang selama tahun 2025 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Dasar perubahan antara lain :

1. Perubahan pertama pada tanggal 30 Juni 2025: disebabkan adanya (1) perubahan struktur organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atas implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mengingat tugas dan fungsi BKKPN Kupang yang harus tetap terlaksana, maka saat ini terdapat 2 perjanjian kinerja yaitu dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut. (2) penambahan Indikator Kinerja Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai).
2. Perubahan kedua pada tanggal 31 Desember 2025, disebabkan adanya (1) perubahan anggaran yaitu penambahan anggaran sebesar Rp5.047.100.000,- bersumber dari PNBPN dan pengurangan anggaran sebesar Rp 471.983.000,- (2) perubahan target indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang, dari target 80 berubah menjadi 70.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025 terdapat 6 sasaran kegiatan dan 16 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, perjanjian kinerja tahun 2025 BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai)	90
4.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	70
		6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	89
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5
		8.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	80
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		12.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85
		13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	70
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	76
		15.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang	91
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	16.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	2

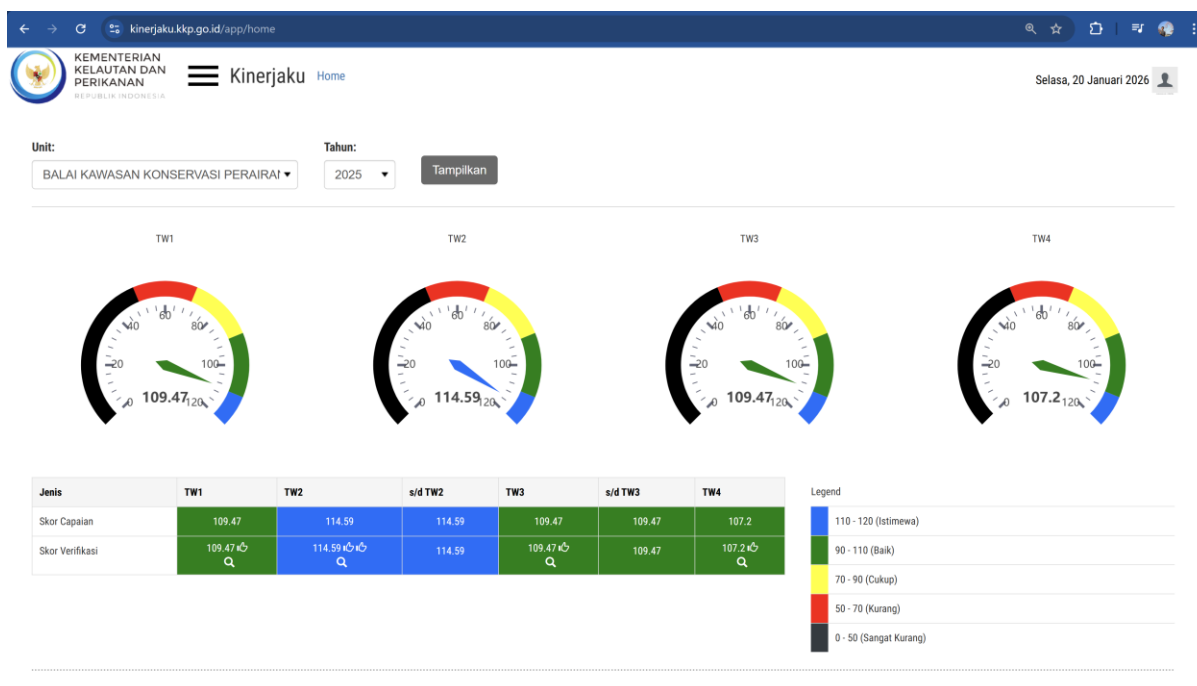


Dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja BKKPN Kupang tahun 2025, alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah sebesar Rp59.010.564.000,- dan dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp375.000.000,- sehingga total alokasi anggaran dari kedua perjanjian kinerja tersebut adalah sebesar 59.385.564.000,- yang termuat dalam 1 DIPA BKKPN Kupang tahun 2025, alokasi anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*. namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp8.899.860.000,- sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja adalah sebesar Rp50.485.704.000,-.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), dengan total 16 (enam belas) indikator kinerja. Pada Tahun 2025 ini, sesuai dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Kinerja Organisasi BKKPN Kupang adalah sebesar **107,2 (Baik)**. Capaian Kinerja Organisasi disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 9 Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Tahun 2025

Tabel 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Tahun 2025		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	Tahunan	85,05	85,05	89,12	104,79
IKU 2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Semester	2	2	11	120
IKU 3	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	90	90	97,52	108,35
IKU 4	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	1	1	1	100
IKM 5	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	70	70	91,85	120
IKM 6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Semester	89	89	92,63	104,08
IKM 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	71,5	71,5	100	120
IKM 8	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	Triwulan	4	4	4	100
IKM 9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	Semester	80	80	87,36	109,20
IKM 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	Triwulan	95	95	98,40	103,58
IKM 11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	100	100	100	100
IKM 12	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	85	85	89,52	105,32
IKM 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	70	70	80,50	115
IKM 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (%)	Triwulan	76	76	100	120
IKM 15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	91	91	100	109,89
IKU 16	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	2	2	2	100

3.1 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.1.1 IKU 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang

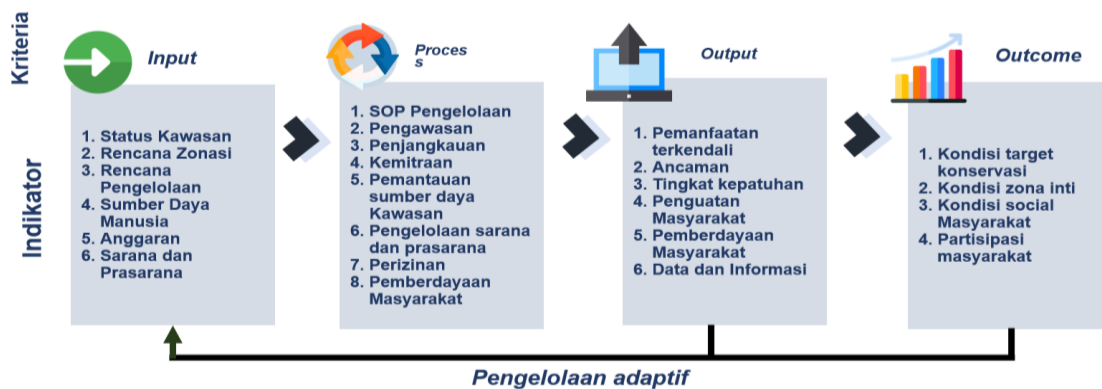
Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020.

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaannya seluas 4.026.543,20 Hektar yang terdiri dari 8 kawasan, yaitu:

1. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu seluas 3.355.352,82 Hektar;
2. Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang seluas 49.923,55 Hektar;
3. Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan seluas 2.268,59 Hektar;
4. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido seluas 177.411,35 Hektar;
5. Kawasan Konservasi Laut Banda Seluas 2.501,98 Hektar;
6. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat seluas 57.875,75 Hektar;
7. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat seluas 267.209,16 Hektar; dan
8. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara seluas 114.000 Hektar.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi,

sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 10 Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai evaluasi menunjukkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50 %	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
> 50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adatif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Cara menghitung indikator kinerja utama ini adalah dengan menghitung rata-rata hasil penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja BKKPN Kupang dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.

Target indikator kinerja utama Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 85,05%. Capaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Capaian Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
58.28	72.87	83.08	85.05	85.05	89.12	104.79	4.08	58	89,12	153,65

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar 89,12 atau 104,79% dari target sebesar 85,5, sebagaimana Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Evika Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2025 dan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian Nomor 18/BKKPN/OT.120/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Revisi Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2025.

Adapun hasil penilaian atas evaluasi efektivitas Kawasan konservasi di wilayah kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

Kawasan Konservasi	2025	Status
Kawasan Konservasi Laut Sawu	93.00	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Gili Matra	92.51	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	90.98	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Kep. Padaido	90.30	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat	89.06	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	88.51	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Laut Banda	87.60	Berkelanjutan
Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara	81.03	Optimum
Rata-Rata Nilai EVIKA	89.12	

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata nilai EVIKA tahun 2025 adalah sebesar 89.12. Nilai EVIKA tertinggi adalah Kawasan Konservasi Laut Sawu dengan nilai 93, sedangkan nilai EVIKA terendah adalah Kawasan Konservasi Kep.

Aru Bagian Tenggara. Terdapat 7 kawasan konservasi telah berstatus emas atau dikelola berkelanjutan yaitu Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, Kawasan Konservasi Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Kawasan Konservasi Laut Banda. Sedangkan 1 kawasan konservasi lainnya berstatus perak atau dikelola optimum yaitu Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, dan terdapat perbedaan formula perhitungan capaian kinerja dimana pada periode tahun sebelumnya yang dihitung adalah selisih peningkatan, sedangkan pada tahun ini yang dihitung adalah nilai peningkatannya, selanjutnya nama indikator kinerja pun telah mengalami penyesuaian yang semula adalah Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjadi Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

Nilai rata-rata EVIKA tahun 2024 adalah sebesar 85.05 sedangkan nilai rata-rata EVIKA tahun 2025 adalah sebesar 89.12, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian maka terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 4.08. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan nilai EVIKA yang signifikan pada Kawasan Konservasi Laut Banda dan Kawasan Konservasi Kepulauan Aru, masing-masing sebesar 8,56 dan 10,88. Detail nilai EVIKA masing-masing kawasan konservasi di tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perbandingan Nilai EVIKA Masing-masing Kawasan Konservasi di tahun 2024 dan 2025

Kawasan Konservasi	2024	2025	Peningkatan/ Penurunan
Kawasan Konservasi Laut Sawu	92.26	93.00	0.74
Kawasan Konservasi Gili Matra	89.75	92.51	2.76
Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang	89.27	90.98	1.71
Kawasan Konservasi Kep. Padaido	85.81	90.30	4.49
Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat	88.69	89.06	0.37
Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat	85.42	88.51	3.09
Kawasan Konservasi Laut Banda	79.04	87.60	8.56
Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara	70.15	81.03	10.88
Rata-Rata Nilai EVIKA	85.05	89.12	4.08

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil pada di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 58 pada tahun 2029, sedangkan capaian nilai EVIKA BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 89,12 atau tercapai 153,65% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator ini dengan target nasional, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8 Perbandingan Capaian Nilai EVIKA Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	85,05	86,23
Nilai EVIKA 2025	89,12	88,67
Persentase Capaian	104,79%	102,83%

Capaian Nilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 89,12 atau tercapai 104,79% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 88,67 atau tercapai 102,83% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian

kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari LKKPN Pekanbaru. Perbedaan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh dukungan pendanaan yang relatif lebih besar yang diterima BKKPN Kupang melalui Program LAUTRA dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi pada tahun 2025, sementara LKKPN Pekanbaru tidak memperoleh dukungan pendanaan serupa.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Beberapa faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja ini selain pelaksanaan kegiatan rutin yaitu BKKPN Kupang telah berupaya menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat kawasan konservasi antara lain:

- **Inovasi SILA DALIPATIK**, BKKPN Kupang melakukan kolaborasi dengan Yayasan Cahaya Samudera Indonesia membuat suatu inovasi SILA DALIPATIK (Aksi Kolaboratif Dalam Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah Plastik) yang diimplementasikan sejak tahun 2022 hingga saat ini, inovasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan ekonomi biru KKP khususnya dalam pengendalian sampah di kawasan konservasi Laut Banda dan sekitarnya, dan telah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Peringkat I Coastal Award Pengelolaan Sumberdaya Laut pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023, dan juga telah memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan membangun kesadaran kepada para siswa dari berbagai tingkatan pendidikan.
- **Inovasi Taman Karang Piracora**, BKKPN Kupang bersama kelompok Web Spider di kabupaten Pangkajene Kepulauan telah menerapkan suatu inovasi berupa Taman Karang Piracora yaitu suatu bentuk rehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan kelompok masyarakat secara mandiri di Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya, diimplementasikan sejak tahun 2014 hingga saat ini, telah memperoleh penghargaan sebagai TOP 15 pada kompetisi inovasi pelayanan publik lingkup KKP tahun 2024, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas

lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, dan menjadi destinasi wisata buatan baru yang memberikan kontribusi terhadap PNPB, direplikasi di beberapa daerah antara lain di Jayapura oleh LPSPL Sorong, Tiaka Oil Field oleh Manajemen JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi, Gusung Toraja Kabupaten Polewali Mandar oleh Komunitas Laut Biru.



Gambar 11 (Kiri) Inovasi Sila Dalipatik di Kawasan Konservasi Laut Banda dan (Kanan) Inovasi Taman Karang Piracora di Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang

Selain itu, sebagai respons atas tantangan terkait kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan penghentian sementara program LAUTRA hingga Juni 2025, BKKPN Kupang telah melakukan penyesuaian dan penajaman rencana pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan aktivitas yang berdampak langsung terhadap peningkatan Nilai EVIKA, serta mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran. Upaya ini didukung melalui pemantauan dan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh kawasan konservasi. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, seluruh kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian indikator kinerja EVIKA pada tahun 2025 dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga target indikator kinerja tetap dapat dicapai.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan mitra dan stakeholder terkait di kawasan konservasi. Selain itu sebagian besar pegawai yang tersebar di seluruh wilayah kerja BKKPN Kupang telah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan teknis, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan oleh masing-masing wilker secara mandiri. Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Persentase Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera – LAUTRA (PLN)	39.433.148.000	30.379.444.768	9.053.703.232	22,96
2	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (PNBP)	5.047.100.000	4.971.588.312	75.511.688	1,50
JUMLAH		44.480.248.000	35.351.033.080	9.129.214.920	20,52

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp44.480.248.000, yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp39.433.148.000, dan bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.047.100.000. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp35.351.033.080, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp9.129.214.920 atau 20,52%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan penunjang capaian kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang telah menerapkan prinsip **Pengarusutamaan Gender (PUG)** dengan memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-

laki. Detail jumlah keterlibatan gender dalam beberapa pelaksanaan kegiatan dijabarkan pada table dibawah ini:

Tabel 10 Data Keterlibatan Gender Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Nilai EVIKA BKKPN Kupang 2025

Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Gender Peserta yang Hadir (Termasuk Narasumber)		Jumlah Peserta
		L	P	
Bimtek dan Sertifikasi Penilai Ekosistem Ikan Karang	27 Oktober - 6 November 2025	10	2	12
Bimtek dan Sertifikasi Selam Pengelola Kawasan Konservasi	6 – 14 Juli 2025 13-19 Juli 2025 19-22 Agustus 2025	26	4	30
Penguatan Masyarakat untuk Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	19- 25 Oktober	21	1	22
Penguatan Masyarakat untuk Pengelolaan Ekowisata Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	20 - 24 Agustus 2025	25	8	33
Penguatan Masyarakat untuk Pengendalian Sampah di Kawasan Konservasi Laut Banda	22 Juli 2025 24 Juli 2025 25 Agustus 2025 28 Oktober 2025	124	91	215
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara	22-24 September 2025	27	24	51
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang	23-25 November 2025	30	20	50
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido	16, 17, dan 18 Juli 2025	80	18	98
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	8 - 12 Agustus 2025	92	83	175
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	12-15 November 2025	73	88	161
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Laut Banda	18 Juni 2025 19 Agustus 2025	61	39	100
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	21-22 Oktober 2025	32	4	36
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu	12 Juli 2025 9 Agustus 2025 22-23 Agustus 2025 22 Agustus 2025 20-22 Oktober 2025	49	21	70
Sosialisasi Pemangku Kepentingan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	20 - 25 Oktober 2025	23	4	27
Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi	7-11 September 2025	51	17	68
Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat	25 Juni 2025	25	8	33
TOTAL		749	432	1181
PERSENTASE		63%	37%	

Kegiatan diikuti oleh peserta dengan komposisi **37% perempuan dan 63% laki-laki**, yang menunjukkan keterlibatan gender secara inklusif tanpa

diskriminasi. Seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama dalam menerima informasi, berpartisipasi dalam diskusi, serta menyampaikan pendapat dan aspirasi. Penerapan PUG dalam kegiatan ini mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkeadilan, responsif gender, dan berkelanjutan sesuai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lebih lengkap kegiatan pendukung yang telah dilakukan guna pencapaian target indikator kinerja ini adalah sebagai berikut

- a. Survei kondisi habitat dan ekosistem kawasan konservasi di wilker BKKPN Kupang yang bertujuan untuk menyediakan data ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove yang mencakup persentase karang hidup; jenis, kelimpahan dan biomassa ikan karang; jenis dan kelimpahan megabenthos; jenis dan persentase tutupan lamun; serta jenis, kerapatan dan persentase tutupan kanopi mangrove yang disajikan dalam bentuk peta sebaran dan grafik perubahan kondisi ekosistem dan habitat.



Gambar 12 Survei Kondisi Habitat dan Ekosistem Kawasan Konservasi

- b. Survei biota laut dilindungi di wilker BKKPN Kupang yang bertujuan untuk menyediakan data biota dilindungi di kawasan konservasi yang memuat jenis, jumlah, aktivitas, waktu, Lokasi kemunculan, Lokasi peneluran dan penetasan yang dapat disajikan dalam bentuk data spasial.



Gambar 13 Survei Biota Laut Dilindungi Kawasan Konservasi

- c. Survei kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilker BKKPN Kupang bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi Masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap tata kelola, kondisi sumberdaya, pemanfaatan, ancaman serta permasalahan di kawasan konservasi.



Gambar 14 Survei Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi

- d. Pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi di wilker BKKPN Kupang bertujuan untuk menyediakan data aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang meliputi penangkapan dan budidaya ikan, pariwisata, pendidikan dan penelitian, pendirian dan penempatan bangunan serta instalasi, pemanfaatan air laut selain energi, transportasi perairan, dan pelaksanaan adat istiadat, serta penyediaan data aktivitas pelanggaran terhadap pemanfaatan dan kesesuaian zonasi kawasan konservasi.



Gambar 15 Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- e. Penjangkauan masyarakat di kawasan konservasi wilker BKKPN Kupang bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi, biota dilindungi dan menjaring aspirasi dalam upaya perbaikan pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 16 Penjangkauan Masyarakat di Kawasan Konservasi

- f. Sosialisasi Pemangku Kepentingan di Kawasan Konservasi, yang bertujuan untuk melakukan pembimbingan dan mensosialisasikan peraturan dan perundangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan kepada Stakeholders terkait di sekitar kawasan konservasi.



Gambar 17 Sosialisasi Pemangku Kepentingan di Kawasan Konservasi

- g. Bimtek dan sertifikasi selam bagi pengelola kawasan konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi selam tenaga teknis pengelola kawasan konservasi. Sertifikasi dilakukan untuk tingkatan *open water diver* (A1), *advanced diver* (A2), dan *rescue diver*.



Gambar 18 Bimtek dan Sertifikasi Selam Pengelola Kawasan Konservasi

- h. Technical meeting penyediaan data dan informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam penyediaan data dan informasi terkait pemanfaatan kawasan konservasi



Gambar 19 Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi

- i. Respon cepat penanganan ancaman sumberdaya kawasan konservasi, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan penanganan cepat terhadap berbagai ancaman kelestarian sumberdaya di wilayah kerja BKKPN Kupang



Gambar 20 Respon Cepat Penanganan Ancaman Sumberdaya Kawasan Konservasi

- j. Penguatan kelompok masyarakat di kawasan konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan konservasi.



Gambar 21 Penguatan Masyarakat Di Kawasan Konservasi

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan menyusun rencana kerja tahunan 2026.

3.2 Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

3.2.1 IKU 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha / Industri / Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Kemitraan Konservasi yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Target indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 kesepakatan. Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11 Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 2. Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang											
IKU 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target 2029	Capaian sd 2025	%	
4	3	3	2	2	11	120	9	-	-	-	

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

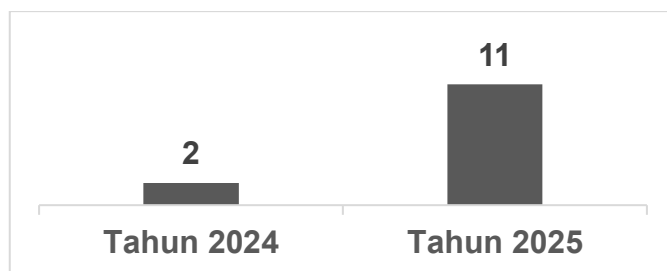
Pengukuran target indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target semesteran. Capaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebanyak 11 kesepakatan dari target sebanyak 2 kesepakatan, sesuai surat penyampaian kepala BKKPN Kupang sebagai berikut:

1. Surat nomor B.726/BKKPN/PRL.440/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 (Yayasan Gili Matra Bersama)
2. Surat nomor B.738/BKKPN/PRL.440/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 (Yayasan Penyu Papua)
3. Surat nomor B.789/BKKPN/PRL.440/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 (Trawangan Dive Indah, Windmolen, Samudra Indah Diving, Blue Marlin International, Karang Indah Selam)
4. Surat nomor B.790/BKKPN/PRL.440/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 (Universitas Artha Wacana)
5. Surat nomor B.2120/BKKPN/PRL.440/IX/2025 tanggal 26 September 2025 (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro)
6. Surat nomor B.2119/BKKPN/PRL.440/IX/2025 tanggal 26 September 2025 (Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada)
7. Surat B.512/BKKPN/PRL.440/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 (Fakultas Pertanian, Universitas Mataram)

Seluruh draft kesepakatan tersebut diatas telah dilakukan penandatanganan pengesahan di tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Terdapat perbedaan periode pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan tahun 2025, dimana tahun 2024 dilakukan secara tahunan dan tahun 2025 dilakukan secara semesteran, namun demikian pada tahun 2024 indikator ini dilakukan pengukuran, oleh karena itu pada periode saat ini dapat dibandingkan, dan terdapat peningkatan sebesar 400% dari capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, perbandingan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 22 Perbandingan Capaian Kemitraan Tahun 2024 dan 2025

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Namun demikian, indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra DJPK Tahun 2025-2029 karena tidak terdapat indikator kinerja yang serupa atau sepadan dalam dokumen tersebut.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbandingan Capaian Kemitraan Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	2	1
Capaian Kemitraan 2025	11	3
Persentase Capaian	550%	300%

Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 11 atau tercapai 550% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 3 atau tercapai 300% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari LKKPN Pekanbaru. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah kawasan konservasi yang dikelola dimana BKKPN Kupang mengelola 8 kawasan sedangkan LKKPN Pekanbaru hanya mengelola 2 kawasan, sehingga potensi inisiasi kemitraan lebih besar dilakukan dengan BKKPN Kupang.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor Pendukung capaian yang menyebabkan adanya keberhasilan pencapaian target saat ini adalah antara lain:

- Terdapat kebijakan kewajiban pemegang izin SIUPKK harus bermitra dengan Pengelola kawasan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 75 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
- luasnya wilayah kerja BKKPN Kupang memperbesar potensi mitra
- banyaknya mitra yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan kawasan konservasi

Selain itu, dalam rangka mendorong peningkatan capaian indikator kinerja, BKKPN Kupang juga mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas daring dalam pelaksanaan kegiatan. Proses pembahasan kemitraan mulai dari inisiasi hingga penyusunan draft akhir perjanjian kemitraan dilakukan secara hybrid online maupun offline.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan mitra dan stakeholder terkait di kawasan konservasi dengan. Selain itu juga beberapa pelaksanaan kegiatan penunjang dilakukan secara daring maupun hybrid sehingga menghemat penggunaan anggaran. Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Persentase Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera – LAUTRA (PLN)	368.852.000	244.181.470	124.670.530	33,80
JUMLAH		368.852.000	244.181.470	124.670.530	33,80

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp368.852.000 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp244.181.470, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp124.670.530 atau 33,8%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan guna pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut

- a. Inisiasi, Finalisasi dan Penandatanganan Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan 11 mitra antara lain :
 1. Yayasan Gili Matra Bersama
 2. Yayasan Penyu Papua
 3. Universitas Kristen Artha Wacana
 4. PT. Blue Marlin Dive
 5. PT. Karang Indah Selam
 6. PT. Samudera Indah Diving

7. PT. Windmolen
 8. PT. Trawangan Dive Indah
 9. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
 10. Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
 11. Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada
- b. Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Triwulanan Tahun 2025

00



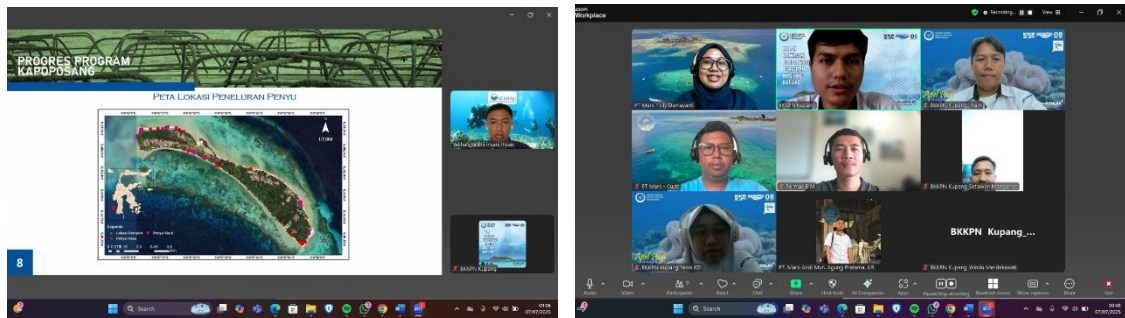
Gambar 23 Inisiasi Kemitraan Konservasi



Gambar 24 Finalisasi Kemitraan Konservasi



Gambar 25 Penandatanganan Perjanjian Kemitraan Konservasi



Gambar 26 Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Konservasi

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan menyusun data potensi mitra yang dapat dilakukan kerjasama kemitraan di tahun 2026.

3.3 Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang.

3.3.1 IKU 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi diperoleh dari penjumlahan 2 kriteria yaitu Permohonan yang dilayani dengan bobot 80% dan Ketepatan Waktu Pelayanan dengan bobot 20%.

Target indikator kinerja utama Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14 Capaian Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 3. Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 3. Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
-	-	-	-	90	97,52	108,36	-	90	97,52	108,36

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang adalah sebesar 97,52 atau 108,35% dari target sebesar 90, sebagaimana surat nomor B.50/BKKPN/RC.610/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian IKU Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang.

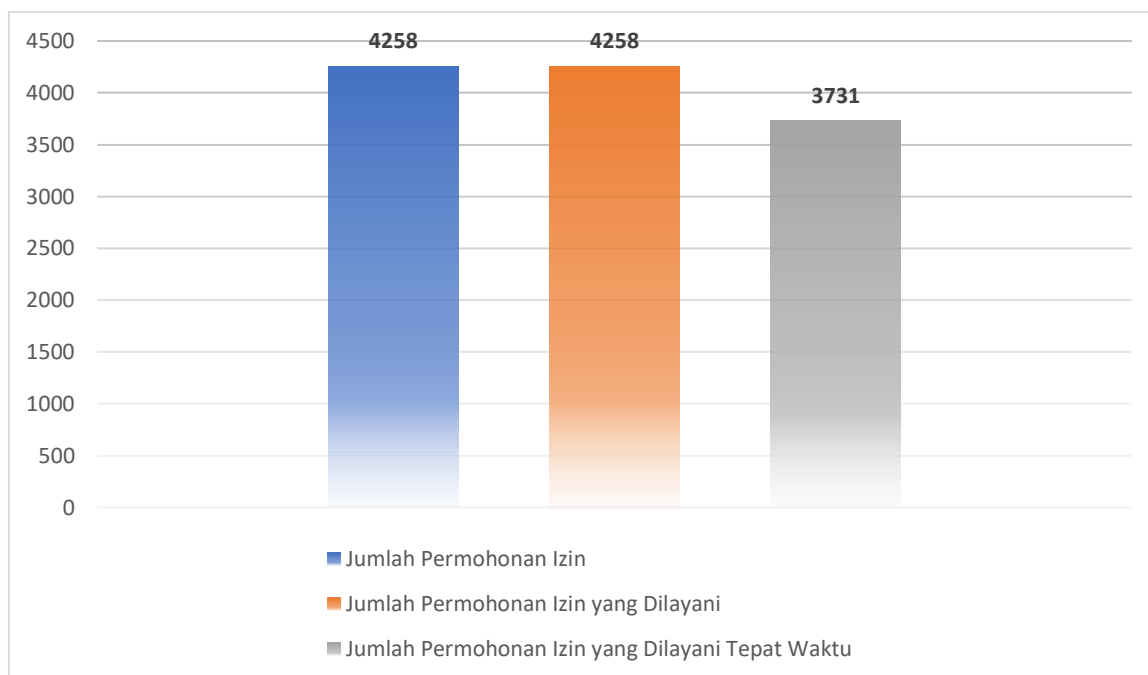
Pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang telah diterbitkan berupa karcis masuk kegiatan pariwisata alam perairan, tanda masuk kegiatan penelitian dan tanda masuk kegiatan pendidikan di wilayah kerja BKKPN Kupang, Adapun jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 37.605 izin, yang terdiri dari 37.521 karcis masuk kegiatan pariwisata alam perairan, 68 tanda masuk penelitian dan 16 tanda masuk pendidikan, serta telah berkontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3.841.685.000, Adapun jumlah penerbitan izin dan penerimaan negara bukan pajak, serta kontribusi masing-masing wilayah kerja BKKPN Kupang disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 15 Data Penerbitan Izin dan Perolehan PNB di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Kawasan	Karcis Masuk PAP		Tanda Masuk Lit		Tanda Masuk Dik		Jumlah	
		Izin	PNBP	Izin	PNBP	Izin	PNBP	Izin	PNBP
1	Gili Matra	35,395	3,454,515,000	20	3,600,000	16	160,000	35,431	3,458,275,000
2	Waigeo	1,364	269,790,000	-	-	-	-	1,364	269,790,000
3	Laut Sawu	267	47,790,000	34	5,400,000	-	-	301	53,190,000
4	Raja Ampat	129	37,360,000	-	-	-	-	129	37,360,000
5	Kapoposang	287	11,630,000	13	1,350,000	-	-	300	12,980,000
6	Laut Banda	35	6,995,000	1	100,000	-	-	36	7,095,000
7	Padaido	44	2,995,000	-	-	-	-	44	2,995,000
8	Aru Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		37,521	3,831,075,000	68	10,450,000	16	160,000	37,605	3,841,685,000

Untuk perhitungan Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang, sumber data perhitungan diperoleh dari data pengguna layanan yang telah tercatat dalam aplikasi Seapark (seapark.kkp.go.id) selama tahun 2025. Perhitungan capaian dilakukan

dengan menjumlahkan 2 kriteria yaitu permohonan yang dilayani dengan bobot nilai (80) dan ketepatan waktu pelayanan dengan bobot nilai (20).



Gambar 27 Data Permohonan Izin Aktivitas Pemanfaatan Kawasan Konservasi 2025

Pada tahun 2025 terdapat 4.258 permohonan izin, dimana 4.258 permohonan telah dilayani dan 3.731 permohonan telah dilayani secara tepat waktu. Sehingga perhitungan nilai minimum pelayanan adalah sebagai berikut :

- Kriteria permohonan yang dilayani adalah $4.258/4.258 \times 80 = 80$
- Kriteria ketepatan waktu adalah $3.731/4.258 \times 20 = 17,52$
- Total nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi BKKPN Kupang tahun 2025 adalah $80 + 17,52 = \mathbf{97,52}$

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Renstra DJPK Tahun 2025-

2029 adalah sebesar 90 pada tahun 2029, sedangkan capaian nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 97,52 atau tercapai 108,36% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	90	90
Kriteria permohonan yang dilayani	80	77,96
Kriteria ketepatan waktu	17,52	18,45
Nilai Minimum Izin Pemanfaatan Kawasan 2025	97,52	96,41
Persentase Capaian	108,36%	107,12%

Capaian Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 97,52 atau tercapai 108,36% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 96,41 atau tercapai 107,12% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari LKKPN Pekanbaru. Perbedaan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh nilai kriteria permohonan yang dilayani oleh BKKPN Kupang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, dengan selisih nilai sebesar 2,04.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan izin pemanfaatan kawasan konservasi, BKKPN Kupang telah mengimplementasikan layanan berbasis aplikasi, yaitu SEAPARK, yang

mempermudah proses pelayanan serta menjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan. Hal ini didukung oleh fitur notifikasi dalam aplikasi yang membantu petugas pelayanan untuk segera menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk.

Selain itu, penyelenggaraan pelayanan juga didukung oleh inovasi Gerai Pelayanan Sini Situ yang telah dibentuk di 14 lokasi wilayah kerja. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kesenjangan dalam pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi, khususnya rendahnya keterjangkauan masyarakat pemanfaat terhadap kantor pengelola kawasan konservasi dalam pengurusan perizinan. Keberadaan Gerai Pelayanan Sini Situ terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan serta kontribusi PNBP.



Gambar 28 Inovasi Gerai Pelayanan Sini Situ

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan pelayanan telah memaksimalkan teknologi informasi berupa aplikasi seapark.kkp.go.id. Selain itu seluruh petugas pelayanan di wilayah kerja BKKPN Kupang telah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pelayanan, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan

oleh masing-masing wilker secara mandiri. Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan pada tabel berikut:

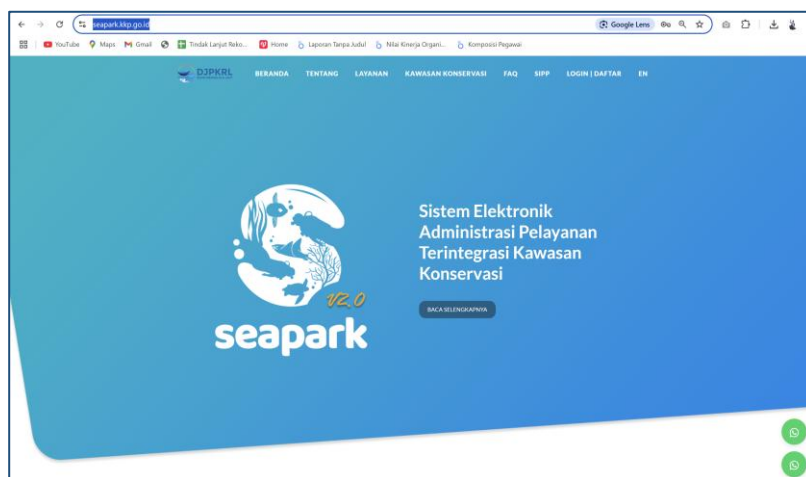
Tabel 17 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Persentase Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Pelayanan Perizinan Berusaha Kawasan Konservasi	400.000.000	266.328.213	133.671.787	33,42
JUMLAH		400.000.000	266.328.213	133.671.787	33,42

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Minimum Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang adalah sebesar Rp400.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp266.328.213, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp133.671.787 atau 33,42%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan guna pencapaian target indikator kinerja adalah pelaksanaan pelayanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang periode Januari - Desember 2025 yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi seapark yang dapat diakses melalui tautan <https://seapark.kkp.go.id/>.



Gambar 29 Halaman Dashboard Aplikasi SEAPARK

Untuk meningkatkan layanan kepada pelaku pemanfaat kawasan konservasi, selain pembukaan gerai pelayanan di 3 Pulau Gili di Kawasan Konservasi Gili Matra, BKKPN Kupang juga telah membuka Gerai Pelayanan Sini Situ mobile di wilayah Pantai Nemberala, Kabupaten Rote Ndao.



Gambar 30 Pembukaan Gerai Pelayanan Sini Situ di Rote Ndao

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membentuk Tim Pelayanan Publik 2026.

3.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersusunnya Dokumen Identifikasi

Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.4.1 IKU 4. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia;
- b. Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia; dan
- c. Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target indikator kinerja utama Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 Dokumen. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18 Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 4. Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 4. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target 2029	Capaian sd 2025	%
-	-	-	-	1	1	100	-	-	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen yang disusun. Data dukung berupa Laporan Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang telah disampaikan kepada Direktur Pulau-pulau Kecil melalui surat nomor B.3261/BKKPN/OT.120/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Penyampaian Laporan.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2025 di 8 Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan wilayah sekitarnya (Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, Kawasan Konservasi Laut Banda, Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara).

Terdata sebanyak **48 pelaku usaha** yang berhasil diidentifikasi secara lengkap yang tersebar di **16 Pulau**, mencakup 6 Wilayah Kabupaten yang terdiri dari 13 pelaku usaha di Pulau Rote (Kab. Rote Ndao), 9 pelaku usaha di Pulau Sebayur Besar, Sabolo Besar, Seraya Kecil, Siwona, Bidadari, dan Kanawa (Kab. Manggarai Barat), 6 pelaku usaha di Pulau Kapoposang dan Papandangan (Kab. Pangkajene Kepulauan), 6 pelaku usaha di Pulau Gam, Kurai, Yeben, Augusta, Wai (Kab. Raja Ampat), 3 pelaku usaha di Pulau

Naira (Kab. Maluku Tengah), dan 11 pelaku usaha di Pulau Wamar (Kab. Kepulauan Aru).

Jenis kegiatan yang dilakukan di pulau-pulau kecil adalah pariwisata (resort, villa, hotel, restoran) sebanyak 39 usaha, perikanan (cold storage, budidaya mutiara) sebanyak 7 usaha, dan lainnya (SPBU, BTS, real estate) sebanyak 2 usaha. Dengan status kepemilikan modal terdiri dari 15 usaha PMA (Penanaman Modal Asing) dan 33 usaha PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra/Matriks Pendanaan 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Namun demikian, indikator kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra DJPK Tahun 2025-2029 karena tidak terdapat indikator kinerja yang serupa atau sepadan dalam dokumen tersebut.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	1	1
Jumlah Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	1	1
Persentase Capaian	100%	100%

Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru tahun 2025 adalah sebesar 1 dokumen atau tercapai 100% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang sama dengan LKKPN Pekanbaru. Hal ini diakibatkan oleh jumlah dan periode pelaporan yang sama.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah pelibatan stakeholder terkait terutama dari Dinas PTSP Pemerintah Daerah setempat yang dapat menyediakan data awal daftar kegiatan usaha resort/hotel di pulau-pulau kecil sebelum dilakukan survei lapangan. Selain itu untuk mendukung capaian, dalam pelaksanaannya juga memaksimalkan penggunaan perangkat lunak komputer untuk identifikasi awal pemanfaatan pulau-pulau kecil melalui aplikasi google maps.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan mitra dan stakeholder terkait di kawasan konservasi serta kolaborasi dengan UPT DJPK lainnya yaitu BPSPL Denpasar dan LPSPL Sorong yang memiliki irisan wilayah kerja dengan BKKPN Kupang. Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)	200.000.000	197.131.124	2.868.876	1,43
JUMLAH		200.000.000	197.131.124	2.868.876	1,43

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp200.000.000 yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp197.131.124, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.868.876 atau 1,43%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan guna pencapaian target indikator kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu Wilker Rote Ndao (13-16 Agustus 2025)
2. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Kab. Manggarai Barat (13-16 Agustus 2025)
3. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Banda (14-16 & 23 Agustus 2025)
4. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Raja Ampat (26-28 Agustus 2025)
5. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Kab. Kepulauan Aru (27-29 Agustus 2025)
6. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Rote Ndao (24-29 September 2025)
7. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Kep. Kapoposang (7-10 Oktober 2025)

8. Sosialisasi dan Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Gili Matra (25-26 November 2025)
9. Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Kab. Raja Ampat (2-3 Desember 2025)



Gambar 31 Identifikasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil

8. Rencana Aksi

Tidak terdapat rencana kegiatan karena indikator kinerja ini tidak lagi digunakan pada perencanaan kinerja periode berikutnya.

3.5 Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen), Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%), Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%), Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (Persen), dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai).

3.5.1 IKU 5. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang

Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL, dimana kategori dan predikat penilaian PM SAKIP adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 21 Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Target indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 70. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang											
IKU 5. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target 2029	Capaian sd 2025	%	
-	-	88,20	90,75	70	91,85	120	1,1	78	91,85	117,76	

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 91,85 dengan Predikat AA (Sangat Memuaskan) atau tercapai 131,21% dari target sebesar 70. sebagaimana Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.3745/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BKKPN Kupang.

Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada aplikasi Kinerjaku KKP, dengan rincian hasil penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23 Rincian Hasil Penilaian PM SAKIP BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15	14,25
4	Evaluasi Internal	25	23,00
Nilai		100	91,85
Predikat			AA

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 adalah sebesar 90,75, sedangkan capaian tahun 2025 adalah sebesar 91,85, sehingga jika dibandingkan maka nilai tahun 2025 lebih besar dari tahun 2024 dengan peningkatan nilai sebesar 1,1. Adapun rincian perbandingan aspek penilaian PM SAKIP tahun 2024 dan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24 Perbandingan Aspek Penilaian PM SAKIP tahun 2024 dan 2025

No	Aspek Penilaian	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	27,60	26,10
2	Pengukuran Kinerja	28,50	28,50
3	Pelaporan Kinerja	12,90	14,25
4	Evaluasi Internal	21,75	23,00
Nilai		90,75	91,85

Hasil penilaian PM SAKIP tahun 2025 menunjukkan terdapat penurunan nilai pada aspek perencanaan kinerja, dan nilai yang sama pada aspek pengukuran kinerja, namun terdapat kenaikan nilai pada aspek pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Nilai penilaian mandiri SAKIP DJPK di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 78 pada tahun 2029, sedangkan capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 91,85 atau tercapai 117,76% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25 Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP Nasional Tahun 2025

No	Aspek Penilaian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
1	Perencanaan Kinerja	26,10	27,60
2	Pengukuran Kinerja	28,50	26,10
3	Pelaporan Kinerja	14,25	13,80
4	Evaluasi Internal	23,00	23,00
Nilai		91,85	90,50
Persentase Capaian		131,21%	129,28%

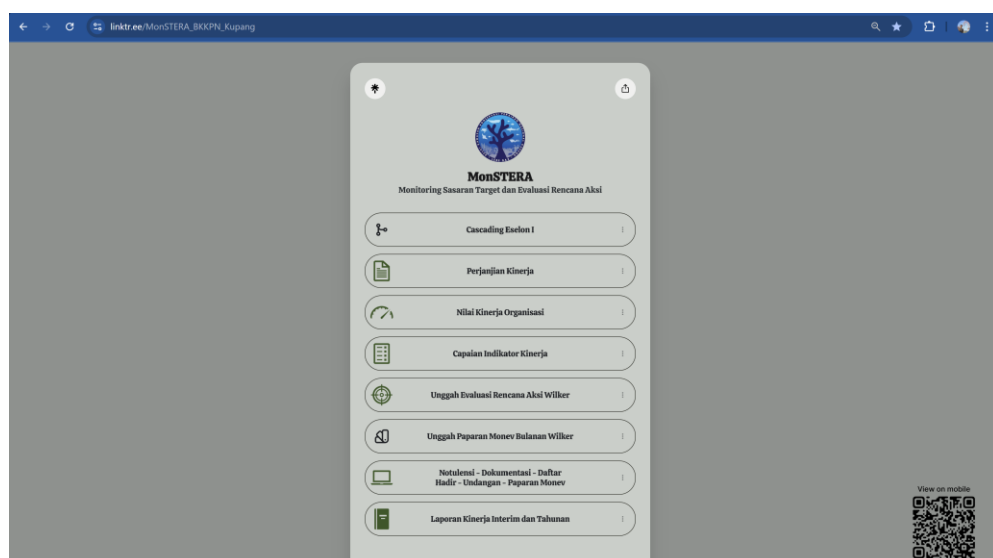
Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 91,85 atau tercapai 131,21% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 90,50 atau tercapai 129,28% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih tinggi dari LKKPN Pekanbaru. Hal ini dikarenakan terdapat capaian nilai yang lebih tinggi pada aspek pengukuran kinerja dan

pelaporan kinerja yang didukung oleh implementasi inovasi Platform MonSTERA dan Inovasi Taman Karang Piracora.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor Pendukung dalam peningkatan implementasi SAKIP Lingkup BKKPN Kupang diantaranya terdapat beberapa inovasi yang patut dihargai, khususnya dalam aspek pengukuran antara lain:

- Inovasi MonSTERA (monitoring sasaran target dan evaluasi rencana aksi) yang diterapkan sejak tahun 2023 hingga saat ini, MonSTERA merupakan suatu platform atau modul online berbasis website yang bertujuan untuk membangun early warning system dalam pencapaian kinerja, menyediakan data capaian kinerja organisasi tanpa harus memiliki akun, penyediaan data cascading dan croscating, media penyampaian laporan pelaksanaan program kegiatan wilker secara terpusat, media pemantauan tindak lanjut rekomendasi monev, peningkatan implementasi AKIP melalui teknologi informasi. Telah direplikasi oleh BPSPL Makassar sesuai surat keterangan replikasi nomor B.1486/BPSPL.3/PL.100/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan LPSPL Sorong sesuai surat keterangan replikasi nomor B.855/LPSPL.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.



Gambar 32 Dashboard Inovasi MonSTERA

- Inovasi Taman Karang Piracora merupakan program inovatif di bidang rehabilitasi terumbu karang yang berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Web Spider untuk perbaikan atau pemulihan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan sekaligus menciptakan suatu objek wisata buatan di bawah laut di Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya. Metode yang digunakan adalah rehabilitasi terumbu karang dengan metode transplantasi, media yang digunakan yaitu meja beton yang dinamakan piramida coral konservasi (PIRACORA). Inovasi ini telah terbukti sukses dan berhasil direplikasi oleh Lembaga Pelestarian Laut dan Pesisir "Laut Biru".



Gambar 33 Inovasi Taman Karang Piracora

Solusi yang telah dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan kelembagaan DJPKRL pada tahun 2025 yaitu dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara BKKPN Kupang dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut guna memastikan kesinambungan pelaksanaan kinerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh pegawai yang kompeten dan telah mengikuti pelatihan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KKP. Selain itu melalui implementasi inovasi MonSTERA, tim teknis di kawasan juga ikut berkontribusi langsung dalam pemantauan dan oemenuhan data dukung capaian kinerja BKKPN Kupang, sehingga terjalin sinergi dalam pengelolaan kinerja. Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran (RM)	70.000.000	63.267.334	6.732.666	9,62
2	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (RM)	320.720.000	284.875.301	35.844.699	11,18
JUMLAH		390.720.000	348.142.635	42.577.365	10,9

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebesar Rp390.720.000, yang bersumber dari Rupiah Murni. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp348.142.635, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp42.577.365 atau 10,9%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Verifikasi Pelaporan Online Triwulan IV Tahun 2024, Triwulan I 2025, Triwulan II 2025, dan Triwulan III 2025 Lingkup DJPKRL & DJPK
- Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, Triwulan I 2025, Triwulan II, dan Trowulan III 2025 Lingkup DJPKRL & DJPK
- Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2025 tanggal 23-24 Januari 2025

- Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL tanggal 5-7 Februari 2025
- Dialog Kinerja Lingkup BKKPN Kupang tanggal 18 Februari 2025
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 lingkup DJPK tanggal 27-28 Oktober 2025
- Pleno Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup DJPK Tahun 2025 tanggal 1-3 Desember 2025
- Evaluasi rencana aksi berkala bulanan
- Monitoring pelaksanaan program kegiatan berkala bulanan



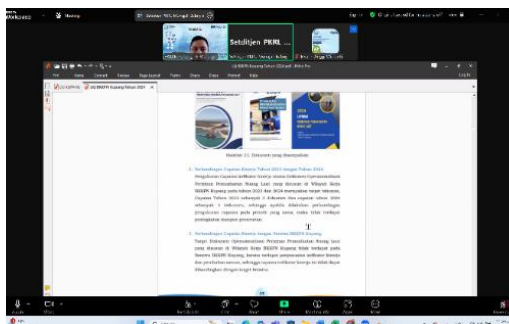
Gambar 34 Verifikasi Pelaporan Online



Gambar 35 Penyusunan Laporan Kinerja



Gambar 36 Finalisasi Dokumen Perencanaan



Gambar 37 Reviu Laporan Kinerja



Gambar 38 Dialog Kinerja Tahun 2025



Gambar 39 Evaluasi SAKIP Lingkup DJPK Tahun 2025



Gambar 40 Pleno SAKIP Lingkup DJPK Tahun 2025



Gambar 41 Monitoring pelaksanaan program kegiatan berkala

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membentuk Tim Pengelola Kinerja 2026 dan menyusun Rencana Aksi 2026.

3.5.2 IKU 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot nilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Bobot Nilai

No	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bobot Nilai (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (Halaman III DIPA)	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Jumlah		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Target indikator kinerja manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 89. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKU 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
94,17	95,95	99,42	99,56	89	92,63	104,08	-6,93	91	92,63	101,79

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 ini adalah sebesar 92,63 atau tercapai 104,08% dari target sebesar 89, sebagaimana pemantauan pada aplikasi OM-Span terhadap nilai IKPA BKKPN Kupang pada periode Desember 2025 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 Tanggal 10 Januari 2026 Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025. Adapun capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 29 Capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Kriteria	Indikator	Bobot	Nilai
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10	10,00
		Deviasi Hal. III DIPA	15	13,94
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	20	14,18
		Belanja Kontraktual	10	10,00
		Penyelesaian Tagihan	10	10,00
		Pengelolaan UP dan TUP	10	9,52
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25	25,00
Nilai Akhir			100	92,63



spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPAstaker/indikatorKinerja

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	92.90	70.00	100.00	100.00	95.15	100.00	92.63	100%	0.00	92.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	14.18	10.00	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	96.45			91.51			100.00				

Gambar 42 Tampilan Nilai IKPA BKKPN Kupang Tahun 2025 di Aplikasi OM-Span

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 99,56 dan capaian tahun 2025 adalah sebesar 92,63, jika dibandingkan, maka capaian tahun 2025 lebih rendah sebesar -6,93 dari capaian tahun 2024. Adapun perbandingan rincian capaian nilai IKPA tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30 Perbandingan Nilai IKPA BKKPN Kupang Tahun 2024 dan 2025

No	Kriteria	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10,00	10,00
		Deviasi Hal. III DIPA	15,00	13,94
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	20,00	14,18
		Belanja Kontraktual	10,00	10,00
		Penyelesaian Tagihan	10,00	10,00
		Pengelolaan UP dan TUP	9,56	9,52
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25,00	25,00
Nilai Akhir			99,56	92,63

Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan nilai IKPA yang cukup signifikan, khususnya pada komponen deviasi halaman III DIPA sebesar

1,06 dan komponen penyerapan anggaran sebesar 5,82. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, penghentian sementara pelaksanaan Program LAUTRA, serta penambahan anggaran PNPB pada akhir tahun anggaran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 91 pada tahun 2029, sedangkan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 92,63 atau tercapai 101,79% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai IKPA tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31 Perbandingan Capaian Nilai IKPA Nasional Tahun 2025

No	Kriteria	Indikator	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru	Selisih Nilai
1	Kualitas Perencanaan	Revisi DIPA	10,00	10,00	-
		Deviasi Hal. III DIPA	13,94	15,00	-1,06
2	Kualitas Pelaksanaan	Penyerapan Anggaran	14,18	20,00	-5,82
		Belanja Kontraktual	10,00	8,60	-1,4
		Penyelesaian Tagihan	10,00	10,00	-
		Pengelolaan UP dan TUP	9,52	10,00	-0,48
3	Kualitas Hasil	Capaian Output	25,00	25,00	-
Nilai Akhir			92,63	98,60	-5,97

Capaian Nilai IKPA lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2025 sebesar 92,63 atau setara dengan 104,08% dari target, sedangkan capaian Nilai IKPA LKKPN Pekanbaru sebesar 98,60 atau setara dengan 110,79% dari target. Dengan demikian, apabila dibandingkan capaian kinerjanya, Nilai

IKPA BKKPN Kupang masih lebih rendah dibandingkan dengan LKKPN Pekanbaru. Deviasi nilai yang paling signifikan terdapat pada indikator penyerapan anggaran dengan selisih sebesar 5,82. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan anggaran di BKKPN Kupang, khususnya akibat adanya kebijakan penundaan sementara sebagian anggaran LAUTRA untuk Program Ocean Monitoring System (OMS).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja disebabkan oleh terpenuhinya sebagian besar aspek penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang telah mencapai 100%, dan adanya penerapan inovasi yang turut mendukung ketercapaian indikator kinerja. Inovasi dimaksud adalah PLAKAT (Platform Keuangan Terintegrasi BKKPN Kupang) yang merupakan Platform yang digunakan secara internal oleh BKKPN Kupang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang meliputi perencanaan kebutuhan anggaran kegiatan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, inovasi ini telah diterapkan sejak tahun 2022 hingga saat ini dan telah berhasil di replikasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat keterangan nomor: KT.04/BPKHTL.XIV/TU/PIA.41/B/06/2024 tanggal 4 Juni 2024.



Gambar 43 Penerapan Inovasi Plakat

Sebagai respons atas tantangan kebijakan pemblokiran anggaran sebesar Rp8.899.860.000 (14,99%), penghentian sementara Program LAUTRA hingga Juni 2025, serta penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp5.047.100.000, BKKPN Kupang telah melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA setiap triwulan, penyusunan prognosa serapan anggaran hingga akhir tahun, serta monitoring rutin bulanan pelaksanaan anggaran guna menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dengan dilakukan oleh para pegawai yang berkompeten dibidangnya dalam pencapaian target kinerja, dan terdapat efisiensi biaya, serta telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi OM SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang

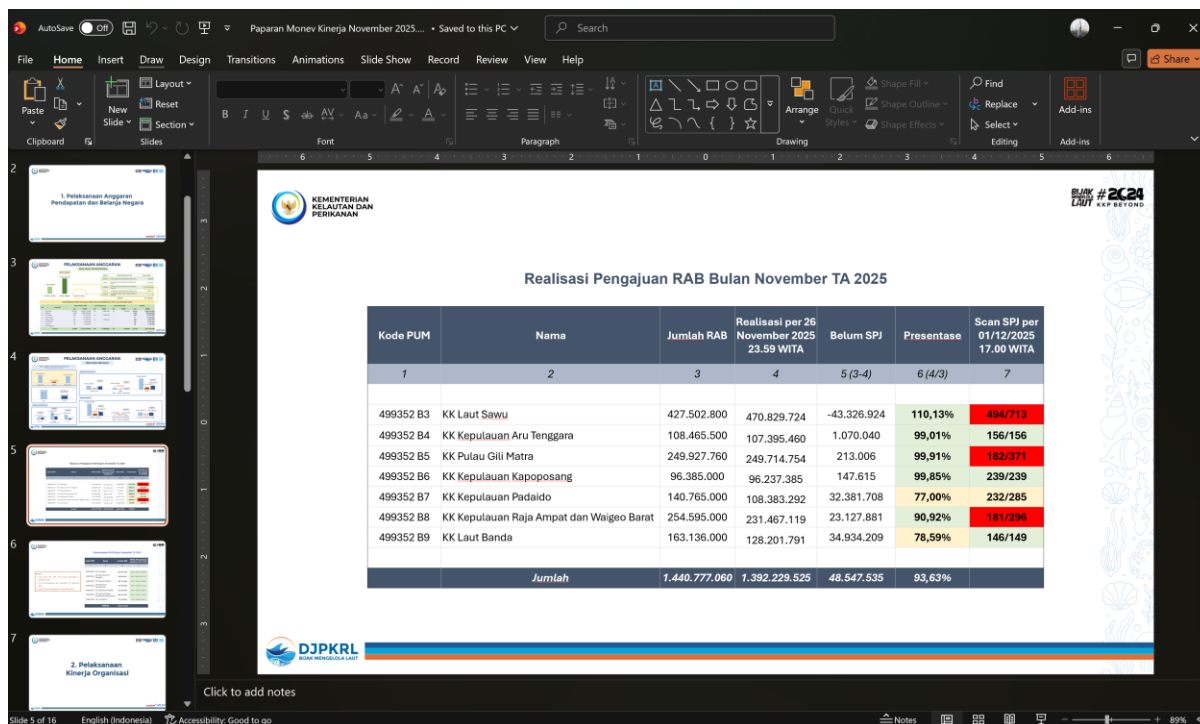
No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan Rumah Tangga (RM)	4.187.000	4.187.000	-	0,00%
2	Gaji dan Tunjangan (RM)	8.601.347.000	8.392.625.704	208.721.296	2,43%
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	4.214.000.000	3.829.655.820	384.344.180	9,12%
JUMLAH		12.819.534.000	12.226.468.524	593.065.476	4,63%

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKKPN Kupang adalah sebesar Rp12.819.534.000, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp12.226.468.524, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp593.065.476 atau 4,63%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- telah dilakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran melalui pengelolaan UP dan TUP dan telah dilakukan penginputan data capaian rincian output secara berkala.
- Pengelolaan UP dan TUP; dan
- Konfirmasi capaian output melalui aplikasi SAKTI.
- Monitoring rutin bulanan pelaksanaan kegiatan
- Pembahasan prognosa penyerapan hingga akhir tahun



Gambar 44 Kegiatan Monitoring Rutin Bulanan Pelaksanaan Anggaran

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membentuk Tim Pengelola Keuangan 2026 dan menyusun RKT Satpel 2026.

3.5.3 IKU 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila $NKPA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKPA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKPA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKPA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Cara perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu yang didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

Target indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 71,5. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang											
IKU 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%	
-	-	-	94,42	71,50	100,00	139,86 (120)	5,58	82,50	100,00	121,21	

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 ini adalah sebesar 100 atau tercapai 139,86% (kinerjaku 120) dari target sebesar 71,5, Sebagaimana pemantauan pada aplikasi Monev Kemenkeu terhadap nilai NKPA BKKPN Kupang pada periode Desember 2025 dan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Adapun capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran disajikan pada gambar berikut:

←

→

↺

monev.kemkenku.go.id/app2025/satker/nkasatker

☆

Logout

MONEY

≡

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RolePilih TA (2025)

Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan10entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.07.499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Gambar 45 Detail Rincian Capaian Kinerja Nilai NKPA BKKPN Kupang Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 94,42 dan capaian tahun 2025 adalah sebesar 100,00, jika dibandingkan, maka capaian tahun 2025 lebih tinggi sebesar 5,58 dari capaian tahun 2024. Hal ini karena terdapat peningkatan nilai indikator efisiensi SBK sebesar 37,2 yang didukung oleh peningkatan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan BMN. Adapun perbandingan rincian capaian nilai IKPA tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 34 Perbandingan Nilai NKPA BKKPN Kupang Tahun 2024 dan 2025

No	Kriteria	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Efektivitas	Capaian RO	100,00	100,00
1	Efisiensi	Penggunaan SBK	100,00	100,00
		Efisiensi SBK	62,80	100,00
Nilai Akhir			94,42	100,00

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPK di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 82,5 pada tahun 2029, sedangkan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 100,00 atau tercapai 121,21% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35 Perbandingan Capaian Nilai NKPA Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	71,5	71,5
Capaian RO	100	100
Penggunaan SBK	100	100
Efisiensi SBK	100	94,95
Nilai NKPA 2025	100	99,24
Persentase Capaian	139,86%	138,80%

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) BKKPN Kupang pada tahun 2025 mencapai nilai 100 atau 139,86% dari target, lebih tinggi dibandingkan LKKPN Pekanbaru yang mencapai nilai 99,24 atau 138,80% dari target. Perbedaan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh nilai indikator efisiensi SBK BKKPN Kupang yang lebih tinggi sebesar 0,76 dibandingkan LKKPN Pekanbaru, yang mencerminkan penerapan SBK yang lebih efisien. Sementara itu, di LKKPN Pekanbaru masih terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya efisien dalam penggunaan SBK pada pelaksanaan kegiatannya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan BKKPN Kupang dalam mencapai target indikator kinerja didukung oleh optimalisasi pencatatan capaian Rincian Output (RO) secara akurat serta pelaksanaan pemantauan rutin terhadap kegiatan yang menggunakan Standar Biaya Khusus (SBK). Upaya tersebut memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga capaian indikator dapat terukur dan terkendali dengan baik.

Terdapat tantangan teknis berupa data integrasi antara aplikasi Monev Kementerian Keuangan dan aplikasi SAKTI yang belum sepenuhnya mutakhir. Sebagai solusi, BKKPN Kupang secara aktif telah melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI serta pemantauan berkala melalui aplikasi Monev Kementerian Keuangan guna memastikan konsistensi dan validitas data pelaporan kinerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu dengan menugaskan pegawai yang berkompeten dan telah mengikuti diklat/bimtek pengisian capaian output, terdapat pula efisiensi biaya, karena tidak terdapat alokasi anggaran khusus dan telah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan aplikasi Monev Kemenkeu yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah dengan melaksanakan kriteria-kriteria penilaian NKPA sesuai dengan ketentuan yaitu pengisian capaian output secara rutin setiap bulan pada aplikasi SAKTI, kepatuhan dalam penggunaan standar biaya khusus, dan melakukan efisiensi atas penggunaan standar biaya khusus.

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan menyusun anggaran penggunaan SBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.5.4 IKU 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang

Penyelenggaraan SPIP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Target indikator kinerja manajerial Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 4 Dokumen. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36 Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang											
IKU 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%	
-	4	4	4	4	4	100	-	-	-	-	

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang sampai dengan periode triwulan IV tahun 2025 adalah sebanyak 4 Dokumen dari target 4 dokumen atau tercapai 100%, adapun capaian indikator kinerja adalah laporan SPIP triwulan IV tahun 2024 , triwulan I 2025, triwulan II 2025 dan triwulan III 2025 yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat sebagai berikut:

- Surat nomor B.110/BKKPN/TU.140/I/2025 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024;
- Surat nomor B.593/BKKPN/TU.140/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Laporan SPIP Triwulan I 2025
- Surat nomor B.1242/BKKPN/TU.140/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 perihal Laporan SPIP Triwulan II 2025
- Surat nomor B.2322/BKKPN/TU.140/X/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 perihal Laporan SPIP Triwulan III 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4 dokumen, sedangkan pada tahun 2025 juga mencapai 4 dokumen. Dengan demikian, apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian, karena realisasi indikator kinerja pada kedua tahun tersebut sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra KKP Tahun 2025-2029. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK (Nilai), sedangkan pada Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen), sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2025-2029

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Capaian Laporan SPIP Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	4	4
Laporan SPIP	4	4
Persentase Capaian	100%	100%

Capaian Laporan SPIP pada lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025 tercatat sebanyak 4 dokumen atau mencapai 100% dari target. Pada periode yang sama, LKKPN Pekanbaru juga mencapai capaian Laporan SPIP sebanyak 4 dokumen atau 100% dari target. Dengan demikian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Laporan SPIP BKKPN Kupang setara dengan capaian kinerja LKKPN Pekanbaru. Hal ini diakibatkan oleh jumlah dan periode pelaporan yang sama.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan pemantauan rutin yang dilakukan BKKPN Kupang secara bulanan dan triwulanan, khususnya terhadap laporan SPIP, yang memastikan kepatuhan, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan. Pemantauan yang berkelanjutan tersebut memperkuat pengendalian internal serta memungkinkan tindak lanjut cepat atas potensi permasalahan, sehingga target indikator kinerja BKKPN Kupang dapat tercapai 100%.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam melaksanakan kegiatan melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, penugasan tim SPIP melalui Surat Tugas juga efektif dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan SPIP hingga tingkat wilayah kerja. Disamping itu terdapat pula efisiensi terkait biaya, perhitungan efisiensi biaya dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Laporan SPIP pada lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan Manajemen Keuangan (RM)	23.656.000	22.818.660	837.340	3,54
JUMLAH		23.656.000	22.818.660	837.340	3,54

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Laporan SPIP pada lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp23.656.000, yang bersumber dari Rupiah Murni. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp22.818.660, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp837.340 atau 3,54%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, telah dilakukan kegiatan pendukung capaian di tahun 2025 antara lain:

- Penyusunan laporan SPIP triwulan IV tahun 2024, triwulan I tahun 2025, triwulan II tahun 2025 dan triwulan III tahun 2025
- Identifikasi dan penilaian risiko tahun 2025
- Pemantauan dan pengendalian risiko dengan pendekatan MR secara berkala.

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membentuk Tim SPIP 2026 dan menyusun matrik identifikasi risiko kegiatan 2026.

3.5.5 IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019. Kategori Penilaian Indeks Profesionalitas ASN antara lain :

- 91-100 Sangat Tinggi;
- 81-90 Tinggi;
- 71-80 Sedang;
- 61-70 Rendah; dan
- < 60 Sangat Rendah.

Target indikator kinerja manajerial Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 80. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

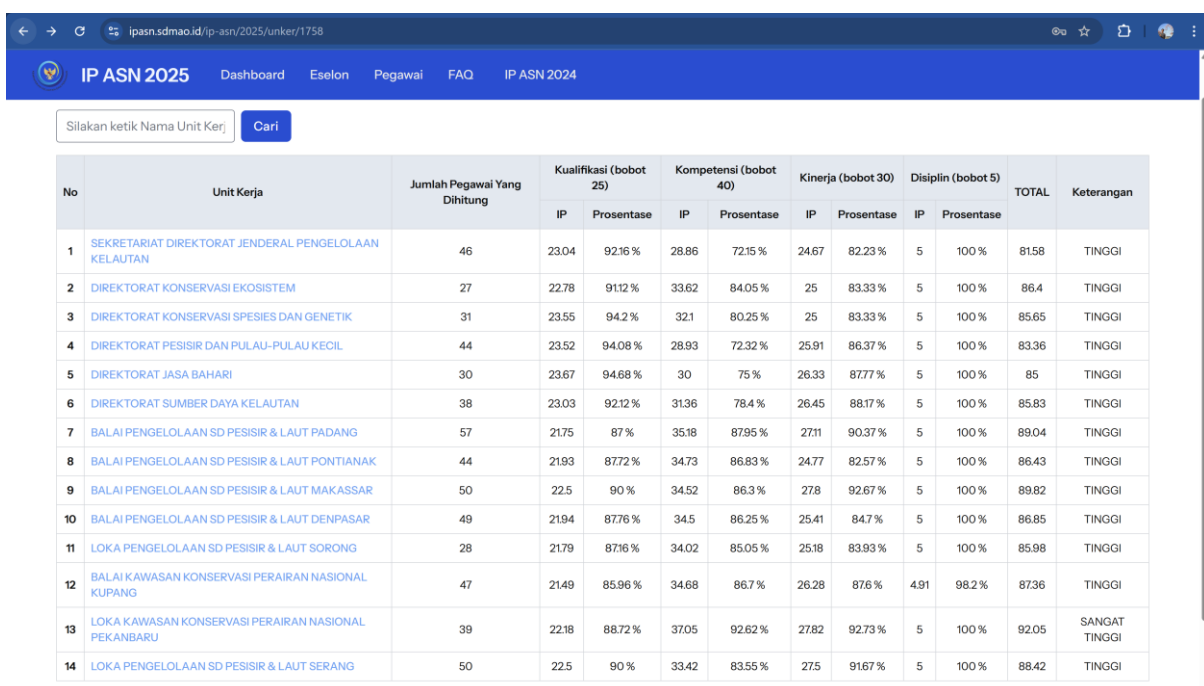
Tabel 39 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
84,77	84,45	91,53	91,27	80	87,36	109,2	-3,91	84	87,36	104

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 ini adalah sebesar 87,36 atau tercapai 109,20% dari target sebesar 80, sebagaimana Surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan berdasarkan pemantauan pada aplikasi IP ASN KKP periode Desember 2025 yang dapat diakses pada tautan <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn> sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



IP ASN 2025												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Silakan ketik Nama Unit Kerj Cari												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	46	23.04	92.16 %	28.86	72.15 %	24.67	82.23 %	5	100 %	81.58	TINGGI
2	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	27	22.78	91.12 %	33.62	84.05 %	25	83.33 %	5	100 %	86.4	TINGGI
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	31	23.55	94.2 %	32.1	80.25 %	25	83.33 %	5	100 %	85.65	TINGGI
4	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	44	23.52	94.08 %	28.93	72.32 %	25.91	86.37 %	5	100 %	83.36	TINGGI
5	DIREKTORAT JASA BAHARI	30	23.67	94.68 %	30	75 %	26.33	87.77 %	5	100 %	85	TINGGI
6	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	38	23.03	92.12 %	31.36	78.4 %	26.45	88.17 %	5	100 %	85.83	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	57	21.75	87 %	35.18	87.95 %	27.11	90.37 %	5	100 %	89.04	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	21.93	87.72 %	34.73	86.83 %	24.77	82.57 %	5	100 %	86.43	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	50	22.5	90 %	34.52	86.3 %	27.8	92.67 %	5	100 %	89.82	TINGGI
10	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	49	21.94	87.76 %	34.5	86.25 %	25.41	84.7 %	5	100 %	86.85	TINGGI
11	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	28	21.79	87.16 %	34.02	85.05 %	25.18	83.93 %	5	100 %	85.98	TINGGI
12	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	47	21.49	85.96 %	34.68	86.7 %	26.28	87.6 %	4.91	98.2 %	87.36	TINGGI
13	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	22.18	88.72 %	37.05	92.62 %	27.82	92.73 %	5	100 %	92.05	SANGAT TINGGI
14	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	50	22.5	90 %	33.42	83.55 %	27.5	91.67 %	5	100 %	88.42	TINGGI

Gambar 46 Tampilan Nilai IP ASN BKKPN Kupang pada Aplikasi IP ASN SDMAO KKP

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 adalah sebesar 91,27, sedangkan capaian tahun 2025 adalah 87,36, apabila dibandingkan maka capaian tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 3,91

atau 28%, namun demikian capaian tahun 2024 masih tercapai diatas target. Adapun perbandingan aspek penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 40 Perbandingan Capaian Nilai IP ASN BKKPN Kupang Tahun 2024 dan 2025

No	Aspek Penilaian	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kualifikasi	20,65	21,49
2	Kompetensi	40,00	34,68
3	Kinerja	25,61	26,28
4	Disiplin	5,00	4,91
Indeks		91,27	87,36

Terdapat penurunan nilai pada aspek kompetensi dan disiplin masing-masing sebesar 5,32 dan 0,09. Penurunan pada aspek kompetensi disebabkan oleh adanya penambahan pegawai PPPK pada tahun 2025 yang belum didukung dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis, sehingga pegawai belum optimal dalam meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Sementara itu, penurunan pada aspek disiplin disebabkan oleh adanya satu pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 84 pada tahun 2029, sedangkan capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 87,36 atau tercapai 104% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai IP ASN tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

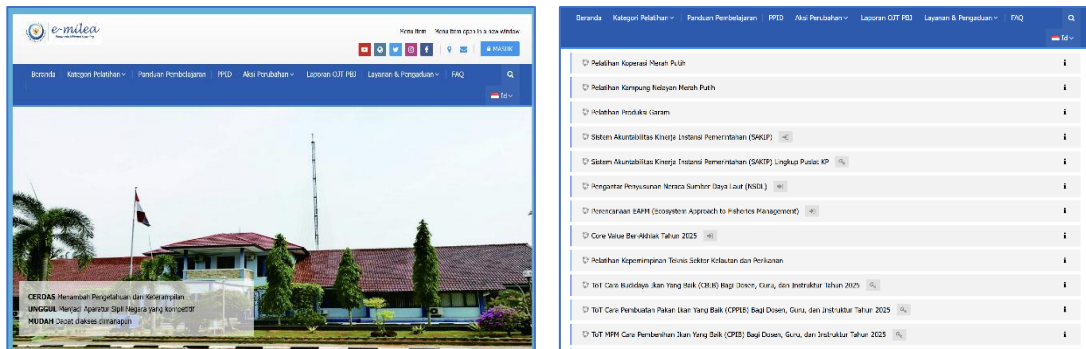
Tabel 41 Perbandingan Capaian IP ASN Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru	Perbedaan
Target Capaian	80	80	-
Aspek Kualifikasi	21,49	22,18	-0,69
Aspek Kompetensi	34,68	37,05	-2,37
Aspek Kinerja	26,28	27,82	-1,54
Aspek Disiplin	4,91	5,00	-0,09
Nilai IP ASN 2025	87,36	92,05	-4,69
Persentase Capaian	109,20%	115,06%	-5,86%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2025 mencapai 87,36 atau 109,20% dari target, namun masih lebih rendah dibandingkan LKKPN Pekanbaru yang mencapai 92,05 atau 115,06% dari target. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh nilai seluruh aspek penilaian BKKPN Kupang yang relatif lebih rendah, dengan selisih terbesar pada aspek kompetensi sebesar 2,37. Kondisi ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai PPPK yang cukup signifikan di BKKPN Kupang, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan dan peningkatan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebagian besar pegawai BKKPN Kupang telah memenuhi seluruh komponen penilaian IP ASN khususnya peningkatan pada komponen kualifikasi yaitu beberapa pegawai telah menyelesaikan studi lanjutnya dan komponen kinerja dimana ekspektasi pimpinan telah meningkat terhadap hasil kerja pegawai, pemenuhan komponen kompetensi dengan mengikuti diklat 20 jam pelajaran yang dilakukan secara daring maupun luring dan telah mengikuti berbagai seminar. Adanya fasilitasi diklat *elearning* melalui program emilea yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi dan kegiatan pengembangan kompetensi oleh internal BKKPN Kupang seperti bimbingan teknis selam juga turut berkontribusi dalam pemenuhan komponen kompetensi indeks profesionalitas.



Gambar 47 electronic millennial learning KKP

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang tahun 2025 yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penghitungan Indeks profesionalitas serta keikutsertaan para pegawai dalam pemenuhan aspek kompetensi melalui diklat 20 JP dan seminar yang dilakukan secara daring, baik melalui platform <https://elearning.kkp.go.id/> yang disediakan oleh KKP, maupun platform pelatihan online lainnya yang menunjang peningkatan kompetensi pegawai. Selain itu juga terdapat efisiensi anggaran kegiatan pendukung, Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 42 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan Manajemen SDM (RM)	90.810.000	87.762.582	3.047.418	3,36%
JUMLAH		90.810.000	87.762.582	3.047.418	3,36%

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKKPN Kupang adalah sebesar Rp90.810.000 yang bersumber dari Rupiah Murni. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp87.762.582, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.047.418 atau 3,36%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan tugas belajar
- Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Internal
- Pelatihan online berupa seminar dan/atau diklat 20 JP.
- Peningkatan kinerja individu pegawai dengan pembagian peran hasil.
- Pemantauan atas kedisiplinan pegawai melalui money kode etik pegawai.



Gambar 48 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pegawai BKKPN Kupang 2025

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai 2026.

3.5.6 IKU 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV tahun 2024 sampai dengan Triwulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BKKPN Kupang.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BKKPN Kupang dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang dikali 100. Dengan catatan (1) Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100, (2) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Target indikator kinerja manajerial Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 95%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 43 Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKU 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
100	100	100	100	95	98,40	103,58	-1,6	84	98,40	117,14

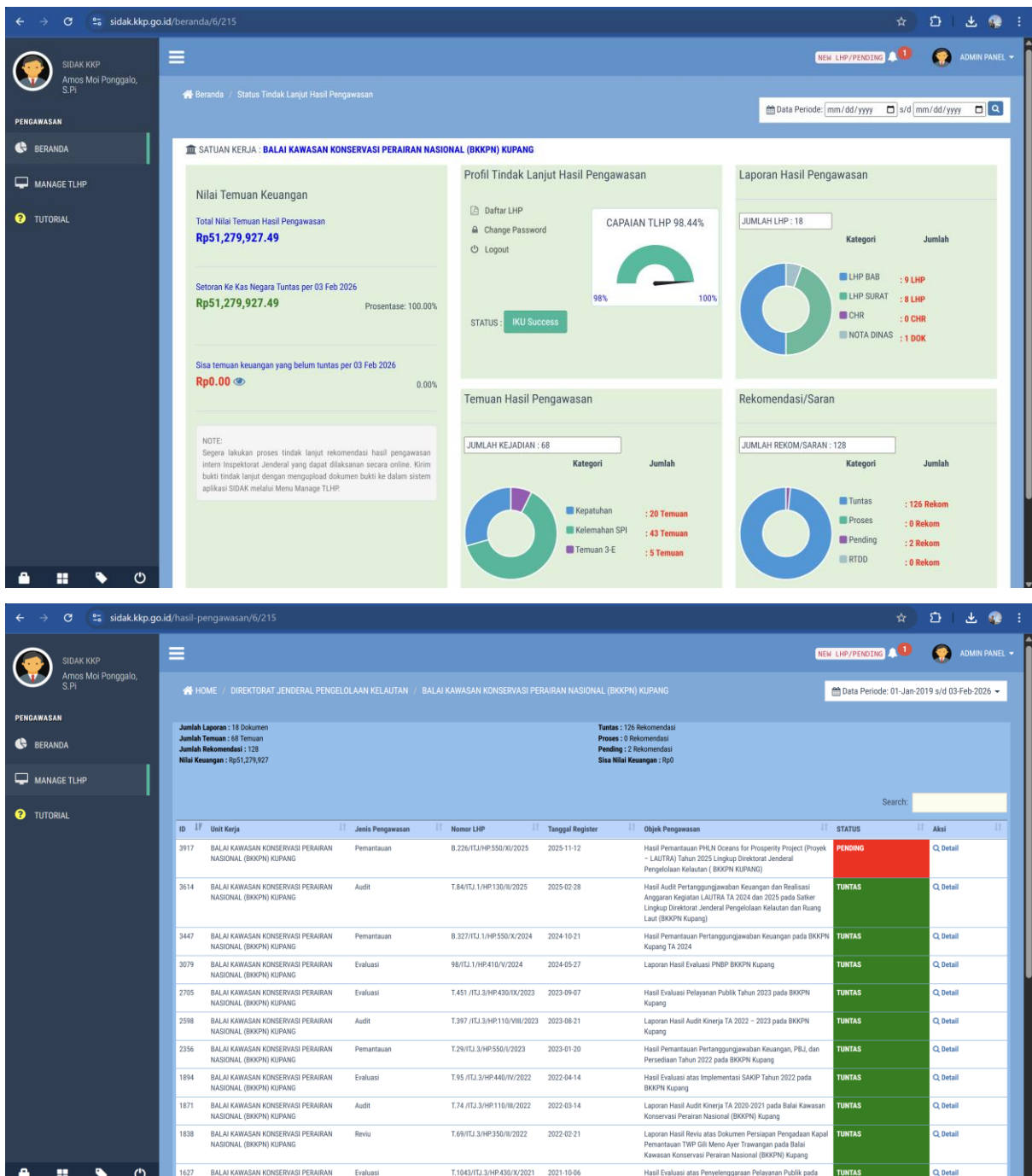
Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar 98,4% dari target 95% atau tercapai 103,58%, sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang



Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025. Detail pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada aplikasi SIDAK KKP.



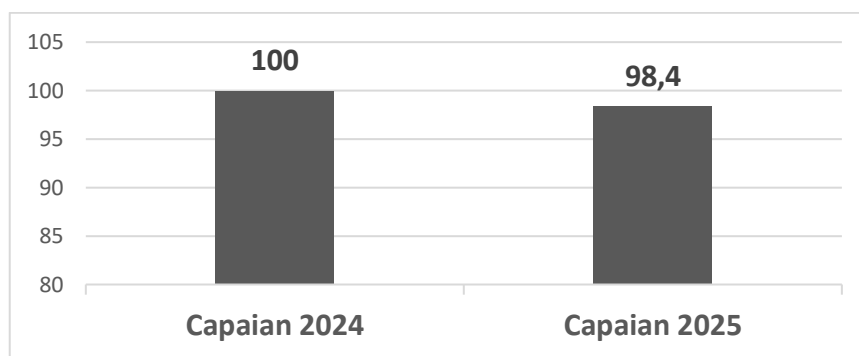
Gambar 49 Detail pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 pada aplikasi SIDAK KKP

Hingga akhir periode penilaian, masih terdapat 1 (satu) rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas. Kondisi ini disebabkan oleh diterbitkannya rekomendasi tersebut mendekati akhir

tahun anggaran, sehingga satuan kerja tidak memiliki waktu yang memadai untuk menyelesaikan tindak lanjut sesuai ketentuan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, sedangkan capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 98,40%, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka capaian tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Perbandingan capaian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 50 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang pada Tahun 2024 dan 2025

Nilai capaian rekomendasi hasil pengawasan yang telah tuntas mengalami sedikit penurunan sebesar 1,6%, hal ini dikarenakan pada tahun 2025 masih terdapat 1 (satu) rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas hingga akhir periode penilaian.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 83 pada tahun 2029, sedangkan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 98,4 atau tercapai 117,14% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 44 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	95	95
Nilai Rekomendasi Pengawasan 2025	98,4	100
Persentase Capaian	103,58%	105,26%

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 98,4% atau tercapai 103,58% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 100% atau tercapai 105,26% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari LKKPN Pekanbaru. hal ini dikarenakan pada BKKPN Kupang masih terdapat 1 (satu) rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas hingga akhir periode penilaian.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang melakukan pemantauan secara rutin pada aplikasi SIDAK KKP setiap bulan dan menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan biaya, karena tidak tersedia alokasi anggaran khusus dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BKKPN



Kupang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan pada tahun 2025 ini.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja pada tahun 2025 adalah

- Pelaksanaan Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BKKPN Kupang) oleh Itjen KKP tanggal 20-31 Januari 2025 dan Penyampaian dokumen tindak lanjut hasil audit.
- Pelaksanaan Pemantauan PHLN Oceans for Prosperity Project (Proyek – LAUTRA) Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (BKKPN Kupang) oleh Itjen KKP tanggal 23-25 September 2025

ID	Judul Temuan	% Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
12595	Terdapat kegiatan senilai Rp142.661.778,00 yang tidak sesuai dengan dokumen Annual Work Plan (AWP)	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
12596	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Senilai Rp580.000,00	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

Gambar 51 Penyampaian Tindak Lanjut melalui SIDAK

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah melakukan tindak lanjut secara tuntas terhadap hasil pemantauan periode sebelumnya yang belum sepenuhnya diselesaikan, guna memastikan perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

3.5.7 IKU 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang

Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BKKPN Kupang Tahun 2024. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan temuan LHP BPK BKKPN Kupang yang diselesaikan dibagi jumlah temuan dalam LHP BPK BKKPN Kupang dikali 100%. Dengan catatan Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target indikator kinerja manajerial Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 100%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 45 Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKU 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
100	100	100	100	100	100	100	0	-	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target 100%, sebagaimana Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 100% menunjukkan konsistensi kinerja pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tidak adanya peningkatan maupun penurunan capaian disebabkan seluruh temuan LHP BPK pada kedua tahun tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas sesuai rekomendasi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Kelautan (%), sedangkan pada Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%), sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra 2025-2029.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 46 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	100	100
Persentase Penyelesaian Temuan BPK 2025	100	100
Persentase Capaian	100%	100%

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru pada tahun 2025 masing-masing sebesar 100%. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan capaian karena keduanya menunjukkan hasil yang sama.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah bahwa BKKPN Kupang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan BKKPN Kupang juga telah memenuhi standar pelaporan dan dilaksanakan oleh pegawai yang telah berkompeten.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini tercermin dari penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN yang dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya. Laporan keuangan dan laporan BMN disusun oleh pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir dan Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, sementara pengelolaan dan pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, efisiensi juga terlihat dari aspek biaya, yang perhitungannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 47 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BKKPN Kupang tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan BMN (RM)	33.070.000	31.721.964	1.348.036	4,08%
2	Layanan Manajemen Keuangan (RM)	40.184.000	37.832.785	2.351.215	5,85%
JUMLAH		73.254.000	69.554.749	3.699.251	5,05%

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BKKPN Kupang adalah sebesar Rp73.254.000, yang bersumber dari Rupiah Murni. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp69.554.749, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.699.251 atau 5,05%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja pada tahun 2025 adalah:

- Penyusunan laporan keuangan dan Laporan BMN BKKPN Kupang TA 2024
- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2024 (14-16 Januari 2025)
- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester 1 Tahun 2025 (8-10 Juli 2025)
- Penyusunan dan Penelaahan RKBMN 2027 (2-4 September 2025)



Gambar 52 Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2024



Gambar 53 Penyusunan dan Penelaahan RKBMN 2027



Gambar 54 Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Semester 1 Tahun 2025

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna mempertahankan capaian kinerja adalah dengan pemantauan rutin dan berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi BPK.

3.5.8 IKU 12. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Standar penilaian antara lain: Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48, Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit, Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 19,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 3,5, dan Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 15,75.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Dengan catatan Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Target indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 85. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 48 Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKU 12. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
86,6	93,03	93,03	93,29	85,00	89,52	105,32	-3,77	-	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 89,52 atau tercapai 105,32% dari target sebesar 85, sesuai dengan surat dari Inspektur Jenderal KKP

nomor B.394/ITJ.5/HP.550/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas terhadap Unit Kerja yang Diusulkan kepada Tim Penilai Nasional Tahun 2025 pada BKKPN Kupang secara Daring (Online). Detail capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Detail Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang 2025

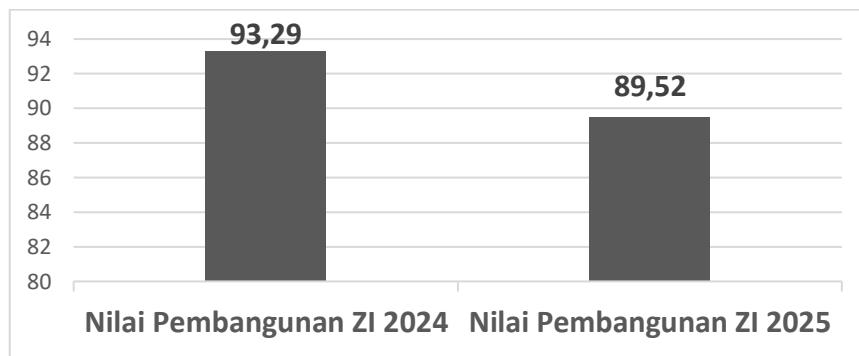
Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai
A. Pengungkit	60			
1. Manajemen Perubahan	8	3,17	4,00	7,17
2. Penataan Tata Laksana	7	3,04	2,84	5,88
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10	3,80	4,25	8,05
4. Penguatan Akuntabilitas	10	4,58	4,51	9,09
5. Penguatan Pengawasan	15	5,09	6,25	11,34
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	4,83	5,00	9,83
B. Hasil	40			
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,5			21,63
2. Pelayanan Publik yang Prima	17,5			16,63
Total Nilai				89,52

Adapun pada tahun 2025, BKKPN Kupang telah diusulkan sebagai Unit kerja berpredikat WBBM Nasional dan telah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Tim Penilai Nasional, namun demikian pada tahapan desk evaluasi dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBBM Nasional.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BKKPN Kupang pada tahun 2024 sebesar 93,29, sedangkan capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang pada tahun 2025 sebesar 89,52. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan periode yang sama, capaian tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,77 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Penurunan capaian tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai pada Area Perubahan

Penguatan Pengawasan, yang pada tahun 2025 hanya memperoleh nilai 11,34 atau 75,61% dari nilai maksimal pada area tersebut.



Gambar 55 Perbandingan Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 dan 2025

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Terdapat perbedaan indikator kinerja dimana pada Renstra DJPK Tahun 2025-2029 merupakan indikator kinerja Nilai pembangunan integritas DJPK (Nilai), sedangkan pada Perjanjian Kinerja BKKPN Kupang merupakan indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai), sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra/Matriks Pendanaan 2025-2029.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 50 Perbandingan Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM Nasional Tahun 2025

Area Perubahan	Nilai WBBM	Nilai WBBM	Selisih
	BKKPN Kupang 2025	LKKPN Pekanbaru 2025	
A. Pengungkit			
1. Manajemen Perubahan	7,17	7,59	-0,42
2. Penataan Tata Laksana	5,88	5,84	0,04
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	8,05	8,77	-0,72
4. Penguatan Akuntabilitas	9,09	9,69	-0,60
5. Penguatan Pengawasan	11,34	13,25	-1,91
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9,83	8,83	1,00
B. Hasil			
1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	21,63	20,90	0,73
2. Pelayanan Publik yang Prima	16,63	17,15	-0,52
Total Nilai	89,52	92,01	-2,49
Target Capaian	85,00	85,00	
Persentase Capaian	105,32%	108,25%	

Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 89,52 atau tercapai 105,32% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 92,01 atau tercapai 108,25% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari LKKPN Pekanbaru. Perbedaan capaian tersebut terutama disebabkan oleh kelemahan BKKPN Kupang pada Area Perubahan Pengungkit, khususnya Penguatan Pengawasan, dimana BKKPN Kupang hanya memperoleh nilai 11,34, yang antara lain dipengaruhi oleh pengelolaan risiko yang belum optimal.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas antara lain adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan LEBE BAE, peningkatan integritas, kualitas pelayanan, dan kinerja, serta penciptaan inovasi yang berdampak signifikan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh pemantauan berkala secara mandiri terhadap pembangunan Zona Integritas serta pemenuhan dokumen pengungkit dan reform yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya karena seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas. Dan seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan integritas ASN, selain itu terdapat efisiensi terkait biaya, Adapun perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 51 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Pelayanan Publik (RM)	102.950.000	101.175.428	1.774.572	1,72%
JUMLAH		102.950.000	101.175.428	1.774.572	1,72%

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang adalah sebesar Rp102.950.000, yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp101.175.428, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.774.572 atau 1,72%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaianb target indikator kinerja pada tahun 2025 adalah:

- Pembentukan Tim Pembangunan ZI BKKPN Kupang Tahun 2025;
- Penyusunan Rencana Aksi PZI tahun 2025;
- Pemantauan Pembangunan ZI tanggal 25 Februari - 3 Maret 2025;
- Pemantauan Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas pada bulan Mei 2025 oleh Inspektorat Jenderal KKP;
- Publikasi Pembangunan ZI melalui berbagai media.
- Monitoring berkala pemenuhan dokumen pembangunan ZI menuju WBBM setiap bulan.



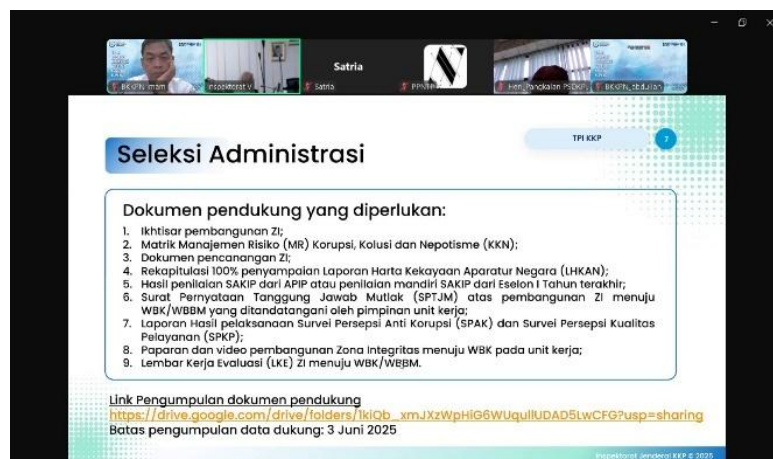
Gambar 56 Sharing Session PZI Poltek KP Kupang



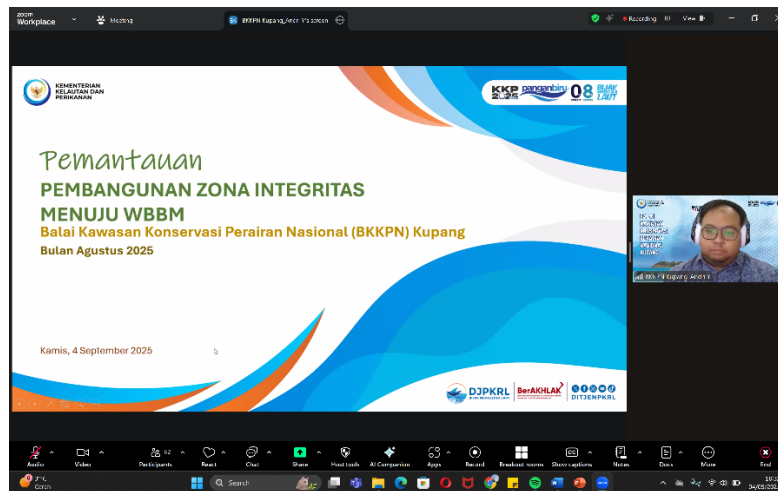
Gambar 57 Pemantauan Pembangunan ZI Oleh Tim Penilai Internal KKP



Gambar 58 Internalisasi Pembangunan ZI bersama Kejati NTT



Gambar 59 Pemantauan Tindak Lanjut Pembangunan ZI



Gambar 60 Monitoring berkala pemenuhan dokumen pembangunan ZI menuju WBBM setiap bulan

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2026.

3.5.9 IKU 13. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang adalah sebagai berikut :

1. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

- AA: Sangat Memuaskan = >90-100
- A: Memuaskan = >80-90
- BB: Sangat Baik = >70-80
- B: Baik = >60-70
- CC: Cuku = >50-60
- C: Kurang = >30-50
- D: Sangat Kurang = 0-30

Target indikator kinerja manajerial Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 80. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52 Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang											
IKU 13. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%	
-	-	-	81,11	70	80,50	115	-0,61	84	80,5	95,83	

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar 80,5 dengan kategori A (Memuaskan) atau tercapai 115% dari target 70, sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025.

Tabel. Rekapitulasi Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT SUB - ASPEK	NILAI SUB - ASPEK	BOBOT ASPEK	NILAI AKHIR
1	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	2.200,00			88,57	0,70	62,00
	1.1 SUBASPEK PENCIPTAAN ARSIP	700,00	650,00	0,20	18,57		
	1.2 SUBASPEK PENGGUNAAN ARSIP	200,00	200,00	0,20	20,00		
	1.3 SUBASPEK PEMELIHARAAN ARSIP	1.100,00	1.100,00	0,35	35,00		
	1.4 SUBASPEK PENYUSUTAN ARSIP	200,00	120,00	0,25	15,00		
2	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	500,00			61,67	0,30	18,50
	2.1 SUBASPEK SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	300,00	70,00	0,50	11,67		
	2.2 SUBASPEK PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	200,00	200,00	0,50	50,00		
TOTAL NILAI STANDAR/ NILAI/ BOBOT ASPEK/ NILAI AKHIR						1,00	80,50
KATEGORI NILAI AKHIR						A (MEMUASKAN)	

Gambar 61 Hasil Nilai Audit Kearsipan Internal BKKPN Kupang 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian indikator kinerja manajerial Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 adalah sebesar 81,11 dan capaian tahun 2025 adalah sebesar 80,50, jika dibandingkan maka capaian tahun 2025 lebih rendah sebesar 0,61 dari capaian tahun 2024. Adapun

perbandingan rincian capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 53 Perbandingan Capaian Nilai Kearsipan Tahun 2024 dan 2025

No	Aspek	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis	48,08	62,00
2	Aspek Sumber Daya Kearsipan	33,04	18,50
Nilai Akhir		81,11	80,50

Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan nilai Pengawasan Kearsipan Internal dimana pada aspek pengelolaan arsip dinamis mengalami kenaikan nilai sebesar 13,92, sedangkan pada aspek sumber daya kearsipan mengalami penurunan nilai sebesar 14,54.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Pengelolaan Kelautan di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 84 pada tahun 2029, sedangkan capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 80,50 atau tercapai 95,83% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 54 Perbandingan Capaian Nilai Kearsipan Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	70	80
Nilai Kearsipan 2025	80,50	84,90
Persentase capaian	115%	106,13%

Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 80,50 atau tercapai 115% dari target, sedangkan capaian LKKPN Pekanbaru adalah sebesar 84,90 atau tercapai 106,13% dari target, sehingga apabila dibandingkan capaian kinerjanya, maka capaian BKKPN Kupang lebih rendah dari LKKPN Pekanbaru. Hal ini dikarenakan di BKKPN Kupang belum tersedia SDM Kearsipan yang mempengaruhi nilai secara keseluruhan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Upaya yang dilakukan BKKPN Kupang dalam mencapai keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan menetapkan pengelola arsip di lingkup BKKPN Kupang serta melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan yang berlaku, sehingga terwujud tertib arsip, tersedianya arsip yang autentik dan akuntabel, serta meningkatnya efektivitas layanan administrasi dan pengambilan keputusan.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya SDM dengan jabatan fungsional kearsipan di lingkungan BKKPN Kupang, sehingga pelaksanaan pengelolaan arsip masih dilakukan oleh pegawai yang merangkap tugas lain dan memerlukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

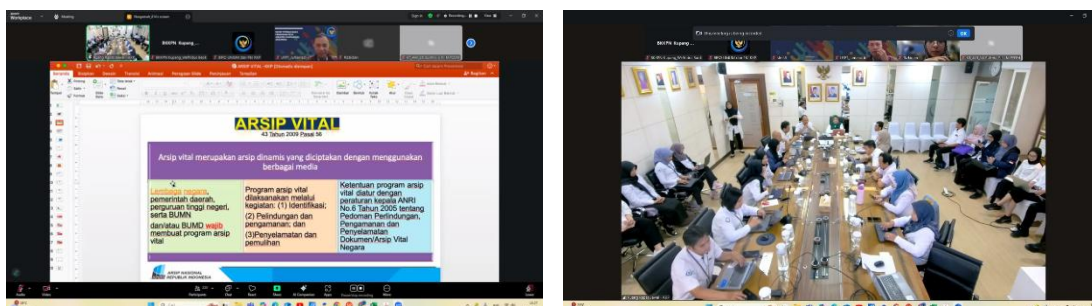
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan ini, dimana BKKPN Kupang memaksimalkan SDM yang tersedia dengan menugaskan pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis kearsipan, meskipun belum tersedia SDM dengan jabatan fungsional kearsipan.

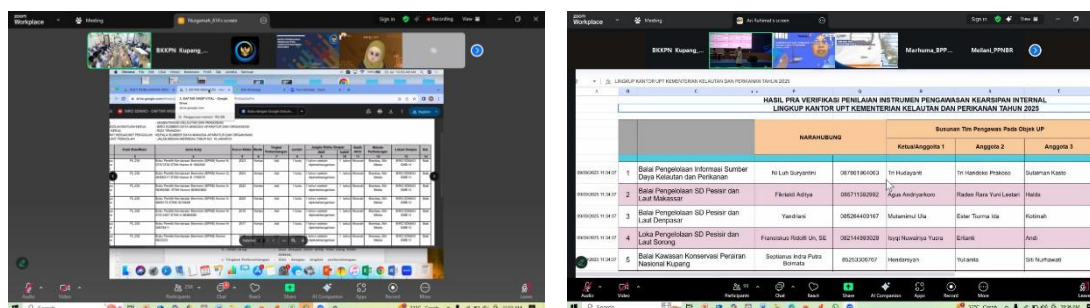
7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaianb target indikator kinerja pada tahun 2025 adalah:

- Penetapan Tim Pengelola Arsip BKKPN Kupang
- Pengelolaan Arsip Dinamis BKKPN Kupang tahun 2025
- Audit pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang KKP Tahun 2025



Gambar 62 Internalisasi Instrumen dan Identifikasi Bukti Dukung pada Pengawasan Internal Kearsipan



Gambar 63 Kegiatan Audit Kearsipan Internal Lingkup KKP Tahun 2025

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan mengusulkan penyediaan SDM Kearsipan, mengikuti sertifikasi SDM kearsipan dan melakukan penyusutan arsip kantor.

3.5.10 IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target indikator kinerja manajerial Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 76%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

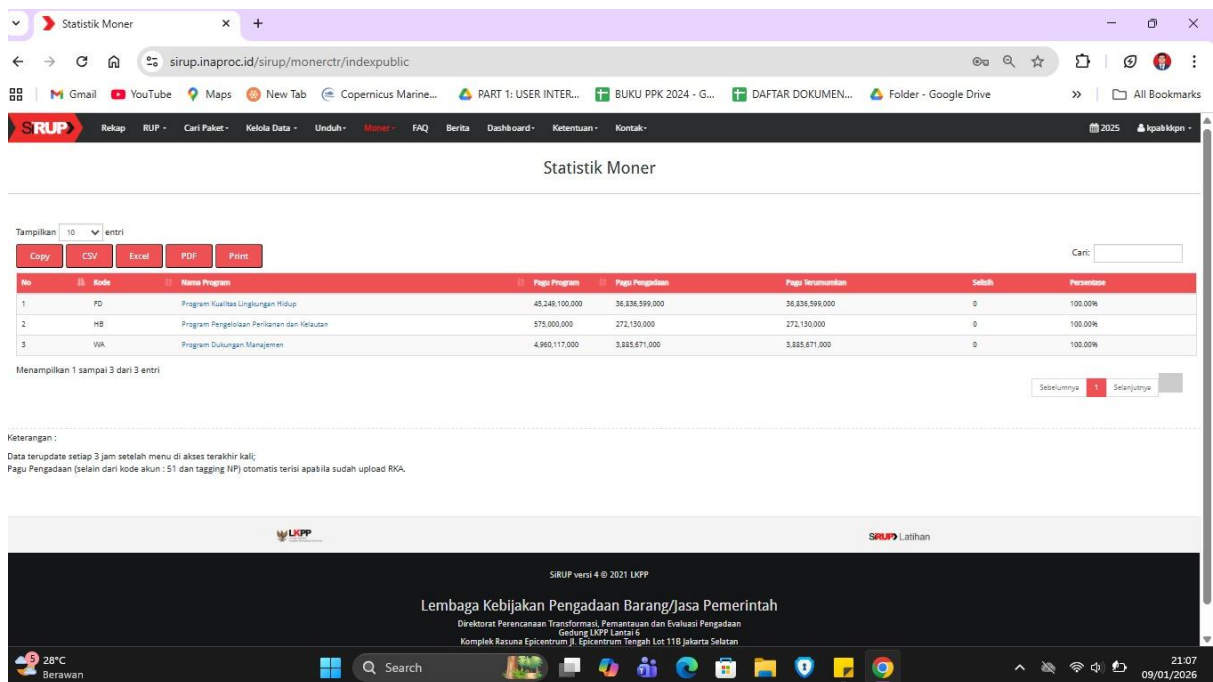
Tabel 55 Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang											
IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang											
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029			
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%	
-	-	-	-	76	100	131,58 (120)	-	80	100	125	

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 76% atau tercapai 131,58% (kinerjaku 120%), sesuai dengan nota dinas dari Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.



Statistik Moner

Tampilkan 10 entri

Copy CSV Excel PDF Print

Cari:

No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terpenuhi	Selisih	Persentase
1	PD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	45.249.100.000	36.836.599.000	36.836.599.000	0	100.00%
2	HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	575.000.000	272.130.000	272.130.000	0	100.00%
3	WA	Program Dukungan Manajemen	4.960.117.000	3.885.671.000	3.885.671.000	0	100.00%

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Keterangan:
Data terupdate setiap 3 jam setelah menu di akses terakhir kali;
Pagu Pengadaan (selain dari kode akun : 51 dan tagging NP) otomatis terisi apabila sudah upload RKA.

SIRUP versi 4 © 2021 LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Perencanaan Transformasi, Kemantapan dan Evaluasi Pengadaan
Gedung LKPP Lantai 6
Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan

28°C Berawan 21:07 09/01/2026

Gambar 64 Tampilan Persentase Rencana Umum Pengadaan BKKPN Kupang tahun 2025 di aplikasi SIRUP

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Pengelolaan Kelautan

di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 80 pada tahun 2029, sedangkan capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar 100 atau tercapai 125% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 56 Perbandingan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	76	76
Persentase Penyelesaian Temuan BPK 2025	100	100
Persentase Capaian	131,58%	131,58%

Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru pada tahun 2025 masing-masing sebesar 100%. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan capaian karena keduanya menunjukkan hasil yang sama.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya komitmen pimpinan dalam memastikan pengumuman paket pengadaan barang/jasa pada platform SIRUP serta kinerja Tim PBJ yang secara konsisten melakukan pembaruan pengumuman pada platform SIRUP apabila terdapat perubahan pagu anggaran Tahun 2025.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja ini tercermin pengelolaan dan pelaksanaan PBJ yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, efisiensi juga terlihat dari aspek biaya, yang perhitungannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 57 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Nasional Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan Rumah Tangga (RM)	29.270.000	29.096.760	173.240	0,59%
JUMLAH		29.270.000	29.096.760	173.240	0,59%

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp29.270.000, yang bersumber dari Rupiah Murni. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp29.096.760, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp173.240 atau 0,59%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan pendukung capaian yaitu pengumuman data paket pengadaan barang jasa pada aplikasi SIRUP.



The screenshot displays the SIRUP web application interface. The top navigation bar includes links for 'Rekap', 'RUP', 'Cari Paket', 'Kelola Data', 'Unduh', 'Moner', 'FAQ', 'Berita', 'Dashboard', 'Ketentuan', and 'Kontak'. The main content area shows a table of RUP packages with columns for 'No', 'Nama Kegiatan', 'Nama Paket', 'Pagu (Rp.)', 'Waktu Pemilihan', 'Sumber Dana', and 'Actions'. The table lists five packages related to marine conservation and management. Below the table, there is a 'Statistik Moner' section showing a summary of the packages, including columns for 'No', 'Kode', 'Nama Program', 'Pagu Program', 'Pagu Pengadaan', 'Pagu Terumumkan', 'Selisih', and 'Persentase'.

No	Nama Kegiatan	Nama Paket	Pagu (Rp.)	Waktu Pemilihan	Sumber Dana	A	FD	U	Hapus	Actions
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan,	Masterplan Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu Integrasi	1.514.851.000	April 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	Refresh
2	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan,	Kajian Dokumen Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Sawu Integrasi	1.520.000.000	September 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	Refresh
3	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan,	Paket Meeting Fullboard Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Integrasi	223.360.000	January 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	Refresh
4	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan,	Pengadaan Jasa Event Organizer Technical Meeting Penyediaan Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Integrasi	200.000.000	February 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	Refresh
5	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan,	Pengadaan Sarana Pemantauan Target Konservasi Integrasi	2.940.031.000	March 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	Refresh
6	Pengelolaan	Belanja jasa lainnya Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan KK Ken. Padatain Integrasi	438.940.000	January 2025	APBN	☒	☒	☒	☐	Refresh

No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Persentase
1	FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	40,202,000,000	30,637,900,000	30,637,900,000	0	100.00%
2	HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	575,000,000	152,970,000	152,970,000	0	100.00%
3	WA	Program Dukungan Manajemen	4,969,447,000	3,457,077,000	3,457,077,000	0	100.00%

Gambar 65 Pengumuman Rencana Umum PBJ pada SIRUP

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna mempertahankan capaian kinerja adalah dengan segera mengumumkan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP untuk tahun anggaran 2026.

3.5.11 IKU 15. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi.

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (Self Assesment Questionnaire) yang disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat oleh Tim Penilai Internal KKP.

Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %.

Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa yaitu

- skor 90-100 predikat informatif;
- skor 80-89,9 predikat menuju informatif;

- skor 60-79,9 predikat cukup informatif;
- skor 40-59,9 predikat kurang informatif; dan
- skor < 39,9 predikat tidak informatif.

Target indikator kinerja manajerial Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 91. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

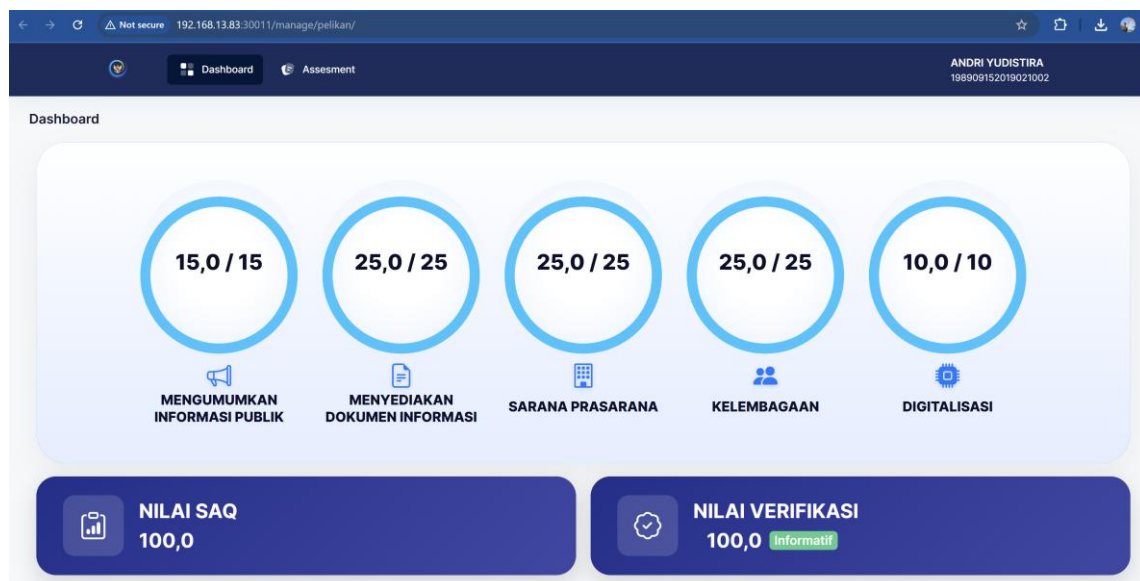
Tabel 58 Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang										
IKU 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target 2029	Capaian sd 2025	%
-	-	-	-	91	100	109,89	-	95	100	105,26

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang adalah sebesar 100 dari target 91 atau tercapai 109,89%, sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KKP Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP Tahun 2025.



Gambar 66 Tampilan Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang tahun 2025 pada aplikasi Pelikan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga pada periode saat ini dan periode selanjutnya tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 95 pada tahun 2029, sedangkan capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang di tahun 2025 adalah sebesar 100 atau tercapai 105,26% dari target Renstra.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 59 Perbandingan Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	91	91
Nilai KIP 2025	100	100
Persentase Capaian	109,89%	109,89%

Capaian indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru pada tahun 2025 masing-masing sebesar 100. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan capaian karena keduanya menunjukkan hasil yang sama.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dari indikator kinerja ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam keterbukaan informasi public melalui penyediaan sarana prasarana

yang ramah disabilitas, petugas layanan informasi yang kompeten dan dukungan anggaran khusus PPID

Selain itu Tim PPID juga aktif dalam memutakhirkan data dan informasi publik serta melakukan layanan informasi publik sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam melaksanakan kegiatan melibatkan pegawai yang kompeten dan telah mengikuti pelatihan pelayanan publik, penugasan tim PPID melalui Surat Tugas juga efektif dilaksanakan untuk membantu pelaksanaan keterbukaan informasi publik hingga tingkat wilayah kerja. Disamping itu terdapat pula efisiensi terkait biaya, perhitungan efisiensi biaya dalam pencapaian indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 60 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BKKPN Kupang

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Layanan Kehumasan (RM)	10.090.000	10.087.520	2.480	0,02%
2	Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan (RM)	20.180.000	17.064.131	3.115.869	15,44%
JUMLAH		30.270.000	27.151.651	3.118.349	10,30%

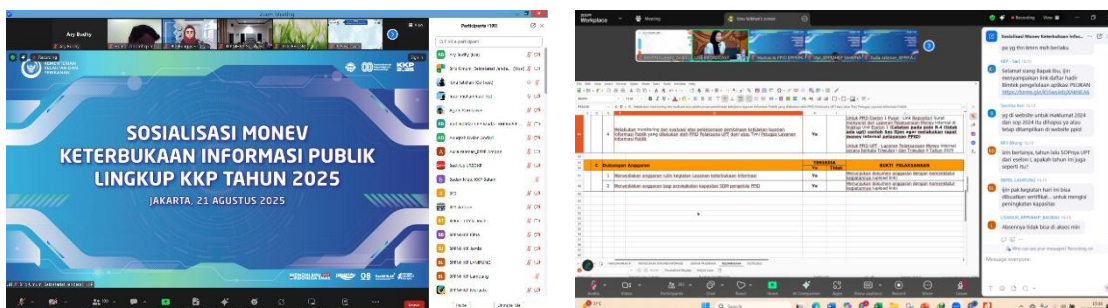
Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp30.270.000, yang bersumber dari Rupiah Murni. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp27.151.651, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.118.349 atau 10,30%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

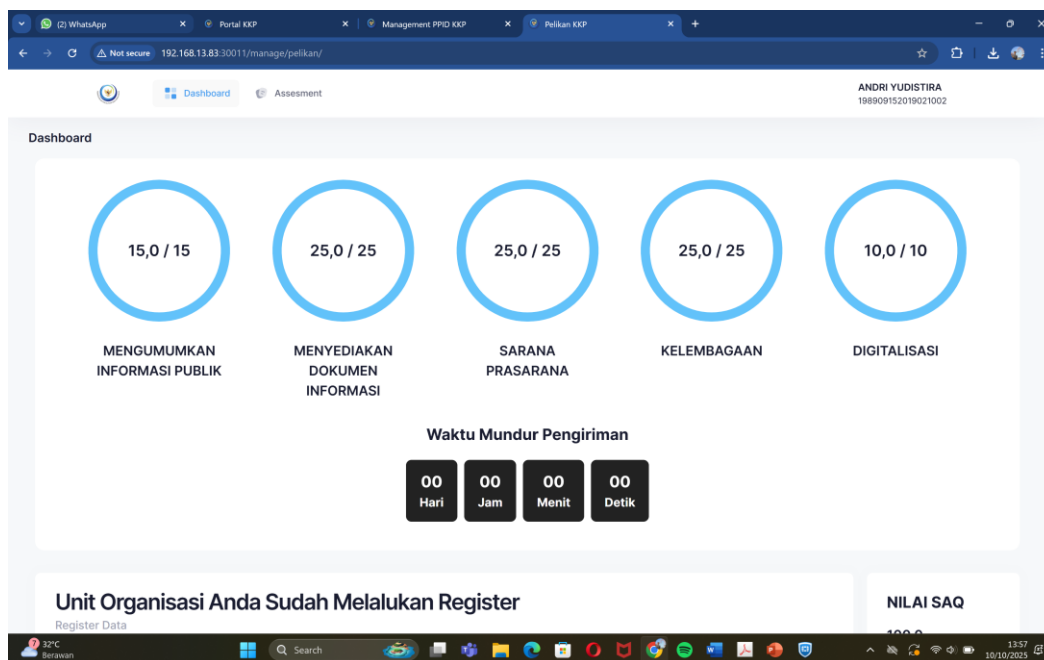
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja pada tahun 2025 adalah:

- Pembentukan Tim PPID Tahun 2025;

- Pemutakhiran, penyediaan dan pengumuman daftar informasi publik tahun 2025;
- Sosialisasi Monev KIP KKP Tahun 2025;
- Pengisian Kuesioner & Unggah Data Dukung (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Aplikasi PELIKAN.



Gambar 67 Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik KKP Tahun 2025



Gambar 68 Pengisian Kuesioner & Unggah Data Dukung (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang tahun 2025 pada Aplikasi PELIKAN telah 100%

8. Rencana Aksi

Rencana Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja adalah dengan membentuk Tim PPID 2026 dan melakukan pemutakhiran daftar informasi publik.

3.6 Sasaran Kegiatan 6. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.6.1 IKU 16. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (Penilaian/Verifikasi dan Sosialisasi) dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 Dokumen. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 61 Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun 2025

SK 6. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
IKU 16. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang										
Capaian Tahun Sebelumnya				Tahun 2025				Renstra DJPRL 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	% Capaian (Kinerjaku)	Kenaikan dari tahun sebelumnya	Target sd 2029	Capaian sd 2025	%
-	-	3	3	2	2	100	-1	-	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang adalah sebanyak 2 Dokumen atau 100% dari target sebanyak 2 Dokumen. sebagaimana Surat Kepala BKKPN Kupang Kepada Direktur Jenderal PRL Nomor B.2/BKKPN/OT.120/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Verifikasi dan Monitoring/Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Adapun dokumen yang disampaikan yaitu :

a. Laporan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Laporan ini berisi terkait Kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2025 di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dan perairan di sekitarnya. Terdapat 8 Subjek Hukum yang menjadi sasaran pelaksanaan Verifikasi yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur ketiga subjek hukum ini mengajukan dalam proses pengajuan Fasilitas Persetujuan KKPRL bagi masyarakat lokal kegiatan budidaya rumput laut. Selanjutnya Pemerintah Provinsi NTT (kegiatan Dermaga Onan Batu), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (kegiatan Keramba Jaring Apung), PT ASDP Cabang Kupang (kegiatan Dermaga Hansisi), PT. Elisten (kegiatan Keramba Jaring Apung) dan PT TOM (Budidaya Muitiara). Ke 8 subjek hukum ini belum memiliki KKPRL

b. Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Laporan ini berisi terkait Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober di 5 (lima) Kawasan Konservasi wilayah kewenangan BKKPN Kupang yaitu di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Laut Banda, dan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang. Kegiatan penilaian kepatuhan dilakukan terhadap 8 (delapan) subjek hukum yaitu:

- PT Perusahaan Listrik Negara (2 KKPRL di NTT)
- Yayasan Ekosistem Gili Indah (1 KKPRL di NTB)
- Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung (1 KKPRL di NTB)
- PT Bahana Maluku (1 KKPRL di Banda)
- PT Jaya Samudera Siantan (1 KKPRL di Papua Barat Daya)
- Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (2 KKPRL di NTB dan Sulawesi Selatan).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dan capaian tahun 2025 sebanyak 2 dokumen, sehingga apabila dilakukan perbandingan maka capaian tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat penggabungan laporan di tahun 2025 yaitu Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Laporan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Perbandingan capaian dilakukan dengan target di Dokumen Renstra DJPRL Tahun 2025-2029. Namun demikian, indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang tidak dapat dilakukan perbandingan dengan

Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 karena tidak terdapat indikator kinerja yang serupa atau sepadan dalam dokumen tersebut.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Kerja Sejenis)

Dalam mengukur perbandingan capaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun tahun 2025, BKKPN Kupang membandingkan dengan LKKPN Pekanbaru, hal ini dikarenakan adanya kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja yang ditargetkan. Adapun perbandingan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 62 Perbandingan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional Tahun 2025

Uraian	BKKPN Kupang	LKKPN Pekanbaru
Target Capaian	2	2
Laporan Dokumen Operasional Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	2	2
Persentase Capaian	100%	100%

Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut pada lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025 tercatat sebanyak 2 dokumen atau mencapai 100% dari target. Pada periode yang sama, LKKPN Pekanbaru juga mencapai capaian sebanyak 2 dokumen atau 100% dari target. Dengan demikian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut setara dengan capaian kinerja LKKPN Pekanbaru. Hal ini diakibatkan oleh jumlah dan periode pelaporan yang sama.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor Pendukung yang mempengaruhi pencapaian target Adalah pemaksimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penilaian teknis pengajuan KKPR dan pelibatan SDM yang kompeten berada di wilayah kerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dimana dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan pegawai yang telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan efisiensi biaya dari kegiatan yang dilakukan secara daring menggunakan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya yang dapat digunakan. Perhitungan efisiensi biaya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 63 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut pada lingkup BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Uraian Kegiatan (Sumber Dana)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (Rp)	Sisa Pagu/Efisiensi (%)
1	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	268.465.000	42.476.100	225.988.900	84,18%
2	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut (PNBP)	106.535.000	64.936.420	41.598.580	39,05%
JUMLAH		375.000.000	107.412.520	267.587.480	71,36%

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut pada lingkup BKKPN Kupang adalah sebesar Rp375.000.000, yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi pagu anggaran adalah sebesar Rp107.412.520, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp267.587.480 atau 71,36%.

7. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

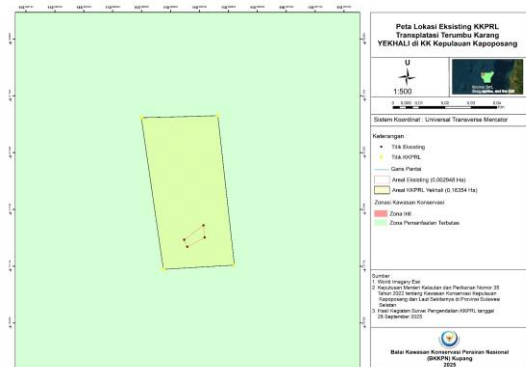
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian target indikator kinerja pada tahun 2025 adalah:

- Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Bagi Pembudidaya Rumput Laut Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu Region Timor (7-9 Agustus 2025)
- Verifikasi/Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut di TNP Laut Sawu Kabupaten Sabu Raijua (8 & 11 Agustus 2025)

- Verifikasi/Penilaian Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Bagi Pembudidaya Rumput Laut Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu Kab. Sumba Timur (26-27 Agustus 2025)
- Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dengan Subjek Hukum PT. PLTU Bolok dan PT. PLTU Timor 1 (26-28 Agustus 2025)
- Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Kawasan Konservasi Gili Matra dengan Subjek Hukum Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung (26-27 Agustus 2025)
- Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Kawasan Konservasi Gili Matra dengan Subjek Hukum Yayasan Ekosistem Gili Indah (28 Agustus 2025)
- Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dengan di Kawasan Konservasi Gili Matra Subjek Hukum YEKHALI (28-30 September 2025)
- Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dengan di Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang Subjek Hukum YEKHALI (28-29 September 2025)



Gambar 69 Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Untuk Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Bagi Pembudidaya Rumput Laut Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu



Gambar 70 Pengendalian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

8. Rencana Aksi

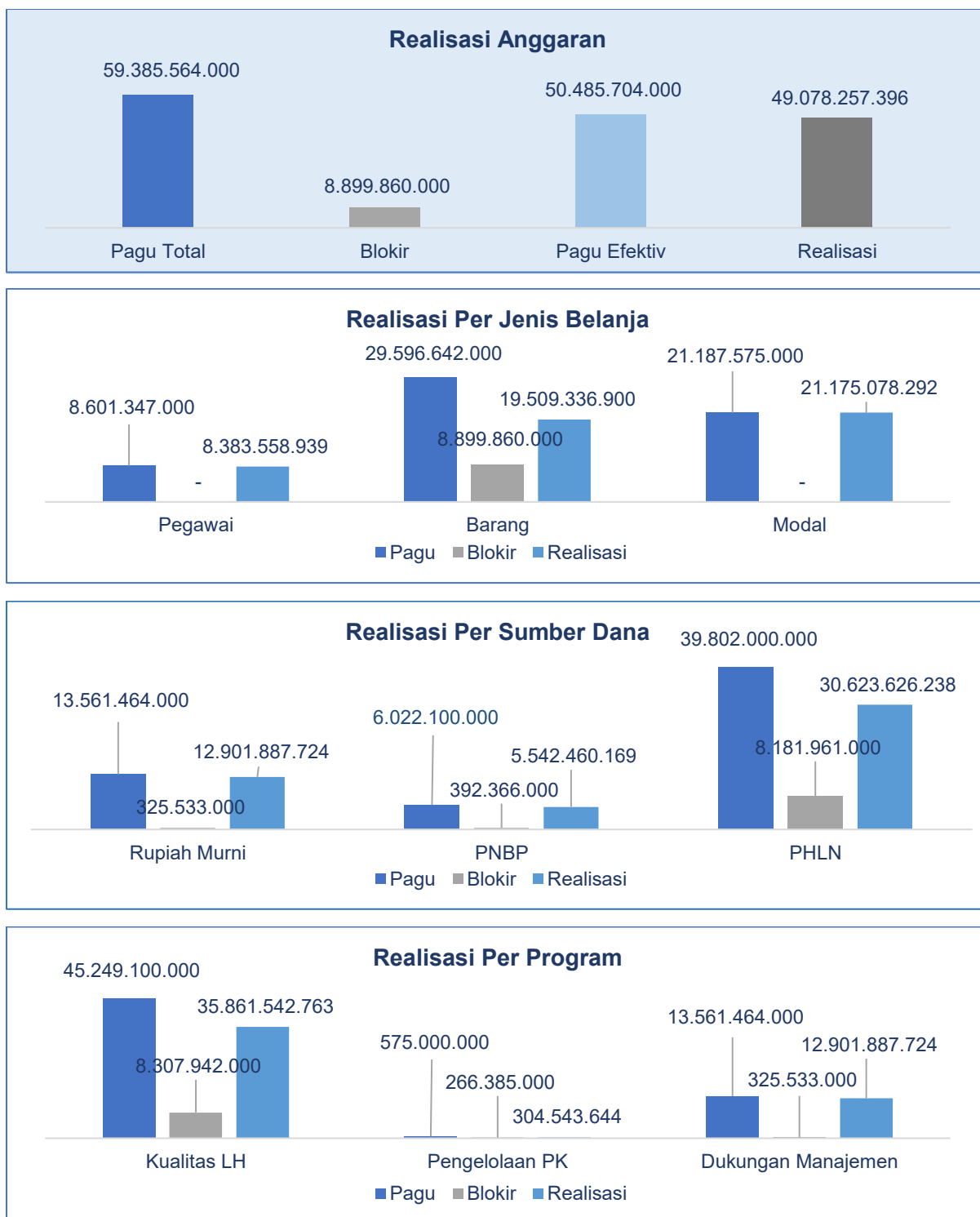
Tidak terdapat rencana kegiatan karena indikator kinerja ini tidak lagi digunakan pada perencanaan kinerja periode berikutnya.

3.7 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan data dari aplikasi OM-SPAN, alokasi pagu anggaran belanja BKKPN Kupang digunakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2025, alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah sebesar Rp 59.010.564.000 dan dengan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut adalah sebesar Rp 375.000.000 sehingga total alokasi anggaran dari kedua perjanjian kinerja tersebut adalah sebesar Rp 59.385.564.000 yang termuat dalam 1 DIPA BKKPN Kupang tahun 2025, alokasi anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan Oceans for Prosperity Project-LAUTRA. namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp 8.899.860.000 sehingga pagu anggaran efektif yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja adalah sebesar Rp 50.485.704.000. Realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp 49.078.257.396 atau 82,64% dari pagu anggaran total. Realisasi anggaran BKKPN Kupang tahun 2025 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 64 Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Tahun 2025

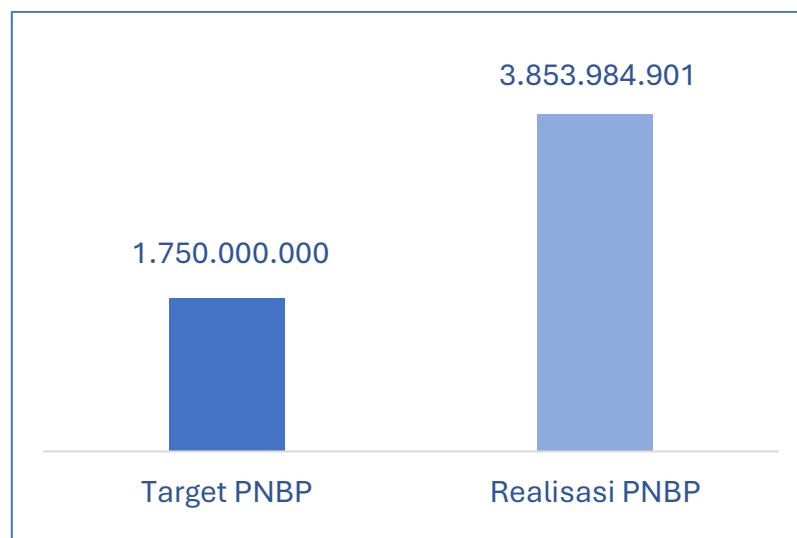
No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran /Efisiensi (Rp)	Blokir (Rp)	Optimal Pagu (Rp)
1	BKKPN Kupang	59.385.564.000	49.078.257.396	82,64	10.307.306.604	8.899.860.000	50.485.704.000
Jumlah		59.385.564.000	49.078.257.396	82,64	10.307.306.604	8.899.860.000	50.485.704.000



Gambar 71 Realisasi Belanja BKKPN Kupang Tahun 2025

Realisasi anggaran belanja BKKPN Kupang sangat mendukung untuk pencapaian kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2025. Seluruh kegiatan dengan capaian yang dikendalikan oleh BKKPN Kupang di tahun 2025 ini tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Selain itu, BKKPN Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, Adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.000.000, realisasi pendapatan di tahun 2025 adalah sebesar Rp3.853.984.901 atau tercapai 220,23% dari target. Jenis pendapatan yang diperoleh dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, serta pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya atas penerbitan izin aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi berupa tanda masuk dan karcis masuk. Realisasi pendapatan BKKPN Kupang di tahun 2025 disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 72 Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Tahun 2025

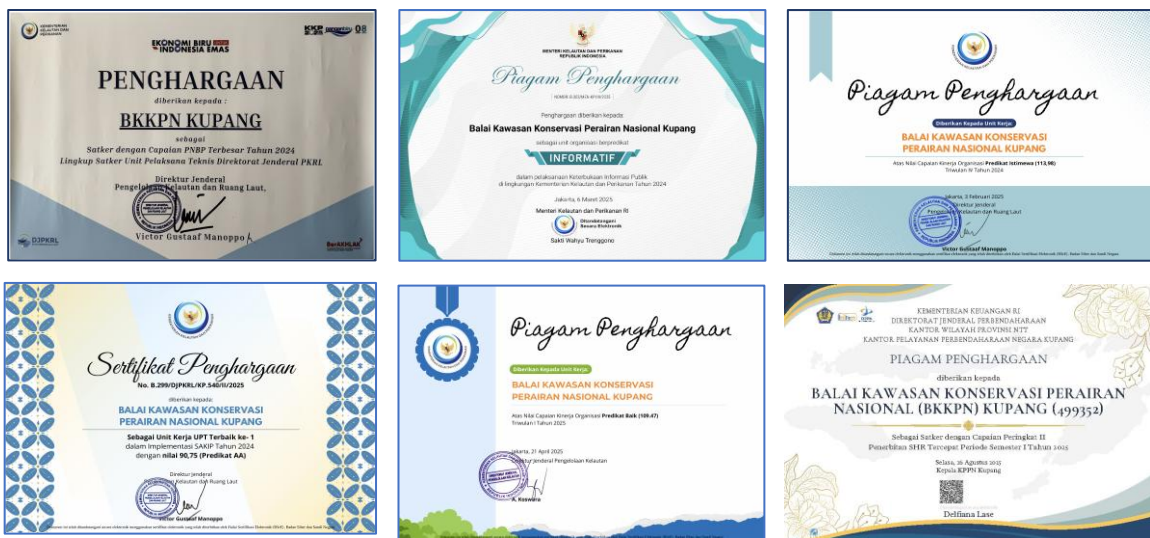
Tabel 65 Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	6.392.518
2	Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	580.000
3	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	5.327.383
4	Pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya	3.841.685.000
Jumlah		3.853.984.901

3.8 Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan

Selain pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja BKKPN Kupang, di tahun 2025 ini telah memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya atau penghargaan yang diterima atas praktik-praktik baik pemerintahan dalam mewujudkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif) dan budaya organisasi LEBE BAE (Layanan prima, Empati, Berani jujur, Efektif dan efisien, Bersih dari KKN, Akuntabel, Eksis), penghargaan yang telah diterima sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. UPT dengan PNBPT Tertinggi Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
2. Nilai Kinerja Organisasi Istimewa (113,98) Triwulan IV Tahun 2024;
3. UPT Terbaik 1 Implementasi SAKIP Tahun 2024 Lingkup DJPKRL; dan
4. Unit Organisasi Informatif Tahun 2024 Lingkup KKP.
5. Nilai Kinerja Organisasi Baik (109,47) Triwulan I Tahun 2025
6. Satker dengan Capaian Peringkat II Penerbitan SHR Tercepat Periode Semester 1 2025
7. Sertifikat Surveillance ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
8. Sertifikat Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
9. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Laut Sawu
10. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Gili Matra
11. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang
12. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Kep. Padaido
13. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Kep. Waigeo Sebelah Barat
14. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi Kep. Raja Ampat
15. Penghargaan Status EVIKA Berkelanjutan untuk Kawasan Konservasi laut Banda



Gambar 73 Penghargaan BKKPN Kupang hingga Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian BKKPN Kupang pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang terdiri dari 16 (lima belas) indikator kinerja. Pada tahun 2025 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh adalah **107,20 (Baik)**. Detail capaian kinerja BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. 12 (dua belas) Indikator Kinerja dengan capaian melebihi target yaitu:

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Tahun 2025		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
1	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	Tahunan	85,05	85,05	89,12	104,79
2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Semester	2	2	11	120
3	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	90	90	97,52	108,35
4	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	70	70	91,85	120
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Semester	89	89	92,63	104,08
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	71,5	71,5	100	120
7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	Semester	80	80	87,36	109,20
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	Triwulan	95	95	98,40	103,58
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	85	85	89,52	105,32

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Tahun 2025		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	70	70	80,50	115
11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (%)	Triwulan	76	76	100	120
12	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	91	91	100	109,89

b. 4 (empat) Indikator Kinerja dengan capaian 100%, yaitu:

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Tahun 2025		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
1	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	1	1	1	100
2	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	Triwulan	4	4	4	100
3	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	100	100	100	100
4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	2	2	2	100

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar Rp59.385.564.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan Oceans for Prosperity Project-LAUTRA, namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.899.860.000,- sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp50.485.704.000. Realisasi anggaran total pada tahun 2025 adalah sebesar Rp49.078.257.396, sehingga persentase realisasi anggaran adalah 82,64% berdasarkan pagu anggaran total atau 97,21% berdasarkan pagu efektif.

Selain itu, BKKPN Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.000.000, dengan realisasi pendapatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3.853.984.901,- atau tercapai 220,23% dari target.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan BKKPN Kupang di Tahun 2025 terdapat tantangan yang menjadi perhatian yaitu:

1. Masih terdapat 1 kawasan konservasi yang belum berstatus berkelanjutan pada penilaian EVIKA 2025
2. Target predikat WBBM belum tercapai di tahun 2025
3. Pengelolaan kearsipan masih belum optimal karena kekurangan SDM Kearsipan.

4.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Kep. Aru Bagian Tenggara secara berkala
2. Melakukan monitoring pembangunan zona integritas secara bulanan dan melaksanakan manajemen resiko kegiatan secara berkala.
3. Mengusulkan penyediaan SDM Kearsipan, mengusulkan sertifikasi SDM kearsipan dan melakukan penyusutan arsip kantor.

4.3 Tindaklanjuti

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 66 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
Tindaklanjuti Rekomendasi di Triwulan 1 2025			
1	Perlu melakukan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja sesuai struktur kelembagaan yang baru	1. Telah dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada struktur kelembagaan yang baru pada bulan Juni 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1ptn_d7xtAo0J46aN1iBlzW0iSrJlrWno?usp=drive_link
2	Perlu melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2025 lingkup BKKPN Kupang	2. Pemantauan berkala telah dilaksanakan setiap bulan	https://drive.google.com/drive/folders/1o8IMm0vH-u4QGbsKUc8nDX3WzMtMOIDo?usp=drive_link
Tindaklanjuti Rekomendasi di Triwulan 2 2025			
1	Perlu melakukan penyesuaian rencana penarikan dana pada periode triwulan III tahun 2025	1. Telah dilakukan usulan revisi penyesuaian RPD Triwulan 3 2025 kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1WNQ7vCvnLf7KXK6mQXWWY-TUj7B7SPA?usp=sharing
Tindaklanjuti Rekomendasi di Triwulan 3 2025			
1	Optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan kegiatan pada periode triwulan IV tahun 2025 dengan merencanakan secara detail rencana kegiatan untuk triwulan IV 2025	1. Telah dilakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyusun prognosa serapan anggaran hingga akhir tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1awb-vNBMHzbQLdzJ5uqMU2pDl2bJRluG?usp=drive_link
2	Mengajukan permohonan perubahan target indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang dengan pertimbangan belum adanya SDM arsiparis di BKKPN Kupang.	2. Telah diajukan permohonan perubahan target indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang melalui surat nomor B.2095/BKKPN/TU.220/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Permohonan Perubahan Target Indikator Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1C_UsWEMdzrYvCElGpRczQEchHrJ54mjI?usp=drive_link



LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	2
4.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	88
		6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5
		8.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	87
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		12.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85
		13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	80
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	76
		15.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	40.202.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	375.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	14.033.447.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2025		54.810.447.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai)	90
4.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	70
		6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	89
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5
		8.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	80
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		12.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85
		13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	80
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		15.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	40.202.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	14.033.447.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2025		54.435.447.000

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
(BKKN) KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN)
KUPANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	375.000.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Tahun 2025		375.000.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp266.385.000 sehingga Pagu Efektif BKKPN Kupang Tahun 2025 sebesar Rp108.615.000.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2
3.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang (Nilai)	90
4.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	70
		6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	89
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5
		8.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	80
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		12.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85
		13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	70
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	76
		15.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	45.249.100.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	13.561.464.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2025		59.010.564.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAMPIRAN 2

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI EVIKA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG

NOTA DINAS
NOMOR 18/BKKPN/OT.120/I/2026

Yth. : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Revisi Laporan Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Sehubungan dengan telah dilaksakannya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (EVIKA) di seluruh wilayah kerja BKKPN Kupang Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan berapa hal terkait, sebagai berikut:

1. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 92,51 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;
2. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 93,00 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;
3. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya, Provinsi Sulawesi Selatan telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 90,98 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;
4. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya, Provinsi Maluku telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 81,03 dengan **status perak atau dikelola optimum**;
5. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Laut Banda, Provinsi Maluku telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 87,60 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;

6. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya, Provinsi Papua telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 90,30 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;
7. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya, Provinsi Papua Barat Daya telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 88,51 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;
8. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025 terhadap Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya, Provinsi Papua Barat Daya telah disepakati dan disetujui nilai EVIKA 2025 sebesar 89,06 dengan status emas atau dikelola berkelanjutan;
9. Berita acara pleno (BAP) Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tahun 2025 sebagaimana terlampir;
10. Berdasarkan hasil pleno evaluasi dan verifikasi sebagaimana disebutkan pada angka 1-8 di atas, rata-rata nilai EVIKA 2025 lingkup BKKPN Kupang sebesar **89,12** sebagaimana tabel di bawah, adapun target indikator kinerja utama Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Tahun 2025 sebesar 85,05.

No	Kawasan Konservasi	Nilai Efektivitas		Kenaikan atau Penurunan
		2024	2025	
a	b	c	d	e = d-c
1	Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	89.75	92.51	2.76
2	Laut Sawu	92.26	93.00	0.74
3	Kep. Kapoposang	89.27	90.98	1.71
4	Kep. Aru Bagian Tenggara	70.15	81.03	10.88
5	Laut Banda	79.04	87.60	8.56
6	Kep. Padaido	85.81	90.30	4.49
7	Kep. Raja Ampat	85.42	88.51	3.09
8	Kep. Waigeo Sebelah Barat	88.69	89.06	0.37
Jumlah Nilai		680.39	712.99	32.6
Nilai rata-rata		85.05	89.12	4.08

Demikian laporan ini disampaikan, kiranya dapat dijadikan acuan dalam pencapaian target indikator kinerja utama dan data dukung dalam pengukuran kinerja tahun 2025. Atas perkenaannya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Wiyudha Pandu Laksana

BERITA ACARA PLENO HASIL PENILAIAN EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (EVIKA) TAHUN 2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Hotel Royal Padjajaran Bogor**, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, telah melaksanakan Rapat Pleno Penilaian EVIKA dengan hasil sebagai berikut:

1. Tim Penilai EVIKA telah melaksanakan penilaian terhadap 127 Kawasan Konservasi Nasional dan Kawasan Konservasi Daerah pada tanggal 4-8 November 2025 di Bali sebagai dasar pelaksanaan Rapat Pleno.
2. Tim Penilai EVIKA telah menyepakati dan menyetujui hasil penilaian EVIKA Tahun 2025 sesuai dengan hasil verifikasi pada Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2025, berdasarkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020.
3. Rapat Pleno mengesahkan hasil penilaian EVIKA Tahun 2025 dengan rincian hasil sebagai berikut:
 - a. Nilai EVIKA

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA
	Kawasan Konservasi Nasional		
1.	Pulau Pieh	90,61	Berkelanjutan
2.	Kepulauan Anambas	86,74	Berkelanjutan
3.	Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	92,51	Berkelanjutan
4.	Laut Sawu	93,00	Berkelanjutan
5.	Kapoposang	90,98	Berkelanjutan
6.	Kepulauan Aru Tenggara	81,03	Optimum
7.	Laut Banda	87,60	Berkelanjutan
8.	Pulau Padaido	90,30	Berkelanjutan
9.	Kepulauan Raja Ampat	88,51	Berkelanjutan
10.	Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	89,06	Berkelanjutan
11.	Mahakam Wilayah Hulu	59,10	Optimum
12.	Perairan di Laut Sulawesi	4.13	Minimum
	Kawasan Konservasi Daerah		
	Aceh		
13.	Suaka Alam Perairan Pesisir Timur Pulau Weh	65,87	Optimum
14.	Taman Pesisir Aceh Jaya	50,44	Optimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA
15.	Taman Pesisir Aceh Tamiang	34,77	Minimum
16.	Suaka Alam Perairan Aceh Besar	63,66	Optimum
17.	Suaka Alam Perairan P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	67,29	Optimum
18.	Suaka Alam Perairan Aceh Barat Daya	34,55	Minimum
19.	Suaka Alam Perairan Aceh Selatan	42,48	Minimum
	Sumatera Utara		
20.	Taman Wisata Perairan Sawo Lahewa	52,37	Optimum
21.	Taman Pulau Kecil Tapanuli Tengah	38,33	Minimum
22.	Taman Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	42,89	Minimum
23.	Pulau Berhala	23,71	Minimum
24.	Pulau Salahnama	23,26	Minimum
25.	Perairan di Wilayah Pulau Pini	23,26	Minimum
	Sumatera Barat		
26.	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	67,73	Optimum
27.	Pesisir Selatan	57,57	Optimum
28.	Kota Padang	52,20	Optimum
29.	Kota Pariaman	83,22	Optimum
30.	Batang Gasan Padang Pariaman	74,48	Optimum
31.	Pasaman Barat	64,27	Optimum
32.	Agam	18,73	Minimum
	Riau		
33.	Kepulauan Aruah	63,36	Optimum
34.	Indragiri Hilir	59,44	Optimum
	Kepulauan Riau		
35.	Timur Pulau Bintan	68,11	Optimum
36.	Perairan di Wilayah Bintan II	17,91	Minimum
	Kepulauan Bangka Belitung		
37.	Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang	39,83	Minimum
38.	Taman Wisata Perairan Belitung	41,39	Minimum
39.	Tuing	45,97	Minimum
40.	Ketugar Perlang	42,39	Minimum
41.	Pulau Lepar dan Pulau Pongok	37,79	Minimum
	Lampung		
42.	Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan	49,88	Minimum
43.	Way Kambas	77,89	Optimum
44.	Ngambur	39,82	Minimum
45.	Pulau Batang dan Pulau Segama	17,33	Minimum
	Jawa Barat		
46.	Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan	90,71	Berkelanjutan
47.	Pulau Biawak	37,04	Minimum
48.	Pangandaran	67,73	Optimum
	Banten		
49.	Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth	51,74	Optimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA
	Jawa Tengah		
50.	Taman Pesisir Ujungnegoro Roban	52,53	Optimum
51.	Karang Jeruk	59,35	Optimum
52.	Karang Jahe	51,96	Optimum
53.	Pulau Panjang	52,34	Optimum
54.	di Perairan di Wilayah Betahwalang	28,84	Minimum
	DIY		
55.	Pantai Selatan Bantul	61,62	Optimum
	Jawa Timur		
56.	Gili Ketapang	66,07	Optimum
	Bali		
57.	Taman Wisata Perairan Nusa Penida	76,79	Optimum
58.	Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa	17,09	Minimum
59.	Buleleng	30,33	Minimum
60.	Karangasem	30,56	Minimum
	Nusa Tenggara Barat		
61.	Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Gili Lawang	78,36	Optimum
62.	Taman Wisata Perairan Gita Nada	74,32	Optimum
63.	Taman Wisata Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali	67,87	Optimum
64.	Taman Wisata Perairan Gili Banta	46,01	Minimum
65.	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi	62,19	Optimum
66.	Gili Balu	68,80	Optimum
67.	Pulau Panjang	54,71	Optimum
68.	Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong	47,74	Minimum
69.	Pulau Lipan dan Pulau Rakit	65,24	Optimum
	Nusa Tenggara Timur		
70.	Alor	94,21	Berkelanjutan
71.	Flores Timur	55,52	Optimum
72.	Lembata	32,20	Minimum
73.	Sikka	37,46	Minimum
	Kalimantan Barat		
74.	Taman Wisata Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara	26,88	Minimum
75.	Taman Pulau Kecil Pulau Randayan	33,84	Minimum
76.	Taman Pulau Kecil Kendawangan	28,92	Minimum
77.	Taman Pesisir Kubu Raya	43,08	Minimum
78.	Taman Pesisir Paloh	28,49	Minimum
	Kalimantan Tengah		
79.	Gosong Senggora Sepagar	67,90	Optimum
	Kalimantan Selatan		
80.	Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	65,31	Optimum
	Kalimantan Timur		
81.	Kepulauan Derawan	80,07	Optimum
82.	Bontang	45,52	Minimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA
83.	Muara Badak dan Marangkayu Kutai Kartanegara	25,52	Minimum
	Kalimantan Utara		
84.	Binusan dan Pulau Sinelak	31,27	Minimum
85.	Tanjung Palas Timur	31,64	Minimum
	Sulawesi Utara		
86.	Tatoareng	61,51	Optimum
87.	Minahasa Utara	54,05	Optimum
88.	Sitaro	56,00	Optimum
89.	Perairan di Wilayah Kota Bitung	3,55	Minimum
	Sulawesi Tengah		
90.	Doboto	47,42	Minimum
91.	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	52,18	Optimum
92.	Morowali, Morowali Utara	72,69	Optimum
93.	Banggai Dalaka	62,08	Optimum
	Sulawesi Selatan		
94.	Liukang Tupabbiring	38,53	Minimum
95.	Liukang Tangaya	44,35	Minimum
96.	Perairan di Wilayah Pulau Panikiang	12,85	Minimum
97.	Perairan di Wilayah Pasi Gusung	16,92	Minimum
98.	Perairan di Wilayah Kayuadi	12,85	Minimum
	Gorontalo		
99.	Teluk Gorontalo	44,25	Minimum
	Sulawesi Barat		
100.	Kepulauan Balabak	21,34	Minimum
	Sulawesi Tenggara		
101.	Teluk Moramo	52,79	Optimum
102.	Pulau Wawonii	38,24	Minimum
	Maluku		
103.	Pulau Kei Kecil	74,32	Optimum
104.	P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	61,29	Optimum
105.	Kepulauan Lease	70,18	Optimum
106.	Pulau Ay dan Pulau Rhun	66,69	Optimum
107.	Pulau Buano	58,79	Optimum
108.	Seram Utara dan Seram Utara Barat	60,54	Optimum
109.	Kepulauan Tanimbar	44,02	Minimum
110.	Damer	34,63	Minimum
111.	Mdon Hier, Lakor, Moa, dan Letti	30,77	Minimum
112.	Kepulauan Romang	33,47	Minimum
113.	Kepulauan Babar	37,03	Minimum
	Maluku Utara		
114.	Pulau Mare	60,82	Optimum
115.	Pulau Rao-Tanjung Dehegila	68,35	Optimum
116.	Kepulauan Sula	34,76	Minimum
117.	Kepulauan Widi	59,76	Optimum

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA
118.	Kepulauan Guraici	61,53	Optimum
119.	Pulau Makian dan Pulau Moti	55,46	Optimum
	Papua		
120.	Biak Numfor	13,79	Minimum
	Papua Barat		
121.	Kaimana	52,11	Optimum
122.	Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	66,00	Optimum
	Papua Selatan		
123.	Pulau Kolepom	13,02	Minimum
	Papua Barat Daya		
124.	Kepulauan Raja Ampat	86,46	Berkelanjutan
125.	Jeen Womom	46,38	Minimum
126.	Seribu Satu Sungai Teoenebikia	8,59	Minimum
127.	Misool Utara	67,56	Optimum

4. Beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan pengelolaan efektivitas kawasan konservasi ke depan, yaitu:
- Keterbatasan jumlah, fungsi, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi.
 - Keterbatasan alokasi anggaran pengelolaan yang masih bersumber pada APBN, APBD dan dukungan mitra konservasi.
 - Sistem pengelolaan data, informasi, dan pelaporan pada satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi masih belum optimal.
 - Pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi belum optimal dan terdokumentasi dengan baik.
 - Penjangkauan masyarakat belum tersusun secara terstruktur dan terencana dengan baik di dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi.
 - Sebagian besar kawasan konservasi :
 - Belum memiliki dokumen rencana pengelolaan dan dokumen yang telah ditetapkan namun belum sesuai dengan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020.
 - Belum dilengkapi sarana dan prasarana pengelolaan sesuai dengan mandat Permen KP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi.
 - Kegiatan pengawasan belum dilakukan secara berkala dan terencana dengan baik.
 - Kelembagaannya di daerah pada umumnya masih merangkap pada tugas dan fungsi bidang di provinsi, ataupun berbentuk Kantor Cabang Dinas (KCD).

5. Rekomendasi:

a. Pemerintah Pusat:

- KKP mengusulkan kawasan konservasi yang telah ditetapkan kepada Pushidrosal untuk digambarkan ke dalam Peta Laut Indonesia (PLI) dan Berita Pelaut Indonesia (BPI).
- Menyempurnakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan perkembangan arah kebijakan nasional.
- Memperkuat kelembagaan pengelola kawasan konservasi, membuka peluang pendanaan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- Mendorong Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau unit kerja non-struktural (pos pelayanan) dari UPTD yang telah ada untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. Pemerintah Provinsi:

- Menetapkan program pengelolaan kawasan konservasi menjadi program strategis daerah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra, Renja), serta memastikan penganggarnya dalam APBD.
- Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia pengelola kawasan sesuai dengan kebutuhan dasar pengelolaan kawasan konservasi.
- Menyusun regulasi dan kebijakan daerah untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi.
- Memperkuat kelembagaan pengelola kawasan konservasi daerah termasuk mekanisme pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), meningkatkan keberlanjutan pendanaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
- Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Menyusun rencana penjangkauan masyarakat dan rencana penguatan kelompok masyarakat secara lebih terstruktur dan terukur agar dapat diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala (SUOP).
- Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi, mudah diakses, dan diperbarui secara reguler, yang mencakup seluruh kebutuhan data pengelolaan kawasan konservasi daerah (SUOP).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 2 Desember 2025

Tim Penilai EVIKA



Herri Binarasa Putra

Direktorat KE, Ditjen PK - KKP



Ihsan Ramli

Direktorat KE, Ditjen PK - KKP



Tely Dasaluti

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK – KKP



Munawar

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal – KKP



Leny Dwi Hastuty

Direktorat KE, Ditjen PK - KKP



Dedy Eka Syaputra

Direktorat Jasa Bahari, Ditjen PK - KKP



Yusra

Direktorat KE, Ditjen PK - KKP



Ahmad Sofiullah

Direktorat KE, Ditjen PK - KKP



Wendy Fadri Ariansyah

Direktorat Sumber Daya Kelautan,
Ditjen PK - KKP



A. Darwis.

Direktorat KSG, Ditjen PK - KKP



Raden Tomi Supratomo.

Setditjen PK – KKP



Krishna Samudra.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang
Laut, Ditjen PRL - KKP



Tantri Lisdiawati

Direktorat SUPD II, Ditjen Bina Bangda
- Kemendagri



Letkol Laut (P) Iskandar

Pushidrosal



Loly Ayzenela.

Direktorat Kepelabuhan, Kementerian
Perhubungan



Hendri Wijaya.

Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian
Perhubungan



R. Wisnu Saputro

Dit. BUMD, BLUD, dan BMD, Ditjen
Bina Keuangan Daerah - Kemendagri



Paskalis Baylon Meja

Dit. Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen
OTDA - Kemendagri



Sherly Yustinawati Suryatna.

Direktorat Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional



Meta Haries Maninda

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran -
Kemenkeu



Ucok Budiman Manalu.

Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Budy Wiryawan

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor



Riyanto Basuki

Pakar Konservasi



Agus Dermawan.

Pakar Konservasi



Silvianita Timotius.

Coral Triangle Center Indonesia



M. Imran Amin

Yayasan Konservasi Alam Nusantara



Imanda Hikmat Pradana

RARE Indonesia



Sukmaraharja Aulia Rachman Tarigan

Praktisi Konservasi



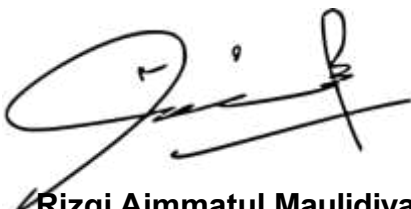
Yudi Herdiana.

Konservasi Indonesia



Taufik Abdillah

Yayasan WWF Indonesia



Rizqi Aimmatul Maulidiyah.

Yayasan Rekam Nusantara

Mengetahui/menyetujui:

Direktur Konservasi Ekosistem,
Selaku penanggungjawab



Firdaus Agung



LAMPIRAN 3

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA KEMITRAAN KONSERVASI

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG

NOTA DINAS
NOMOR 14/BKKPN/PRL.440/I/2026

Yth : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
Dari : Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan Data Informasi
Perihal : Penyampaian Capaian Jejaring dan Kemitraan Konservasi
di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, bersama ini Tim Kerja Kerja Sama dan Data Informasi menyampaikan capaian target indikator kinerja: “Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang” dengan target 2 (dua) Kesepakatan; bahwa pada tahun 2025 telah tercapai 11 (sebelas) kesepakatan atau 550% dari target kinerja BKKPN Kupang tahun 2025. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah Perjanjian Kemitraan dan telah ditandatangani baik oleh BKKPN Kupang dan para mitra, antara lain:

1. Yayasan Gili Matra Bersama
2. Yayasan Penyu Papua
3. Universitas Kristen Artha Wacana
4. PT. Blue Marlin Dive
5. PT. Karang Indah Selam
6. PT. Samudera Indah Diving
7. PT. Windmolen
8. PT. Trawangan Dive Indah
9. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro
10. Fakultas Pertanian, Universitas Mataram
11. Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada

Sehingga pada tahun 2025 terdapat total 19 (sembilan belas) kemitraan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang dengan ditambahkan 8 (delapan) para mitra *existing*, antara lain:

1. PT. MARS Symbioscience
2. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua
4. Yayasan Ekosistem Gili Indah
5. Universitas Banda Naira
6. Yayasan Alam Indonesia Lestari
7. Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (Thrive Conservation)
8. Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)

Naskah Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan para mitra dapat di akses pada tautan: <https://bit.ly/PerjanjianKemitraanBKKPNKupang>.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan *Learning* (MEL) terhadap Perjanjian Kemitraan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dilaksanakan tiap triwulan selama tahun 2025 dengan para mitra *existing*. Hasil dari MEL tersebut, terdapat beberapa kendala implementasi dan pembelajaran dari kemitraan yaitu:

- Implementasi kemitraan terkendala perubahan nomenklatur program/kegiatan mitra → Rencana kegiatan/aksi agar tidak terlalu spesifik;
- Lokasi kawasan konservasi yang jauh dari beberapa mitra *existing* → Implementasi kemitraan lebih optimal untuk Mitra pendukung lokal/memiliki perwakilan dalam Kawasan Konservasi;
- Beberapa Perguruan Tinggi mengalami kendala terkait anggaran pelaksanaan kegiatan → menyampaikan timeline kegiatan yang akan dikolaborasikan saat penyusunan naskah awal perjanjian kemitraan termasuk rencana aksi;
- Jadwal kegiatan mitra tidak selaras dengan kegiatan pengelola kawasan konservasi → Perlunya sinkronisasi program dan kegiatan pengelola kawasan konservasi dan mitra;
- Kendala implementasi pada publikasi ilmiah → Rencana detail untuk Upaya kolaborasi penulisan karya ilmiah;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk merumuskan strategi implementasi kemitraan;
- Beberapa kesenjangan pengelolaan Kawasan Konservasi belum ada mitra pendukung;
- Beberapa kawasan konservasi belum memiliki mitra pendukung lokal yang potensial.

Matriks evaluasi untuk implementasi Kemitraan tiap triwulan beserta dokumen pendukung dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/MELKemitraanBKKPNKupang2025>.

Selain itu, terdapat inisiasi dan pembaharuan kemitraan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang yang sedang dalam tahapan baik sosialisasi, penyusunan maupun finalisasi naskah Perjanjian Kemitraan konservasi dengan 18 (delapan belas) calon mitra antara lain:

1. Yayasan Sinambung Alam Nusantara
2. Yayasan Indo Coral Conservation
3. Yayasan Coral Triangle Center
4. Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana
5. Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang
6. Universitas Katholik Widya Mandhira
7. Politeknik Pertanian Kupang
8. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
9. PT. Discover Scuba Master
10. PT. Georg Rainer
11. PT. Sunny Sea Stars
12. PT. Valentini Konsultan New
13. PT. Four Elements Eco Dive
14. PT. Wisata Tirta Gili Air
15. PT Pesona Resort Dive
16. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
17. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
18. PT. MARS Symbioscience (Pembaharuan Perjanjian Kemitraan yang habis masa berlaku)

Beberapa dokumen awal (*draft*) Perjanjian Kemitraan antara BKKPN Kupang dengan calon mitra dapat di akses pada tautan: <https://bit.ly/InisiasiKemitraanBKKPNKupang>.

Sedangkan pelaksanaan Jejaring Kawasan Konservasi; Selama tahun 2025 BKKPN Kupang melaksanakan MEL terhadap Jejaring Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat disahkan melalui melalui Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 744/DJPRL/XII/2022 dan 415.4/25/Pem dan Otda/XII/2022 yang ditandatangani oleh Dirjen PRL, KKP dan Gubernur NTB pada 13 Desember 2022 dan berakhir pada 13 Desember 2025. Hasil dari pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Learning (MEL) yaitu hampir seluruh rencana kerja telah terlaksana hingga 100% dan hanya 1 rencana kegiatan yang tidak terlaksana yaitu melaksanakan Monitoring Habitat dan Ekosistem di Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTB; dikarenakan kendala tidak ada penganggaran oleh SUOP KKD untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati di Rencana Kerja Tahunan.

Untuk laporan tahun pelaksanaan Jejaring dan Kemitraan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Tahun Anggaran 2025 dapat di akses pada tautan:

<https://bit.ly/LaporanJejaringKemitraan2025>.

Pembiayaan pelaksanaan Jejaring dan Kemitraan Konservasi lingkup BKKPN Kupang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dengan total realisasi Rp 244.181.470,- atau 92,53% dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 263.883.000,-

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan
Data Informasi



Ditandatangani
Secara Elektronik

Thri Heni Utami Radiman

Lampiran I
 Nomor : 14/BKKPN/PRL.440/I/2026
 Tanggal : 13 Januari 2026

DAFTAR PERJANJIAN KEMITRAAN LINGKUP BKKPN KUPANG

NO.	NAMA MITRA	KATEGORI MITRA	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU	JUDUL	LOKUS KAWASAN KONSERVASI
1	PT. MARS Symbioscience	Korporasi	29 November 2021	2022-2025	Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional dan Sumber Daya Ikan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	Wilayah Kerja BKKPN Kupang
2	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman	Perguruan Tinggi	23 Februari 2023	2023-2026	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Wilayah Kerja BKKPN Kupang
3	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua	Perguruan Tinggi	23 Februari 2023	2023-2026	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Kawasan Konservasi serta Pendidikan, Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1. KK Kep. Raja Ampat dan Kep. Waigeo sebelah Barat 2. KK Kep. Padaido
4	Yayasan Ekosistem Gili Indah	Lembaga Swadaya Masyarakat	11 Agustus 2023	2023-2026	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
5	Universitas Banda Naira	Perguruan Tinggi	15 Agustus 2023	2023-2028	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penjangkauan dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan dan Penelitian Sumber Daya Alam di Kawasan Konservasi Laut Banda	KK Laut Banda
6	Yayasan Alam Indonesia Lestari	Lembaga Swadaya Masyarakat	15 Agustus 2023	2023-2026	Pengumpulan dan Pengembangan Data dan Informasi Perikanan, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Ekosistem di Kawasan Konservasi Laut Banda	KK Laut Banda
7	Yayasan Cakrawala Nusantara Lestari (Thrive Conservation)	Lembaga Swadaya Masyarakat	8 Mei 2024	2024-2027	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu	KK Laut Sawu
8	Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (YEKHALI)	Lembaga Swadaya Masyarakat	28 November 2024	2024 -2026	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1. KK Kep. Kapoposang 2. KK Pulau Gili Matra
9	Yayasan Gili Matra Bersama	Lembaga Swadaya Masyarakat	25 Juni 2025	2025-2028	Konservasi Biota Laut serta Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut di Kawasan dan Laut di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan

NO.	NAMA MITRA	KATEGORI MITRA	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU	JUDUL	LOKUS KAWASAN KONSERVASI
10	Yayasan Penyu Papua	Lembaga Swadaya Masyarakat	9 Juli 2025	2025-2027	Perlindungan dan Pelestarian Penyu dan Habitatnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut sekitarnya	KK Kep. Raja Ampat dan Kep. Waigeo sebelah Barat
11	Universitas Kristen Artha Wacana	Perguruan Tinggi	29 Juli 2025	2025-2030	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	Wilayah Kerja BKKPN Kupang
12	PT. Blue Marlin Dive	Korporasi	8 September 2025	2025-2030	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
13	PT. Karang Indah Selam (3WDive)	Korporasi	8 September 2025	2025-2030	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
14	PT. Samudera Indah Diving	Korporasi	8 September 2025	2025-2030	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
15	PT. Windmolen (Ocean5)	Korporasi	8 September 2025	2025-2030	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
16	PT. Trawangan Dive Indah	Korporasi	8 September 2025	2025-2030	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
17	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Perguruan Tinggi	7 Oktober 2025	2026-2030	Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional dan Sumber Daya Ikan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	Wilayah Kerja BKKPN Kupang
18	Fakultas Pertanian, Universitas Mataram	Perguruan Tinggi	8 September 2025	2025-2029	Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Melalui Kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	Wilayah Kerja BKKPN Kupang
19	Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada	Perguruan Tinggi	17 Oktober 2025	2025-2030	Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut di Wilayah Kerja Bkkpn Kupang	Wilayah Kerja BKKPN Kupang

DAFTAR INISIASI PERJANJIAN KEMITRAAN LINGKUP BKKPN KUPANG

NO.	NAMA CALON MITRA	KATEGORI MITRA	JUDUL	LOKUS KAWASAN KONSERVASI	TAHAPAN
1	Yayasan Sinambung Alam Nusantara	Lembaga Swadaya Masyarakat	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi NTB	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Penyusunan naskah awal Perjanjian Kemitraan
2	Yayasan Indo Coral Conservation	Lembaga Swadaya Masyarakat	Sinergi Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Provinsi NTB	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Penyusunan naskah awal Perjanjian Kemitraan
3	Yayasan Coral Triangle Center	Lembaga Swadaya Masyarakat	-	KK Laut Banda & KK Kep Aru bagian Tenggara	Sosialisasi
4	Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana	Perguruan Tinggi	Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Penyusunan naskah awal Perjanjian Kemitraan
5	Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang	Perguruan Tinggi	Penguatan Pengelolaan Taman Nasional Perairan Laut Sawu melalui Kajian Multidisiplin Perikanan, Konservasi, Sosial Ekonomi Perikanan, dan Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pencapaian Ekonomi Biru	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Finalisasi naskah Perjanjian Kemitraan
6	Universitas Katholik Widya Mandhira	Perguruan Tinggi	-	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Sosialisasi
7	Politeknik Pertanian Kupang	Perguruan Tinggi	-	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Sosialisasi
8	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	Perguruan Tinggi	-	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Penyusunan naskah awal Perjanjian Kemitraan
9	PT. Discover Scuba Master	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi
10	PT. Georg Rainer	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi

NO.	NAMA CALON MITRA	KATEGORI MITRA	JUDUL	LOKUS KAWASAN KONSERVASI	TAHAPAN
11	PT. Sunny Sea Stars	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi
12	PT. Valentini Konsultan New	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi
13	PT. Four Elements Eco Dive	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi
14	PT. Wisata Tirta Gili Air	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi
15	PT Pesona Resort Dive	Korporasi	-	Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan	Sosialisasi
16	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya	Perguruan Tinggi	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber Daya Ikan di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Finalisasi naskah Perjanjian Kemitraan
17	Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba	Perguruan Tinggi		Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Penyusunan naskah awal Perjanjian Kemitraan
18	PT. MARS Symbioscience	Korporasi	Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional dan Sumber Daya Ikan di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	Pembaharuan naskah Perjanjian Kemitraan



LAMPIRAN 4

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI MINIMUM PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.50/BKKPN/RC.610/I/2026 9 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Capaian IKU Nilai Minimum Pelayanan
Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Cq. Direktur Konservasi Ekosistem
di Jakarta

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang tahun 2025 sebagai dasar dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi BKKPN Kupang, bersama ini kami sampaikan perhitungan nilai pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi BKKPN Kupang 2025 sebagai berikut :

1. Perhitungan capaian dilakukan sesuai dengan manual IKU yaitu dengan menjumlahkan 2 kriteria yaitu permohonan yang dilayani dengan bobot nilai (80) dan ketepatan waktu pelayanan dengan bobot nilai (20)
2. Sumber data perhitungan didapatkan dari data pengguna layanan yang telah tercatat dalam aplikasi Seapark (seapark.kkp.go.id).
3. Perhitungan capaian diperoleh hasil :
 - a. Jumlah pengguna layanan yang mendaftar dan dilayani adalah 4.258 permohonan, dengan persentase 100 (seratus) persen, sehingga nilai permohonan yang dilayani adalah 80;
 - b. Persentase jumlah pengguna layanan yang mendapatkan layanan tepat waktu sesuai dengan SOP adalah sebesar 3.731 permohonan, dengan persentase 87,62 (delapan puluh tujuh koma enam puluh dua) persen, sehingga nilai ketepatan waktu pelayanan adalah 17,52;
 - c. Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi BKKPN Kupang 2025 adalah **97,52**;

4. Standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan data dukung perhitungan capaian terlampir pada tautan [https://bit.ly/Nilai Pelayanan BKKPN Kupang 2025](https://bit.ly/Nilai_Pelayanan_BKKPN_Kupang_2025)

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Plh. Kepala BKKPN Kupang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Wiyudha Pandu Laksana

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Kepala BKKPN Kupang



LAMPIRAN 5

DATA DUKUNG CAPAIAN DOKUMEN

IDENTIFIKASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU

KECIL



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGLOLAAN KELAUTAN
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.3261/BKKPN/OT.120/XII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan

29 Desember 2025

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Cq. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
di Jakarta

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2025 di wilayah kerja BKKPN Kupang sebagai dasar pemenuhan target Indikator Kinerja Utama BKKPN Kupang yaitu Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang, bersama ini kami sampaikan ringkasan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2025 di 8 Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan wilayah sekitarnya (Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang, Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra, Kawasan Konservasi Laut Banda, Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara).
2. Terdata sebanyak 48 pelaku usaha yang memiliki kegiatan di pulau-pulau kecil, terdiri dari 13 pelaku usaha di Pulau Rote (Kab. Rote Ndao), 9 pelaku usaha di Pulau Sebayur Besar, Sabolo Besar, Seraya Kecil, Siwona, Bidadari, dan Kanawa (Kab. Manggarai Barat), 6 pelaku usaha di Pulau Kapoposang dan Papandangan (Kab. Pangkajene Kepulauan), 6 pelaku usaha di Pulau Gam, Kurai, Yeben, Agusta, Wai (Kab. Raja Ampat), 3 pelaku usaha di Pulau Naira (Kab. Maluku Tengah), dan 11 pelaku usaha di Pulau Wamar (Kab. Kepulauan Aru).
3. Jenis kegiatan yang dilakukan di pulau-pulau kecil adalah pariwisata (resort, villa, hotel, restoran) sebanyak 39 usaha, perikanan (cold storage, budidaya mutiara) sebanyak 7 usaha, dan lainnya (SPBU, BTS, real estate) sebanyak 2 usaha.

Dengan status kepemilikan modal terdiri dari 15 usaha PMA (Penanaman Modal Asing) dan 33 usaha PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

4. Pagu anggaran sebesar Rp200.000.000 dengan realisasi Rp197.131.124 atau mencapai 98,57%.
5. Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa saran dan rekomendasi yaitu:
 - a. Pembukaan gerai pelayanan pengurusan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil khususnya di Pulau Rote yang mayoritas merupakan PMA
 - b. Sosialisasi dan koordinasi Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir
 - c. Penyusunan bahan publikasi dengan penyediaan panduan teknis perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk pelaku usaha dan pemerintah daerah, termasuk FAQ, flowchart, dan ringkasan prosedur.
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil kepada UPT dan pelaku usaha.

Lebih lanjut hasil laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud yang dapat diakses pada tautan <https://tinyurl.com/IdentifikasiPulauKecilBKKPN>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAMPIRAN 6

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI PM SAKIP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.3745/DJPK.1/RC.610/XII/2025 23 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2025 pada BKKPN Kupang

Yth. Kepala BKKPN Kupang

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PK serta memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada BKKPN Kupang sebagai berikut:

1. Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen pada aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses melalui <https://kinerjaku.kkp.go.id>.
3. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BKKPN Kupang memperoleh nilai 91,85 dari nilai maksimum 100 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), sebagaimana uraian pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada BKKPN Kupang Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	26.10
2	Pengukuran Kinerja	30	28.50
3	Pelaporan Kinerja	15	14.25
4	Evaluasi Internal	25	23.00
Nilai Hasil Evaluasi		100	91.85
Predikat Penilaian			AA

4. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025 pada BKKPN Kupang telah tersedia, dipublikasikan dan dipertahankan setidaknya selama 5 tahun yaitu sejak Tahun 2021. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu berorientasi hasil, dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-boun* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Perencanaan kinerja juga telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan, melalui pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala, perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan atas capaian periode sebelumnya, dan keterlibatan pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun, beberapa upaya yang dapat dihargai dalam pemenuhan kriteria kualitas perencanaan kinerja, yaitu telah menjalin Kemitraan Konservasi sebagai upaya penyediaan alternatif pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui pembentukan kerjasama dengan mitra-mitra terkait di kawasan konservasi. Hingga tahun 2025 BKKPN Kupang telah menjalin kerjasama dengan 9 mitra strategis yang cukup aktif terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga dinilai A.

b. Pengukuran Kinerja

Pedoman teknis pengukuran kinerja dan data Kinerja Tahun 2025 BKKPN Kupang telah dilakukan dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan efisien dengan kualitas seluruh kriteria terpenuhi. Selain itu, Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan kualitas seluruh kriteria terpenuhi.

Beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas serta telah dilakukan replikasi oleh instansi lain sehingga dinilai AA, yaitu sebagai berikut:

- a. *Platform* MonSTERA yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap pencapaian sasaran target (indikator kinerja) dan evaluasi rencana aksi, sehingga pencapaian target kinerja dapat optimal, Platform MonSTERA telah **direplikasi oleh 2 unit kerja** yaitu :

1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar sebagaimana Surat Keterangan Replikasi Nomor B.1486/BPSPL.3/PL.110/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024; dan
2. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong sebagaimana Surat Keterangan Replikasi Nomor B.855/LPSPL.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Pada tahun 2025 terdapat *maintenance* penambahan fitur baru pada *platform* MonSTERA diantaranya menu penyediaan notulensi, dokumentasi, daftar hadir, undangan dan paparan.

- b. Taman Karang Piracora inovasi untuk perbaikan atau pemulihan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan sekaligus menciptakan suatu objek wisata buatan di bawah laut di Kawasan Konservasi Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya. Metode yang digunakan adalah rehabilitasi terumbu karang dengan metode transplantasi, media yang digunakan yaitu meja beton yang dinamakan piramida coral konservasi (PIRACORA). Inovasi ini telah terbukti sukses dan berhasil **direplikasi** oleh Lembaga Pelestarian Laut dan Pesisir "Laut Biru".

Pada kriteria pemanfaatan pengukuran kinerja, BKKPN Kupang telah melakukan inovasi melalui pemberian penghargaan kepada pengelola wilayah kerja kawasan konservasi atas kontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (peningkatan persentase EVIKA, jejaring konservasi, kemitraan konservasi, bantuan Kompak, dan perolehan PNBP) dan Indikator Manajerial (IKPA dan efektivitas bantuan pemerintah), melalui platform Si Jaga Konservasi pada laman <https://linktr.ee/evarigata> sehingga di nilai A.

c. Pelaporan Kinerja

BKKPN Kupang telah memenuhi kriteria pelaporan kinerja dengan baik, ditandai dengan tersedianya Dokumen Laporan Kinerja (LKj) yang menggambarkan capaian kinerja dan telah dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun terakhir. Laporan Kinerja (LKj) telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya dengan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat upaya yang dapat dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi.

Beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas pelaporan serta telah dilakukan replikasi oleh instansi lain sehingga dinilai AA, yaitu: *Platform* MonSTERA yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala terhadap pencapaian sasaran target (indikator kinerja) dan evaluasi rencana aksi, sehingga pencapaian target kinerja dapat optimal. Selanjutnya pada tahun 2025 terdapat *maintenance* penambahan fitur baru pada platform MonSTERA untuk menunjang penyediaan notulensi, dokumentasi, daftar hadir, undangan dan paparan. Platform MonSTERA **telah direplikasi oleh 2 unit kerja** yaitu :

1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar sebagaimana Surat Keterangan Replikasi Nomor B.1486/BPSPL.3/PL.110/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024; dan
2. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong sebagaimana Surat Keterangan Replikasi Nomor B.855/LPSPL.1/TU.210/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Sedangkan pada kriteria pemanfaatan, Pelaporan kinerja telah dimanfaatkan secara strategis untuk perencanaan anggaran berkelanjutan. Hasil analisis pelaporan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode berikutnya. Hal ini terlihat dari peningkatan target PNBP dari Rp1.354.900.000 pada tahun 2024 menjadi Rp1.750.000.000. pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam DIPA Satker BKKPN Kupang, sehingga dinilai A.

d. Evaluasi Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan seluruh kriteria telah terpenuhi dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir. Selanjutnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumberdaya yang memadai dan seluruh kriteria telah terpenuhi. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi.

Beberapa upaya inovatif yang telah dilakukan dan dapat dihargai dalam mendukung pemenuhan kriteria kualitas yang layak dan pemanfaatan implementasi SAKIP sehingga dinilai A (Memuaskan), yaitu:

- 1) **Sertifikasi ISO 9001:2015:** Pengakuan terkait Sistem Manajemen Mutu (berlaku sd 8 Desember 2026)
- 2) **Sertifikasi ISO 37001:2016:** Pengakuan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (berlaku sd 19 Juni 2027);
- 3) Taman Karang Piracora Kapoposang Taman karang piracora menjadi Nasional **TOP 15 KIPP Lingkup KKP Tahun 2024**
- 4) **Berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2025**

5. Tindaklanjut hasil pengawasan periode sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi AKIP Tahun 2024 terdapat 1 (satu) rekomendasi yaitu:

Menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja pada dokumen laporan kinerja tahun 2024. Perbandingan dilakukan per Indikator Kinerja yang dapat dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BKKPN Kupang melalui surat B.197/BKKPN/HP.440/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada BKKPN Kupang.

6. Berdasarkan hasil evaluasi, meskipun tidak ditemukan kelemahan pada pelaksanaan SAKIP Tahun 2025 diharapkan unit pelaksana teknis BKKPN Kupang:

Adanya penambahan anggaran PNBP sebesar Rp103,145 miliar (optimasi persetujuan penggunaan PNBP dari 10% menjadi 23%) melalui Revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025. Perubahan signifikan ini berdampak langsung pada peningkatan pelayanan perizinan dan dukungan PNBP lingkup Ditjen PKRL, yang seharusnya diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) level 2 Pusat dan UPT. Namun, hingga saat

evaluasi, BKKPN Kupang belum mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut.

7. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BKKPN Kupang direkomendasikan untuk: Menindaklanjuti perubahan anggaran dengan Membuat Nota Dinas usulan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Setditjen.

Rekomendasi terhadap hasil evaluasi SAKIP tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti paling lambat **minggu pertama bulan Februari Tahun 2026**.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal PK
Sekretaris Direktorat Jenderal PK



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miftahul Huda

Tembusan:

1. Dirjen PK
2. Inspektur I
3. Kepala Biro Perencanaan



LAMPIRAN 7

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI IKPA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Plt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
5	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

6	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.84	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				
7	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.67	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.83				100.00				
8	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.67	100.00	79.87	80%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.33				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	99.72	100%	0.00	99.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.29				100.00				
10	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.68	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.84				100.00				
11	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.95	100.00	99.69	100%	0.00	99.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.24				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

12	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.51	100.00	99.65	100%	0.00	99.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.65	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
13	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.88	0.00	0.00	98.18	100.00	79.59	80%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.78	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.53				100.00				
14	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	98.93	100.00	100.00	95.65	100.00	99.35	100%	0.00	99.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.79	10.00	10.00	9.57	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.65				100.00				
15	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	89.13	90%	0.00	99.03
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				100.00				
16	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.66	100.00	0.00	0.00	99.94	100.00	79.19	80%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.20	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	97.33		99.97				100.00				
17	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.93	100%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

18	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	91.43	100.00	79.14	80%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.14	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.72				100.00				
19	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	92.71	99.61	100.00	100.00	100.00	100.00	98.83	100%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.92	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.36		99.90				100.00				
20	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	91.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.99		100.00				100.00				
21	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	91.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		100.00				100.00				
22	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	94.07	100.00	100.00	100.00	96.42	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	10.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.10				100.00				
23	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	93.33	100.00	94.16	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.33	10.00	9.42	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

24	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	94.55	99.03	0.00	0.00	98.88	100.00	78.88	80%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.18	19.81	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	97.28		98.96				100.00				
25	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	86.00	100.00	100.00	100.00	98.60	100%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	8.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.50				100.00				
26	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.39	100.00	100.00	100.00	94.07	100.00	98.57	100%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	97.20		98.52				100.00				
27	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	91.12	100.00	100.00	100.00	98.22	100.00	98.49	100%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	95.56		99.55				100.00				
28	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.48	100.00	100.00	100.00	97.43	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.72	20.00	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.74		99.36				100.00				
29	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	92.75	97.28	100.00	100.00	99.88	100.00	98.36	100%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.46	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.38		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

30	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	92.85	99.20	100.00	100.00	95.64	100.00	98.33	100%	0.00	98.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	19.84	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		98.71				100.00				
31	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	92.54	100.00	93.33	100.00	99.38	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	20.00	9.33	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.27		98.18				100.00				
32	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	92.12	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		98.03				100.00				
33	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	88.86	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		99.76				100.00				
34	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.59	99.36	100.00	100.00	99.69	100.00	98.13	100%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.87	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.76				100.00				
35	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	89.74	100.00	100.00	100.00	96.63	100.00	98.12	100%	0.00	98.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.66	25.00				
					Nilai Aspek	94.87		99.16				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

36	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	91.73	100.00	100.00	100.00	93.55	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.76	20.00	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	95.87		98.39				100.00				
37	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	87.68	100.00	100.00	100.00	99.56	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	93.84		99.89				100.00				
38	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.28	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.09	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.64		99.99				100.00				
39	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.02	95.51	100.00	100.00	99.78	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	19.10	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		98.82				100.00				
40	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	91.78	99.87	100.00	100.00	92.64	100.00	98.01	100%	0.00	98.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.97	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	95.89		98.13				100.00				
41	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	87.92	100.00	100.00	100.00	98.09	100.00	98.00	100%	0.00	98.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		99.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

42	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.38	100.00	0.00	100.00	99.14	100.00	88.17	90%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	20.00	0.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.71				100.00				
43	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	86.28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.94	100%	0.00	97.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.94	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.14		100.00				100.00				
44	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	86.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.07		100.00				100.00				
45	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	88.24	99.27	100.00	100.00	98.11	100.00	97.90	100%	0.00	97.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	19.85	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	94.12		99.35				100.00				
46	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	94.96	100.00	100.00	100.00	85.62	100.00	97.81	100%	0.00	97.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	20.00	10.00	10.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	97.48		96.40				100.00				
47	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	89.27	99.00	100.00	100.00	96.08	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.80	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	94.64		98.77				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

48	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	91.04	98.68	0.00	100.00	100.00	100.00	58.66	60%	0.00	97.76
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.66	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.52		100.00				100.00				
49	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.26	98.38	100.00	100.00	96.88	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.68	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	94.63		98.81				100.00				
50	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	84.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100%	0.00	97.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		100.00				100.00				
51	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	91.62	98.54	0.00	0.00	97.12	100.00	78.16	80%	0.00	97.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.74	19.71	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	95.81		97.83				100.00				
52	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	84.86	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.43		99.90				100.00				
53	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	89.05	98.73	0.00	0.00	99.83	100.00	78.09	80%	0.00	97.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.36	19.75	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.53		99.28				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

54	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	87.71	100.00	0.00	0.00	99.26	100.00	78.08	80%	0.00	97.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.16	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	93.86		99.63				100.00				
55	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	84.74	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.85	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.37		99.81				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	88.30	99.97	100.00	100.00	100.00	100.00	68.25	70%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.25	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		100.00				100.00				
57	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	87.95	100.00	100.00	100.00	92.56	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	93.98		98.14				100.00				
58	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.81	96.25	100.00	100.00	95.31	100.00	97.40	100%	0.00	97.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	19.25	10.00	10.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	95.41		97.89				100.00				
59	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.78	98.46	100.00	100.00	97.36	99.45	97.31	100%	0.00	97.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.69	10.00	10.00	9.74	24.86				
					Nilai Aspek	93.39		98.96				99.45				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

60	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.45	98.66	100.00	100.00	100.00	100.00	97.25	100%	0.00	97.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.73	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.73		99.67				100.00				
61	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	87.84	98.92	0.00	0.00	97.84	100.00	77.74	80%	0.00	97.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	19.78	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	93.92		98.38				100.00				
62	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	85.21	99.71	0.00	0.00	99.65	100.00	77.69	80%	0.00	97.11
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	19.94	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.61		99.68				100.00				
63	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	85.87	99.59	100.00	100.00	91.92	100.00	96.99	100%	0.00	96.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.92	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	92.94		97.88				100.00				
64	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	85.34	97.45	100.00	100.00	0.00	100.00	67.80	70%	0.00	96.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
65	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	81.38	97.81	100.00	100.00	99.92	100.00	96.76	100%	0.00	96.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	19.56	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	90.69		99.43				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

66	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	84.44	95.79	100.00	100.00	98.41	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	19.16	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		98.55				100.00				
67	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	81.84	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.28	80%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		100.00				100.00				
68	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	87.66	98.00	0.00	0.00	100.00	97.96	77.24	80%	0.00	96.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	19.60	0.00	0.00	10.00	24.49				
					Nilai Aspek	93.83		99.00				97.96				
69	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	88.99	99.30	93.33	100.00	99.78	100.00	97.52	100%	1.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	19.86	9.33	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.50		98.10				100.00				
70	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	98.18	100.00	96.52	100%	0.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		99.55				100.00				
71	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	81.35	98.40	100.00	100.00	96.14	100.00	96.50	100%	0.00	96.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	19.68	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		98.64				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

72	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	77.28	99.49	100.00	100.00	100.00	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.59	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.64		99.87				100.00				
73	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	82.79	100.00	0.00	0.00	97.46	100.00	77.16	80%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	20.00	0.00	0.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	91.40		98.73				100.00				
74	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	81.48	98.61	100.00	100.00	95.15	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.72	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	90.74		98.44				100.00				
75	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	84.63	100.00	96.40	100%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	8.46	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		96.16				100.00				
76	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	93.49	100.00	82.00	100.00	91.70	100.00	96.39	100%	0.00	96.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	20.00	8.20	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	96.75		93.43				100.00				
77	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	81.96	95.38	100.00	100.00	100.00	100.00	96.37	100%	0.00	96.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	19.08	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.98		98.85				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

78	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	87.56	100.00	88.00	100.00	93.71	100.00	96.31	100%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	8.80	10.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	93.78		95.43				100.00				
79	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	94.57	99.23	80.00	100.00	92.22	100.00	96.25	100%	0.00	96.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.85	8.00	10.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	97.29		92.86				100.00				
80	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	81.11	99.02	0.00	100.00	96.40	100.00	86.61	90%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.17	19.80	0.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	90.56		98.47				100.00				
81	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	85.02	95.40	96.00	100.00	96.11	100.00	96.04	100%	0.00	96.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.75	19.08	9.60	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	92.51		96.88				100.00				
82	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	78.62	98.69	0.00	100.00	97.45	100.00	86.28	90%	0.00	95.86
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	19.74	0.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	89.31		98.71				100.00				
83	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	82.52	97.22	100.00	100.00	90.29	100.00	95.85	100%	0.00	95.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.38	19.44	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	91.26		96.88				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

84	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	82.26	100.00	93.33	100.00	91.14	100.00	95.79	100%	0.00	95.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.34	20.00	9.33	10.00	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.13		96.12				100.00				
85	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.07	84.98	100.00	100.00	97.78	100.00	95.73	100%	0.00	95.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	17.00	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	96.54		95.69				100.00				
86	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	70.60	100.00	100.00	100.00	99.36	100.00	95.53	100%	0.00	95.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.59	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	85.30		99.84				100.00				
87	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	69.39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.70		100.00				100.00				
88	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	83.62	94.46	100.00	100.00	100.00	95.88	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.54	18.89	10.00	10.00	10.00	23.97				
					Nilai Aspek	91.81		98.62				95.88				
89	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	85.28	98.92	0.00	0.00	87.24	100.00	76.30	80%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	19.78	0.00	0.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.64		93.08				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

90	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	78.93	92.78	100.00	100.00	99.56	100.00	95.35	100%	0.00	95.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.84	18.56	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.47		98.08				100.00				
91	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.79	100.00	100.00	100.00	83.49	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.82	20.00	10.00	10.00	8.35	25.00				
					Nilai Aspek	89.40		95.87				100.00				
92	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	75.52	95.35	100.00	100.00	97.76	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.33	19.07	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	87.76		98.28				100.00				
93	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	73.49	100.00	100.00	100.00	91.28	99.69	95.07	100%	0.00	95.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	20.00	10.00	10.00	9.13	24.92				
					Nilai Aspek	86.75		97.82				99.69				
94	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	99.17	100.00	94.92	100%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	5.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.29				100.00				
95	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	78.97	93.88	100.00	100.00	89.61	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.85	18.78	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.49		95.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

96	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.86	99.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.93		94.87				100.00				
97	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	74.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.18	70%	0.00	94.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.28		100.00				100.00				
98	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	71.32	100.00	88.00	100.00	100.00	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.70	20.00	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.66		97.00				100.00				
99	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	79.65	99.91	100.00	100.00	98.23	90.67	94.42	100%	0.00	94.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.95	19.98	10.00	10.00	9.82	22.67				
					Nilai Aspek	89.83		99.54				90.67				
100	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.39	91.65	100.00	100.00	88.38	100.00	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.06	18.33	10.00	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	90.20		95.01				100.00				
101	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	74.41	99.89	100.00	100.00	80.82	100.00	94.22	100%	0.00	94.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	19.98	10.00	10.00	8.08	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		95.18				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

102	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	71.92	100.00	0.00	0.00	95.78	100.00	75.37	80%	0.00	94.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.79	20.00	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	85.96		97.89				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	72.73	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.91	70%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.91	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.37		100.00				100.00				
104	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	88.89	95.03	80.00	100.00	88.24	100.00	94.16	100%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.01	8.00	10.00	8.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.45		90.82				100.00				
105	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	85.45	86.22	93.33	100.00	97.18	100.00	94.11	100%	0.00	94.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	17.24	9.33	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.73		94.18				100.00				
106	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	74.12	98.73	93.33	92.31	95.95	100.00	94.02	100%	0.00	94.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	19.75	9.33	9.23	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		95.08				100.00				
107	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	100.00	60.00	100.00	97.94	100.00	93.97	100%	0.00	93.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	20.00	6.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	93.93		89.49				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

108	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	92.77	100.00	50.00	100.00	99.43	100.00	93.86	100%	0.00	93.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	5.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.39		87.36				100.00				
109	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	79.43	100.00	0.00	0.00	81.61	100.00	75.08	80%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	20.00	0.00	0.00	8.16	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.81				100.00				
110	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	79.44	100.00	0.00	0.00	80.22	100.00	74.94	80%	0.00	93.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.92	20.00	0.00	0.00	8.02	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.11				100.00				
111	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	76.73	92.89	93.33	100.00	92.43	100.00	93.66	100%	0.00	93.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.51	18.58	9.33	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		94.66				100.00				
112	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	86.36	96.77	100.00	100.00	84.16	90.67	93.39	100%	0.00	93.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.95	19.35	10.00	10.00	8.42	22.67				
					Nilai Aspek	93.18		95.23				90.67				
113	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	90.30	100.00	50.00	100.00	94.27	100.00	92.97	100%	0.00	92.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	20.00	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		86.07				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

114	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	99.67	50.00	100.00	96.54	100.00	65.00	70%	0.00	92.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
115	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	56.25	100.00	100.00	100.00	92.58	100.00	92.70	100%	0.00	92.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.44	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	78.13		98.15				100.00				
116	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	92.90	70.90	100.00	100.00	95.15	100.00	92.63	100%	0.00	92.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	14.18	10.00	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	96.45		91.51				100.00				
117	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	88.01	90.64	60.00	100.00	98.71	100.00	92.20	100%	0.00	92.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.20	18.13	6.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	94.01		87.34				100.00				
118	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	80.59	95.11	66.67	100.00	93.94	100.00	92.17	100%	0.00	92.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	19.02	6.67	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek	90.30		88.93				100.00				
119	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	63.30	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	64.50	70%	0.00	92.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.50	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.65		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

120	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	84.20	97.42	50.00	100.00	100.00	100.00	92.11	100%	0.00	92.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	19.48	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.10		86.86				100.00				
121	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.79	100.00	50.00	100.00	91.30	100.00	92.00	100%	0.00	92.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.87	20.00	5.00	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.90		85.33				100.00				
122	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	75.67	99.61	50.00	100.00	100.00	100.00	91.27	100%	0.00	91.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.35	19.92	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.84		87.40				100.00				
123	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	75.84	99.54	50.00	100.00	97.36	100.00	91.02	100%	0.00	91.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.38	19.91	5.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	87.92		86.73				100.00				
124	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.28	78.39	100.00	98.30	95.44	94.75	90.93	100%	0.00	90.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	15.68	10.00	9.83	9.54	23.69				
					Nilai Aspek	90.64		93.03				94.75				
125	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	85.65	100.00	50.00	100.00	99.60	92.22	90.86	100%	0.00	90.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	20.00	5.00	10.00	9.96	23.06				
					Nilai Aspek	92.83		87.40				92.22				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

126	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	50.00	100.00	77.19	100.00	90.85	100%	0.00	90.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	5.00	10.00	7.72	25.00				
					Nilai Aspek	93.77		81.80				100.00				
127	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	73.17	100.00	50.00	100.00	94.79	100.00	90.45	100%	0.00	90.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.98	20.00	5.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	86.59		86.20				100.00				
128	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	81.45	98.15	50.00	100.00	94.29	100.00	91.28	100%	1.00	90.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.63	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	90.73		85.61				100.00				
129	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	54.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.18	70%	0.00	90.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		100.00				100.00				
130	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	62.64	82.57	100.00	100.00	93.17	100.00	90.23	100%	0.00	90.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.40	16.51	10.00	10.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.32		93.94				100.00				
131	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	79.26	100.00	50.00	100.00	81.86	100.00	90.08	100%	0.00	90.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	5.00	10.00	8.19	25.00				
					Nilai Aspek	89.63		82.97				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

132	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.46	96.46	50.00	100.00	93.02	100.00	89.76	100%	0.00	89.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	19.29	5.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.23		84.87				100.00				
133	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	83.18	65.99	93.33	100.00	97.26	100.00	89.73	100%	0.00	89.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	13.20	9.33	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	91.59		89.14				100.00				
134	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.64	86.67	82.00	98.08	74.10	100.00	89.55	100%	0.00	89.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	17.33	8.20	9.81	7.41	25.00				
					Nilai Aspek	89.32		85.21				100.00				
135	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.50	95.75	0.00	0.00	0.00	93.00	44.73	50%	0.00	89.45
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25				
					Nilai Aspek	88.25		95.75				93.00				
136	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	66.20	99.37	50.00	100.00	95.96	100.00	89.40	100%	0.00	89.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.93	19.87	5.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	83.10		86.33				100.00				
137	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	70.29	100.00	50.00	100.00	86.84	100.00	89.23	100%	0.00	89.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.54	20.00	5.00	10.00	8.68	25.00				
					Nilai Aspek	85.15		84.21				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

138	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.53	61.97	100.00	100.00	100.00	100.00	89.17	100%	0.00	89.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.78	12.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.27		90.49				100.00				
139	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	70.52	99.38	60.00	100.00	94.48	93.00	89.15	100%	0.00	89.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	19.88	6.00	10.00	9.45	23.25				
					Nilai Aspek	85.26		88.47				93.00				
140	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	65.67	100.00	50.00	100.00	92.57	100.00	89.11	100%	0.00	89.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.85	20.00	5.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	82.84		85.64				100.00				
141	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	70.82	72.20	100.00	100.00	98.89	100.00	89.95	100%	1.00	88.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.62	14.44	10.00	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	85.41		92.77				100.00				
142	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	73.29	96.94	50.00	100.00	84.86	100.00	88.87	100%	0.00	88.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.99	19.39	5.00	10.00	8.49	25.00				
					Nilai Aspek	86.65		82.95				100.00				
143	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	93.04	99.66	0.00	0.00	99.28	68.89	71.04	80%	0.00	88.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	19.93	0.00	0.00	9.93	17.22				
					Nilai Aspek	96.52		99.47				68.89				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

144	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	35.27	87.00	100.00	99.28	100.00	85.68	100%	0.00	85.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	7.05	8.70	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		80.39				100.00				
145	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	30.86	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.63	70%	0.00	85.18
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.63	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.43		100.00				100.00				
146	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	71.73	99.96	93.33	100.00	81.07	67.70	85.12	100%	0.00	85.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.76	19.99	9.33	10.00	8.11	16.92				
					Nilai Aspek	85.87		93.59				67.70				
147	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	94.26	38.97	90.00	100.00	91.67	100.00	85.10	100%	0.00	85.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	7.79	9.00	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	97.13		80.16				100.00				
148	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	76.64	54.66	86.00	100.00	88.68	100.00	84.90	100%	0.00	84.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.50	10.93	8.60	10.00	8.87	25.00				
					Nilai Aspek	88.32		82.33				100.00				
149	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	28.92	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.34	70%	0.00	84.77
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.34	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.46		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

150	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	28.84	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.33	70%	0.00	84.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.33	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.42		100.00				100.00				
151	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	28.36	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.25	70%	0.00	84.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.18		100.00				100.00				
152	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	27.89	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.18	70%	0.00	84.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.95		100.00				100.00				
153	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	76.37	41.75	100.00	100.00	97.01	100.00	84.51	100%	0.00	84.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.46	8.35	10.00	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	88.19		84.69				100.00				
154	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	80.00	55.39	78.45	88.80	100.00	85.54	100.00	84.43	100%	0.00	84.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.31	15.69	8.88	10.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	67.70		88.20				100.00				
155	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

156	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				
157	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	62.21	64.61	60.00	100.00	99.81	100.00	83.23	100%	0.00	83.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.33	12.92	6.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	81.11		81.10				100.00				
158	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	80.00	55.08	64.34	84.00	100.00	93.28	100.00	81.86	100%	0.00	81.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.26	12.87	8.40	10.00	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	67.54		85.40				100.00				
159	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.47	57.19	50.00	100.00	100.00	100.00	79.61	100%	0.00	79.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.17	11.44	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.24		76.80				100.00				
160	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	53.74	71.34	93.33	99.64	97.24	68.07	78.37	100%	0.00	78.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.06	14.27	9.33	9.96	9.72	17.02				
					Nilai Aspek	76.87		90.39				68.07				
161	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	30.96	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.64	70%	0.00	78.06
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.64	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.48		75.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

162	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	62.43	54.97	63.33	100.00	63.47	100.00	78.04	100%	0.00	78.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.36	10.99	6.33	10.00	6.35	25.00				
					Nilai Aspek	81.22		70.44				100.00				
163	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	28.14	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.22	70%	0.00	77.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.22	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.07		75.00				100.00				
164	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	27.67	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.15	70%	0.00	77.36
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.15	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.84		75.00				100.00				
165	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	29.59	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.44	70%	0.00	70.63
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.44	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.80		50.00				100.00				
166	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	75.95	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	48.89	70%	0.00	69.85
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	87.98		100.00				30.00				
167	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	41.59	70%	0.00	59.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				30.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

168	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	75.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	70%	0.00	59.08
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	87.86		100.00				0.00				
169	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	47.81	75.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39.67	70%	0.00	56.67
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.17	15.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	73.91		75.00				30.00				
170	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	28.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	70%	0.00	49.07
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.49		100.00				0.00				
171	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	28.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	70%	0.00	48.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.17		100.00				0.00				
172	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				
173	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

174	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	36.36	25.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.95	70%	0.00	39.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.45	5.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	68.18		25.00				30.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.91	97.29	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.89	19.46	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	92.96		99.22				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.95	95.26	100.00	100.00	96.30	100.00	97.02	100%	0.50	96.52
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.34	19.05	10.00	10.00	9.63	25.00				
			Nilai Aspek	94.48		97.89				100.00				
3	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	70.82	100.00	100.00	100.00	99.57	100.00	95.58	100%	0.00	95.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.62	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	85.41		99.89				100.00				
4	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	84.35	98.96	82.80	98.98	95.15	100.00	95.14	100%	0.50	94.64
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.65	19.79	8.28	9.90	9.51	25.00				
			Nilai Aspek	92.18		93.97				100.00				
5	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	98.04	60.00	100.00	97.94	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.18	19.61	6.00	10.00	9.79	25.00				
			Nilai Aspek	93.93		89.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.36	82.22	97.48	99.62	94.93	100.00	93.45	100%	0.00	93.45
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.80	16.44	9.75	9.96	9.49	25.00				
			Nilai Aspek	92.68		93.56				100.00				
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	98.46	60.52	85.06	88.13	100.00	98.21	100.00	89.57	100%	0.00	89.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.85	9.08	17.01	8.81	10.00	9.82	25.00				
			Nilai Aspek	79.49		92.85				100.00				
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.26	72.22	90.48	99.96	98.06	90.87	85.50	100%	0.00	85.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	9.49	14.44	9.05	10.00	9.81	22.72				
			Nilai Aspek	81.63		90.18				90.87				
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	97.78	61.16	65.41	85.50	100.00	93.50	100.00	84.93	100%	0.75	84.18
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.78	9.17	13.08	8.55	10.00	9.35	25.00				
			Nilai Aspek	79.47		86.10				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.76	70.61	82.69	90.82	99.89	96.56	99.91	90.81	100%	0.50	90.31
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.98	10.59	16.54	9.08	9.99	9.66	24.98				
			Nilai Aspek	85.19		92.49				99.91				



LAMPIRAN 8

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI NKPA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Plt. Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Lampiran : Satu berkas

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sutrisno Subagyo

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	91.50	100.00	96.65	84.62	63.65
2	02	Inspektorat Jenderal	85.00	50.00	100.00	100.00	100.00
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	85.83	79.78	96.66	91.01	62.00
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	87.52	77.75	99.55	79.10	76.60
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.31	85.71	99.45	85.64	41.90
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88.53	75.96	100.00	100.00	71.60
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	87.09	61.53	100.00	93.42	95.25
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	98.53	100.00	99.99	98.13	91.45
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.11	75.00	98.48	89.71	88.85

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.01.622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	95,63	100,00	77,78	85,70
2	032.01.632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00
3	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	79,70	87,93	100,00	25,00
4	032.01.690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.01.690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.01.690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.01.690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.01.690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.01.690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.01.690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.01.690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.01.690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.01.690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.01.690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.01.690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.01.690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.01.690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.01.690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.01.690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.01.690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.01.690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.01.690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.01.690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.01.690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.01.690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.01.690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.01.690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.01.690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.01.690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.01.690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.02.622098	INSPEKTORAT JENDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.03.019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	032.03.028172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
3	032.03.039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.03.049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.03.059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
6	032.03.069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI HANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.03.079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.03.089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.03.099325	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.03.109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
11	032.03.119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	032.03.129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
13	032.03.139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
14	032.03.149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.03.159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.03.169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.03.179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
18	032.03.189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.03.199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.03.209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.03.219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.03.229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00
23	032.03.238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	81,52	91,13	95,24	24,30
24	032.03.239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.03.239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	97,00	100,00	100,00	80,00
26	032.03.239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	97,00	100,00	100,00	80,00
27	032.03.239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	94,25	100,00	80,00	75,00
28	032.03.239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	97,00	100,00	100,00	80,00
29	032.03.239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAH	97,00	100,00	100,00	80,00
30	032.03.239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	94,25	100,00	80,00	75,00
31	032.03.239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	94,53	100,00	100,00	63,55
32	032.03.249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
33	032.03.259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.03.269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.03.289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.03.299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.03.309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.03.310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	96,25	100,00	100,00	75,00
39	032.03.319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.03.329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
41	032.03.339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.03.340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
43	032.03.427653	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	92,92	100,00	100,00	52,80
44	032.03.427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	88,14	100,00	50,00	54,25
45	032.03.427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	94,93	100,00	100,00	66,20
46	032.03.427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	90,50	100,00	80,00	50,00
47	032.03.518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	93,57	100,00	100,00	57,15
48	032.03.531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	95,00	100,00	100,00	66,65
49	032.03.537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
50	032.03.537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	93,57	100,00	100,00	57,15
51	032.03.560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	97,00	100,00	100,00	80,00
52	032.03.560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	94,25	100,00	80,00	75,00
53	032.03.623461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBOI	96,67	100,00	66,67	100,00
54	032.03.623475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	86,57	92,31	83,33	60,00
55	032.03.623482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWAHAN	97,00	100,00	100,00	80,00
56	032.03.632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	032.03.633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBANGAN	91,41	100,00	100,00	42,70
58	032.03.633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	90,50	100,00	80,00	50,00

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.04.019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	032.04.028172	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	032.04.039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.04.049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.04.059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.04.069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI HANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.04.079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.04.089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.04.099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.04.109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.04.119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.04.129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.04.139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.04.149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.04.159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.04.169123	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.04.179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.04.189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.04.199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.04.209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.04.219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.04.229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.04.237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	91,76	96,93	83,33	71,50
24	032.04.238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	95,33	100,00	83,33	80,00
25	032.04.239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.04.239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	95,00	100,00	50,00	100,00
27	032.04.249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.04.259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.04.269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.04.289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.04.299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.04.309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.04.319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.04.329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.04.339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.04.340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.04.427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	94,00	100,00	100,00	60,00
38	032.04.445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	95,33	100,00	83,33	80,00
39	032.04.445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	96,92	100,00	100,00	79,45
40	032.04.538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	97,50	100,00	75,00	100,00
41	032.04.567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	97,50	100,00	75,00	100,00
42	032.04.567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	95,00	100,00	50,00	100,00
43	032.04.567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	96,56	100,00	100,00	77,05
44	032.04.567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	94,25	100,00	80,00	75,00
45	032.04.567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	74,99	99,98	0,00	0,00
46	032.04.567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	91,84	98,56	66,67	75,00
47	032.04.567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	97,00	100,00	100,00	80,00
48	032.04.567800	BALAI PENGULJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	72,50	96,67	0,00	0,00
49	032.04.632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	90,91	100,00	75,00	56,05
50	032.04.690966	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
51	032.04.690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
52	032.04.690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
53	032.04.690969	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
54	032.04.691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 54 dari 54 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	032.05.029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	032.05.031665	STASIUN PSDKP CILACAP	90,09	100,00	90,91	40,00	
3	032.05.039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	032.05.049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	032.05.065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	88,76	100,00	72,73	43,25	
6	032.05.089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	032.05.119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	032.05.129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	032.05.159037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	032.05.169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	032.05.170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	84,16	94,12	84,62	34,05	
12	032.05.189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	032.05.199035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	032.05.209033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	032.05.215141	STASIUN PSDKP AMBON	89,50	100,00	100,00	30,00	
16	032.05.219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	032.05.225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	89,77	100,00	72,73	50,00	
18	032.05.239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	032.05.245160	STASIUN PSDKP KUPANG	89,62	100,00	91,67	36,35	
20	032.05.249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	032.05.250263	STASIUN PSDKP BIAK	89,77	100,00	72,73	50,00	
22	032.05.259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	032.05.269028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	032.05.309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	032.05.319033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	032.05.325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	88,26	98,19	91,67	36,35	
27	032.05.329011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	032.05.330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	032.05.355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	89,66	100,00	91,67	36,60	
30	032.05.440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	92,62	99,81	100,00	51,75	
31	032.05.440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	88,78	99,37	75,00	45,00	
32	032.05.440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	90,83	100,00	83,33	50,00	
33	032.05.440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	89,41	100,00	80,00	42,70	
34	032.05.440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	91,36	100,00	100,00	42,40	
35	032.05.449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,58	100,00	80,95	43,25	
36	032.05.690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	032.05.690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	032.05.690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	032.05.690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	032.05.690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	032.05.690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	032.05.690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	032.05.690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	032.05.690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	032.05.690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	032.05.690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	032.05.690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	032.05.690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	032.05.690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	032.05.690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	032.05.690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	032.05.690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	032.05.690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	032.05.690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	032.05.690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	032.05.690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	032.05.690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	032.05.690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	032.05.690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	032.05.690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

61	032.05.690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
62	032.05.690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	032.05.690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
64	032.05.690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
65	032.05.690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	032.05.691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
67	032.05.691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
68	032.05.691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
69	032.05.691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 69 dari 69 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.06.427586	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	100,00	100,00	100,00	100,00
2	032.06.621131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,23	100,00	100,00	61,55
3	032.06.691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.06.691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.06.691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.06.691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.06.691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.06.691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.06.691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.06.691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.06.691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.06.691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.06.691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.06.691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.06.691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.06.691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.06.691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.06.691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.06.691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.06.691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.06.691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.06.691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.06.691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.06.691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.06.691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.06.691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.06.691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.06.691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.06.691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.06.691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.06.691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.06.691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.06.691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.06.691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.06.691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.06.691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 36 dari 36 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.07.290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	98,33	100,00	83,33	100,00
2	032.07.477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	97,86	100,00	100,00	85,70
3	032.07.477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANK	98,57	100,00	85,71	100,00
4	032.07.477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.07.477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	98,57	100,00	85,71	100,00
6	032.07.477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	99,24	100,00	100,00	94,95
7	032.07.499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00
8	032.07.499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.07.623145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	98,68	100,00	100,00	91,20
10	032.07.691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.07.691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.07.691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.07.691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.07.691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.07.691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.07.691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.07.691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.07.691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.07.691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.07.691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.07.691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.07.691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.07.691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.07.691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.07.691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.07.691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.07.691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.07.691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.07.691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.07.691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.07.691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.07.691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.07.691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.07.691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.07.691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.07.691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.07.691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.07.691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.07.691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.07.691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.07.691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.07.691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
43	032.07.691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 43 dari 43 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.12.237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	92,50	100,00	100,00	50,00
2	032.12.238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
3	032.12.238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.12.238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.12.238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	100,00	100,00	100,00	100,00
6	032.12.239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
7	032.12.239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
8	032.12.352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBII (AK KP WAKATOBII)	84,42	99,22	100,00	0,00
9	032.12.403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESIRIS	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.12.403830	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	100,00	100,00	100,00	100,00
11	032.12.403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	032.12.403823	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
13	032.12.403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
14	032.12.403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.12.403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.12.403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.12.403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
18	032.12.403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.12.403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.12.403832	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.12.403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.12.403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
23	032.12.403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
24	032.12.403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.12.403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	92,50	100,00	100,00	50,00
26	032.12.403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.12.403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.12.403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	90,00	100,00	100,00	33,35
29	032.12.403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	75,00	100,00	0,00	0,00
30	032.12.427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	92,50	100,00	100,00	50,00
31	032.12.427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	100,00	100,00	100,00	100,00
32	032.12.427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
33	032.12.427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00
34	032.12.427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	92,50	100,00	100,00	50,00
35	032.12.427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	100,00	100,00	100,00	100,00
36	032.12.440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.12.622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	100,00	100,00	100,00	100,00
38	032.12.626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,48	100,00	87,50	71,50
39	032.12.634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	75,00	100,00	0,00	0,00
40	032.12.652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
41	032.12.653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	100,00	100,00	100,00	100,00
42	032.12.691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 42 dari 42 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.13.427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	95,00	100,00	50,00	100,00
2	032.13.427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	92,50	100,00	100,00	50,00
3	032.13.427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.13.427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.13.427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	97,23	96,30	100,00	100,00
6	032.13.440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	100,00	87,50	71,45
7	032.13.567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00
8	032.13.567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.13.567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.13.567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00
11	032.13.567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	75,00	100,00	0,00	0,00
12	032.13.567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	99,83	99,77	100,00	100,00
13	032.13.567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	90,00	50,00	100,00
14	032.13.567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.13.567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.13.645693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANULJU	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.13.649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	95,00	100,00	100,00	66,65
18	032.13.649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.13.649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.13.649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIH	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.13.649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.13.649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	67,48	69,03	66,67	60,25
23	032.13.649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	92,50	100,00	100,00	50,00
24	032.13.649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.13.649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00
26	032.13.649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.13.649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.13.649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	92,51	96,68	50,00	100,00
29	032.13.649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	95,00	100,00	50,00	100,00
30	032.13.649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	100,00	100,00	100,00	100,00
31	032.13.649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	100,00	100,00	100,00	100,00
32	032.13.649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	93,18	90,91	100,00	100,00
33	032.13.649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
34	032.13.649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	92,50	100,00	100,00	50,00
35	032.13.649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
36	032.13.649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.13.662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 37 dari 37 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya



LAMPIRAN 9

DATA DUKUNG CAPAIAN LAPORAN SPIP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.110/BKKPN/TU.140/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024

Yth. 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelutan dan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengeloaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B B.73/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 Perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaran SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk Triwulan IV tahun 2024 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP> dan <https://bit.ly/EvalMR2024>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN IV SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan IV tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 9 Januari 2025

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Imam Fauzi

Ringkasan Eksekutif

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di BKKPN Kupang Sekretariat mengacu pada SPI Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berupaya untuk mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan Manajemen Risiko (MR). Pengendalian rutin yang dilakukan di pengelolaan organisasi, pengelolaan PNPB, pengelolaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kinerja, pengelolaan akuntansi dan pelaporan, dan pengelolaan kerugian negara. Sedangkan pengendalian berkala dilakukan pada sumber daya manusia, penyusunan anggaran, barang dan jasa, barang milik negara, dan penyerapan anggaran. Pengendalian dengan pendekatan MR dilaksanakan pada kegiatan yang beresiko tinggi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pengendalian Rutin yang dilakukan pada Periode TW IV 2024 adalah: (1) Pengelolaan Organisasi, (2) Pengelolaan Perencanaan yang dilakukan dengan revisi halaman IV DIPA untuk memaksimalkan nilai IKPA, (3) Pengelolaan PNPB yang telah dengan aplikasi layanan yang telah terintegrasi dengan Simponi, (4) penetapan pejabat pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan laporan keuangan dan BMN untuk memisahkan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban (5) Monitoring Aktivitas dan Pemanfaatan Kesesuaian zonasi (MAPKZ).

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu. Pengendalian berkala yang dilakukan adalah: (1) Identifikasi progress pelaksanaan pengadaan Tahun 2024 meskipun dalam perencanaan tidak ada tender dan Pelaksanaan Kontrak Sertifikasi ISO 37001, (2) Identifikasi permasalahan BMN khususnya pencatatan Hibah dari Pemda, (3) Identifikasi deviasi capaian realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana yang masih batas normal dengan deviasi dibawah 5%.

Pengendalian dengan pendekatan MR dilakukan atas kegiatan yang beresiko tinggi pada periode TW IV telah disusun matriks MR untuk Pengendalian Risiko: (1) Pengadaan Kompak yaitu melakukan pendampingan dan monitoring pemanfaatan bantuan (2) Inisiasi Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan, realisasi pemantauan yaitu Monev Implementasi Kemitraan dan kedatangan kemitraan antara BKKPN Kupang dengan YEKHALI. (3) Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut yaitu sosialisasi pemanfaatan ruang laut untuk beberapa wilayah di TNP laut sawu. Untuk

Kegiatan Workshop sosial ekonomi masyarakat yang bersumber dari PLN (LUTRA) 2024 telah dilakukan pemantaun untuk pengendalian risiko berupa penetapan pelaksana kegiatan, penetapan dokumen pengadaan serta validasi kelengkapan dokumen pembayaran.

Pengendalian MR KKN dalam rangka Pembangunan integritas pada kantor BKKPN Kupang dengan pengedalin yaitu identifikasi penilaian dan pemantauan (1) kegiatan Pelayanan penerbitan Karcis/Tanda Masuk Kawasan Konservasi, (2) Pengadaan Kompak (3) Pengadaan Barang/Jasa.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi dan penyusunan laporan SPIP pada BKKPN Kupang selama periode TW IV 2024 belum ada.

Penyampaian Laporan Sistem pengendalian Internal (SPIP) bulanan merupakan gambaran pelaksanaan implementasi pengendalian resiko yang dilaksanakan pada Periode TW IV 2024 dan Pelaksanaan SPIP di Lingkungan BKKPN Kupang sangat diperlukan dalam penerapan MR dan pengendaliannya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.593/BKKPN/TU.140/IV/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan SPIP Triwulan I 2025

15 April 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.60/DJPK.1/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Laporan SPIP Triwulan I tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk triwulan I tahun 2025 sebagaimana terlampir

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN I SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan I tahun 2025 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 14 April 2025

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Ringkasan Eksekutif

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di BKKPN Kupang Sekretariat mengacu pada SPI Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berupaya untuk mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan Manajemen Risiko (MR). Pengendalian rutin yang dilakukan di pengelolaan organisasi, pengelolaan PNPB, pengelolaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kinerja, pengelolaan akuntansi dan pelaporan, dan pengelolaan kerugian negara. Sedangkan pengendalian berkala dilakukan pada sumber daya manusia, penyusunan anggaran, barang dan jasa, barang milik negara, dan penyerapan anggaran. Pengendalian dengan pendekatan MR dilaksanakan pada kegiatan yang beresiko tinggi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pengendalian Rutin yang dilakukan pada Periode tw 1 tahun 2025 adalah: (1) Pengelolaan Organisasi yaitu telah dilakukan reviu dan pembahasan serta penyesuaian SOP, (2) Pengelolaan Perencanaan yang dilakukan dengan revisi DIPA, penyesuaian halaman III DIPA untuk memaksimalkan nilai IKPA, (3) Pengelolaan PNPB yang telah dengan aplikasi layanan yang telah terintegrasi dengan Simponi, penyampaian LPJ setiap bulan dan konfirmasi serta rekon PNPB, (4) penetapan pejabat pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan penyusun laporan keuangan dan BMN untuk memisahkan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban.

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu. Pengendalian berkala yang dilakukan adalah: (1) Identifikasi progress pelaksanaan pengadaan Tahun 2025 meskipun dalam perencanaan tidak ada tender, pengadaan melalui ekatalog dan pengadaan langsung berupa perpanjangan kontrak sewa kator dan gerai pelanangan, (2) Identifikasi pengendalian BMN khususnya pencatatan Hibah dari Pemda dan usulan status pengadaan, (3) pengendalian kinerja dalam penerapan bsc yaitu penyusunan dan penetapan matriks peran hasil untuk perencanaan SKP dan matriks penyusunan capaian kinerja tw 1 tahun 2025.

Pengendalian dengan pendekatan MR dilakukan atas kegiatan yang beresiko tinggi seperti Kegiatan Lautra yang terdiri atas Masterplan Sarana Prasarana

Pengelolaan Kawasan Konservasi/Menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi/Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Pengelola pada masing-masing kawasan tidak terlibat dalam pembahasan laporan pendahuluan/antara/akhir. Kegiatan Mengelola Kawasan Konservasi dengan Efektif/Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Survei lapangan yang tidak dapat dilakukan. Kegiatan Pemetaan pemangku kepentingan dan pengembangan proyek kemitraan Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko dokumen tidak segera ditindaklanjuti/disahkan.

Pada tw 1 2025 ketiga kegiatan laura tersebut belum ada aktivitas pengendalian yang dilakukan. Akibat adanya proses efisiensi di tw 1 menyebabkan kegiatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian khususnya anggaran.

MR untuk kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang telah diidentifikasi untuk pemantauan pengendalian melalui MR, Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Informasi yang disampaikan belum lengkap. Pada tw 1 2025 ketiga kegiatan yang bersumber dari PNPB tersebut belum ada aktivitas pengendalian yang dilakukan. Akibat adanya proses efisiensi di tw 1 menyebabkan kegiatan tersebut perlu dipertimbangkan karena anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut diblokir.

Untuk mendukung pelaksanaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BKKPN Kupang menuju Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) maka dalam pokja penguatan pengawasan prioritas pada pelayanan publik yang efektif dan efisien serta pengadaan barang dan jasa yang transparan.

Untuk itu pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan identifikasi risiko pada 2 kegiatan, yaitu : MR kegiatan Penerbitan karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan dan tanda masuk Kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian dan Pendidikan. Untuk identifikasi risiko aktivitas tersebut telah ditetapkan dengan kemungkinan dan dampak yang di mungkinkan terjadi yaitu risiko Pungutan liar untuk memproses ketidaksesuaian dokumen saat verifikasi. Untuk rencana pengendalian risiko dan waktu pengendalian serta pemantauan pengendalian akan dilaksanakan pada tw 2 tahun 2025.

Kegiatan MR KKN lainnya adalah kegiatan pengadaan barang dan Jasa dimana identifikasi risiko aktivitas tersebut telah ditetapkan dengan kemungkinan dan dampak yang di mungkinkan terjadi masuk yaitu risiko HPS tidak sesuai dengan harga pasar.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi dan penyusunan laporan SPIP pada BKKPN Kupang selama periode tw1 2025 adalah adanya efisiensi sehingga pemantauan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat dilaksanakan. Rencana pemecahan masalah adalah akan dilakukan penyesuaian baik pada anggaran, rencana maupun jadwal pengendalian risiko.

Penyampaian Laporan Sistem pengendalian Internal (SPIP) bulanan merupakan gambaran pelaksanaan implementasi pengendalian risiko yang dilaksanakan pada bulan tw 1 2025 dan Pelaksanaan SPIP di Lingkungan BKKPN Kupang sangat diperlukan dalam penerapan MR dan pengendaliannya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.1242/BKKPN/TU.140/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Laporan SPIP Triwulan II 2025

14 Juli 2025

Yth.

1. Direktur Jenderal Pengeloaan Kelautan
2. Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Pengelolaan Kelautan di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.1020/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 tetang Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk triwulan II tahun 2025 sebagaimana terlampir dan dalam bentuk softcopy pada tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN II SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan II tahun 2025 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 14 Juli 2025
Kepala BKKPN Kupang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Imam Fauzi

Ringkasan Eksekutif

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di BKKPN Kupang Sekretariat mengacu pada SPI Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berupaya untuk mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan Manajemen Risiko (MR). Pengendalian rutin yang dilakukan di pengelolaan organisasi, pengelolaan PNBP, pengelolaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kinerja, pengelolaan akuntansi dan pelaporan, dan pengelolaan kerugian negara. Sedangkan pengendalian berkala dilakukan pada sumber daya manusia, penyusunan anggaran, barang dan jasa, barang milik negara, dan penyerapan anggaran. Pengendalian dengan pendekatan MR dilaksanakan pada kegiatan yang beresiko tinggi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pengendalian Rutin yang dilakukan pada Periode TW II tahun 2025 adalah: (1) Pengelolaan Organisasi yaitu telah dilakukan reviu dan pembahasan serta penyesuaian SOP, (2) Pengelolaan Perencanaan yang dilakukan dengan revisi DIPA, penyesuaian halaman III DIPA untuk memaksimalkan nilai IKPA, (3) Pengelolaan PNBP yang telah dengan aplikasi layanan yang telah terintegrasi dengan Simponi, penyampaian LPJ setiap bulan dan konfirmasi serta rekon PNBP, (4) penetapan pejabat pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan penyusun laporan keuangan dan BMN untuk memisahkan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban.

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu. Pengendalian berkala

yang dilakukan adalah: (1) Identifikasi progress pelaksanaan pengadaan Tahun 2025 meskipun dalam perencanaan tidak ada tender, pengadaan melalui katalog dan pengadaan langsung berupa perpanjangan kontrak sewa kator dan gerai pelanaran, (2) Identifikasi pengendalian BMN khususnya pencatatan Hibah dari Pemda dan usulan status pengadaan, (3) pengendalian kinerja dalam penerapan bsc yaitu penyusunan dan penetapan matriks peran hasil untuk perencanaan SKP dan matriks penyusunan capaian kinerja TW II tahun 2025.

Pengendalian dengan pendekatan MR dilakukan atas kegiatan yang beresiko tinggi seperti Kegiatan Lautra yang terdiri atas Masterplan Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan Konservasi/Menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi/Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Pengelola pada masing-masing kawasan tidak terlibat dalam pembahasan laporan pendahuluan/antara/akhir. Kegiatan Mengelola Kawasan Konservasi dengan Efektif/Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Survei lapangan yang tidak dapat dilakukan. Kegiatan Pemetaan pemangku kepentingan dan pengembangan proyek kemitraan Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko dokumen tidak segera ditindaklanjuti/disahkan.

Pada TW II 2025 ketiga kegiatan lautra tersebut belum ada aktivitas pengendalian yang dilakukan. Akibat adanya proses efisiensi di TW II menyebabkan kegiatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian khususnya anggaran.

MR untuk kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang telah diidentifikasi untuk pemantauan pengendalian melalui MR, Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Informasi yang disampaikan belum lengkap.

Pada TW II 2025 kegiatan yang bersumber dari PNPB tersebut belum ada aktivitas pengendalian yang dilakukan. Akibat adanya proses efisiensi di tw 1 menyebabkan kegiatan tersebut perlu dipertimbangkan karena anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut diblokir.

Untuk mendukung pelaksanaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BKKPN Kupang menuju Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM)

maka dalam pokja penguatan pengawasan prioritas pada pelayanan public yang efektif dan efisien serta pengadaan barang dan jasa yang trnsparan.

Untuk itu pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan identifikasi risiko pada 2 kegiatan, yaitu : MR kegiatan Penerbitan karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan dan tanda masuk Kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian dan Pendidikan. Untuk identifikasi risiko aktivitas tersebut telah ditetapkan dengan kemungkinan dan dampak yang di mungkinkan terjadi yaitu risiko Pungutan liar untuk memproses ketidaksesuaian dokumen saat verifikasi. Untuk rencana pengendalian risiko dan waktu pengendalian serta pemantauan pengendalian akan dilaksanakan pada tw 2 tahun 2025.

Kegiatan MR KKN lainnya adalah kegiatan pengadaan barang dan Jasa dimana identifikasi risiko aktivitas tersebut telah ditetapkan dengan kemungkinan dan dampak yang di mungkinkan terjadi masuk yaitu risiko HPS tidak sesuai dengan harga pasar.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi dan penyusunan laporan SPIP pada BKKPN Kupang selama periode tw1 2025 adalah adanya efisensi sehingga pemantaun yang telah ditetapkan sebleumnya vbelum dapat dilaksanakan. Rencana pemecahan masalah adalah akan dilkukan penyesuaian baik pada anggran, rencana maupun jadwal pengendalian risiko.

Penyampaian Laporan Sistem penegendalian Internal (SPIP) bulanan merupakan gambaran pelaksanaan implementasi pengendalian resiko yang dilaksanakan pada bulan TW II 2025 dan Pelaksanaan SPIP di Lingkungan BKKPN Kupang sangat diperlukan dalam penerapan MR dan pengendaliannya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2322/BKKPN/TU.140/X/2025 15 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan SPIP Triwulan III 2025

Yth. 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Pengelolaan Kelautan
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.2428/DJPK.1/TU.210/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan Laporan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk triwulan III tahun 2025 sebagaimana terlampir dan dalam bentuk softcopy pada tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN III SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan III tahun 2025 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 12 Oktober 2025

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Imam Fauzi

Ringkasan Eksekutif

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di BKKPN Kupang Sekretariat mengacu pada SPI Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berupaya untuk mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan SPIP meliputi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan Manajemen Risiko (MR). Pengendalian rutin yang dilakukan di pengelolaan organisasi, pengelolaan PNPB, pengelolaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kinerja, pengelolaan akuntansi dan pelaporan, dan pengelolaan kerugian negara. Sedangkan pengendalian berkala dilakukan pada sumber daya manusia, penyusunan anggaran, barang dan jasa, barang milik negara, dan penyerapan anggaran. Pengendalian dengan pendekatan MR dilaksanakan pada kegiatan yang beresiko tinggi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pengendalian Rutin yang dilakukan pada Periode TW III tahun 2025 adalah: 1) Pengelolaan Organisasi yaitu telah dilakukan reviu dan pembahasan serta penyesuaian SOP, 2) Pengelolaan Perencanaan yang dilakukan dengan revisi DIPA, penyesuaian halaman III DIPA untuk memaksimalkan nilai IKPA, 3) Pengelolaan PNPB yang telah dengan aplikasi layanan yang telah terintegrasi dengan Simponi, penyampaian LPJ setiap bulan dan konfirmasi serta rekon PNPB, 4) penetapan pejabat pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan laporan keuangan dan BMN untuk memisahkan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban.

Pengendalian Berkala adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu. Pengendalian berkala yang dilakukan adalah: (1) Identifikasi progress pelaksanaan pengadaan Tahun 2025 meskipun dalam perencanaan tidak ada tender, pengadaan melalui e-katalog dan pengadaan langsung berupa perpanjangan kontrak sewa kator dan gerai pelanangan, (2) Identifikasi pengendalian BMN khususnya pencatatan Hibah dari Pemda dan usulan status pengadaan, (3) pengendalian kinerja dalam penerapan bsc yaitu penyusunan dan penetapan matriks peran hasil untuk perencanaan SKP dan matriks penyusunan capaian kinerja TW III tahun 2025.

Pengendalian dengan pendekatan MR dilakukan atas kegiatan yang beresiko tinggi seperti Kegiatan Lautra yang terdiri atas Masterplan Sarana Prasarana

Pengelolaan Kawasan Konservasi/Menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi/Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Pengelola pada masing-masing kawasan tidak terlibat dalam pembahasan laporan pendahuluan/antara/akhir. Kegiatan Mengelola Kawasan Konservasi dengan Efektif/Infrastruktur dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Survei lapangan yang tidak dapat dilakukan. Kegiatan Pemetaan pemangku kepentingan dan pengembangan proyek kemitraan Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko dokumen tidak segera ditindaklanjuti/disahkan.

Pada TW III 2025 terdapat 2 kegiatan laura tersebut belum ada aktivitas pengendalian yang dilakukan. MR untuk kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang telah diidentifikasi untuk pemantauan pengendalian melalui MR, Kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi yaitu risiko Informasi yang disampaikan belum lengkap.

Pada TW III 2025 kegiatan yang bersumber dari PNPB tersebut belum ada aktivitas pengendalian yang dilakukan. Akibat adanya perubahan organisasi Dimana kegiatan tersebut bagian dari kegiatan yang dialihkan ditjen PRL

Untuk mendukung pelaksanaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) BKKPN Kupang menuju Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) maka dalam pokja penguatan pengawasan prioritas pada pelayanan public yang efektif dan efisien serta pengadaan barang dan jasa yang transparan.

MR kegiatan Penerbitan karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan dan tanda masuk Kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian dan Pendidikan. Untuk identifikasi risiko aktivitas tersebut telah ditetapkan dengan kemungkinan dan dampak yang di mungkinkan terjadi yaitu risiko Pungutan liar untuk memproses ketidaksesuaian dokumen saat verifikasi. Untuk rencana pengendalian risiko dan waktu pengendalian serta pemantauan pengendalian akan dilaksanakan pada tw 2 tahun 2025.

Kegiatan MR KKN lainnya adalah kegiatan pengadaan barang dan Jasa dimana identifikasi risiko aktivitas tersebut telah ditetapkan dengan kemungkinan dan dampak yang di mungkinkan terjadi masuk yaitu risiko HPS tidak sesuai dengan harga pasar.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi dan penyusunan laporan SPIP pada BKKPN Kupang selama periode tw2 2025 adalah adanya efisensi sehingga pemantaun yang telah ditetapkan sebelumnya vbelum dapat dilaksanakan. Rencana pemecahan masalah adalah akan dilkukan penyesuaian baik pada anggran, rencana maupun jadwal pengendalian risiko.

Penyampaian Laporan Sistem penegendalian Internal (SPIP) bulanan merupakan gambaran pelaksanaan implementasi pengendalian resiko yang dilaksanakan pada bulan TW III 2025 dan Pelaksanaan SPIP di Lingkungan BKKPN Kupang sangat diperlukan dalam penerapan MR dan pengendaliannya dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien



LAMPIRAN 10

DATA DUKUNG CAPAIAN INDEKS

PROFESIONALITAS ASN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Yth. 1. Direktur lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
2. Kepala UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan

Di Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor : 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, bersama ini di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 31 Desember 2025, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, yaitu sebesar **86,84** (kategori tinggi) terdiri dari :
 - a. Kualifikasi sebesar 22,49;
 - b. Kompetensi sebesar 33,16;
 - c. Kinerja sebesar 26,2;
 - d. Disiplin sebesar 4,99.
2. Prosentase hasil diatas sebesar **108,55%** melebihi target Semester II Tahun 2025 sebesar 80 (kategori Tinggi), sehingga capaian seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan di awal tahun (rekap detail terlampir).
3. Target tahunan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tahun 2026 telah ditetapkan, untuk **Semester I** sebesar **77** dan **Semester II** sebesar **81**. Berkenaan dengan hal tersebut kiranya Saudara dapat mendorong para pegawai untuk melakukan peningkatan Kualifikasi, Kinerja, Disiplin dan Kompetensi terutama komponen Diklat 20 JP (PNS) dan 24 JP (PPPK) baik yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi yang sifatnya menunjang tugas fungsi pegawai.
4. Hasil Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Sekretaris Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/BBM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga **BKN sudah tidak melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN**, dikarenakan penerapan **Manajemen Talenta** dimana adanya penggabungan IP ASN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini menjadikan IKU IP ASN di Lingkungan KKP tidak dapat menjadi Output Kendali Rendah karena penilaian IP ASN secara mandiri di KKP, tetapi sumber database pengukuran IP ASN KKP tetap dari database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN.
 - b. IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), dan Disiplin (bobot 5), dari ke empat dimensi terdapat unsur yang sangat memegang peran penting yaitu Penilaian Kinerja/SKP, karena **predikat SKP** akhir periode (tahun sebelumnya) **dihitung 2 (dua)** kali, pada dimensi Kinerja (bobot 30) dan pada dimensi Kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN, sebagai berikut:
 - 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah **predikat SKP** di aplikasi eKinerja BKN sudah **sinkronisasi** ke aplikasi **SIASN** BKN;
 - 2) input data **riwayat kinerja** di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai **pindahan** dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN;
 - 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi **wajib** di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN.
 - c. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25 dengan melihat level jabatan (struktural, Fungsional Ahli dan Terampil, dan pelaksana) yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya monitoring dari pengelola data SIASN untuk verifikasi data jabatan terakhir dan data riwayat pendidikan, saat ini seluruh ASN di lingkungan KKP dapat melihat kondisi data profile pribadi dan data riwayat pribadinya serta kelengkapan data dokumen elektroniknya pada **Portal Pegawai** di aplikasi Portal KKP.
5. Upaya Optimalisasi dan menghindari trafik sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, untuk :
- a. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya pada **awal triwulan IV 2026** untuk mengupdate data pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil serta diklat teknis dan diklat 20 JP bagi

- PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK;
- b. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada **aplikasi i-dis** BKN di lingkungan KKP;
 - c. melakukan **pendataan** dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang **tidak memiliki predikat SKP** tahun 2025;
 - d. updating data **pencantuman gelar** bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Lampiran Surat
 Nomor : B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026
 Tanggal : 12 Januari 2026

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester II Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,04	28,66	24,67	5	81,58
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,78	33,62	25	5	86,4
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,55	32,1	25	5	85,65
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,52	28,93	25,91	5	83,36
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,67	30	26,33	5	85
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,03	31,36	26,45	5	85,83
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,75	35,18	27,11	5	89,04
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,93	34,73	24,77	5	86,43
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,5	34,52	27,8	5	89,82
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,94	34,5	25,41	5	86,85
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,79	34,02	25,18	5	85,98
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,49	34,68	26,28	4,91	87,36
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22,18	37,05	27,82	5	92,05
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,5	33,42	27,5	5	88,42

Keterangan :

Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/>

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Miftahul Huda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 8/SJ.3/TU.210/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II
Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026
Tanggal : 04 Januari 2026

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP di Portal Pegawai yang berbasis data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)/MyASN tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. **Capaian IKU IP ASN** di lingkungan **KKP** Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar **86,03** (kategori **Tinggi**) terdiri dari kualifikasi 22,63, kompetensi 32,88, kinerja 25,53, dan disiplin 4,99. Target sebesar **82** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **104,91%** (melebihi target), terlampir nilai detail pada lampiran;
2. **Capaian IKU IP ASN** di lingkup **Sekretariat Jenderal** Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar **88,37** (kategori **Tinggi**) terdiri dari kualifikasi 22,71, kompetensi 34,47, kinerja 26,18; dan disiplin 5. Target sebesar **82** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **107,7%** (melebihi target), terlampir nilai detail pada lampiran;
3. Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga **BKN sudah tidak**

melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dikarenakan penerapan **Manajemen Talenta** dimana adanya penggabungan IP ASN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini menjadikan IKU IP ASN di Lingkungan KKP tidak dapat menjadi Output Kendali Rendah karena penilaian IP ASN secara mandiri di KKP, tetapi sumber database pengukuran IP ASN KKP tetap dari database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN;

- b. IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), dan Disiplin (bobot 5), dari ke empat dimensi terdapat unsur yang sangat memegang peran penting yaitu Penilaian Kinerja/SKP, karena **predikat SKP** akhir periode (tahun sebelumnya) **dihitung 2 (dua)** kali, pada dimensi Kinerja (bobot 30) dan pada dimensi Kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN, sebagai berikut:
 - 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah **predikat SKP** di aplikasi eKinerja BKN sudah **sinkronisasi** ke aplikasi **SIASN** BKN;
 - 2) input data **riwayat kinerja** di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai **pindahan** dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN;
 - 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi **wajib** di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN.
- c. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25 dengan melihat level jabatan (struktural, Fungsional Ahli dan Terampil, dan pelaksana) yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya monitoring dari pengelola data SIASN untuk verifikasi data jabatan terakhir dan data riwayat pendidikan, saat ini seluruh ASN di lingkungan KKP dapat melihat kondisi data profile pribadi dan data riwayat pribadinya serta kelengkapan data dokumen elektroniknya pada **Portal Pegawai** di aplikasi Portal KKP

4. Upaya Optimalisasi dan menghindari *trafik* sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, sebagai berikut:
- a. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya pada **awal triwulan IV 2026** untuk mengupdate data pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil serta diklat teknis dan diklat 20 JP bagi PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK,
 - b. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada **aplikasi i-dis** BKN di lingkungan KKP;
 - c. melakukan **pendataan** dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang **tidak memiliki predikat SKP** tahun 2025;
 - d. updating data **pencantuman gelar** bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

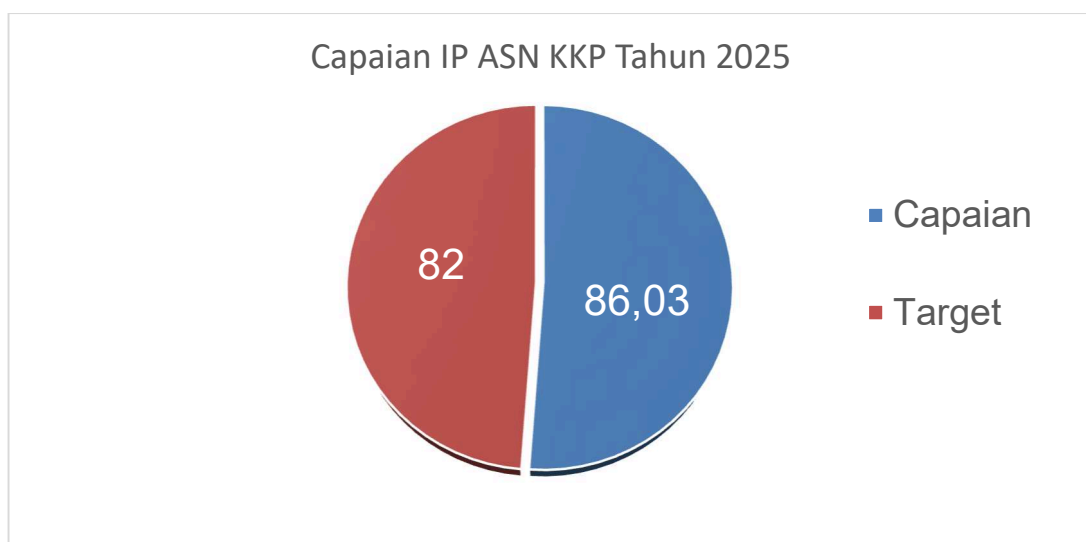
Lampiran

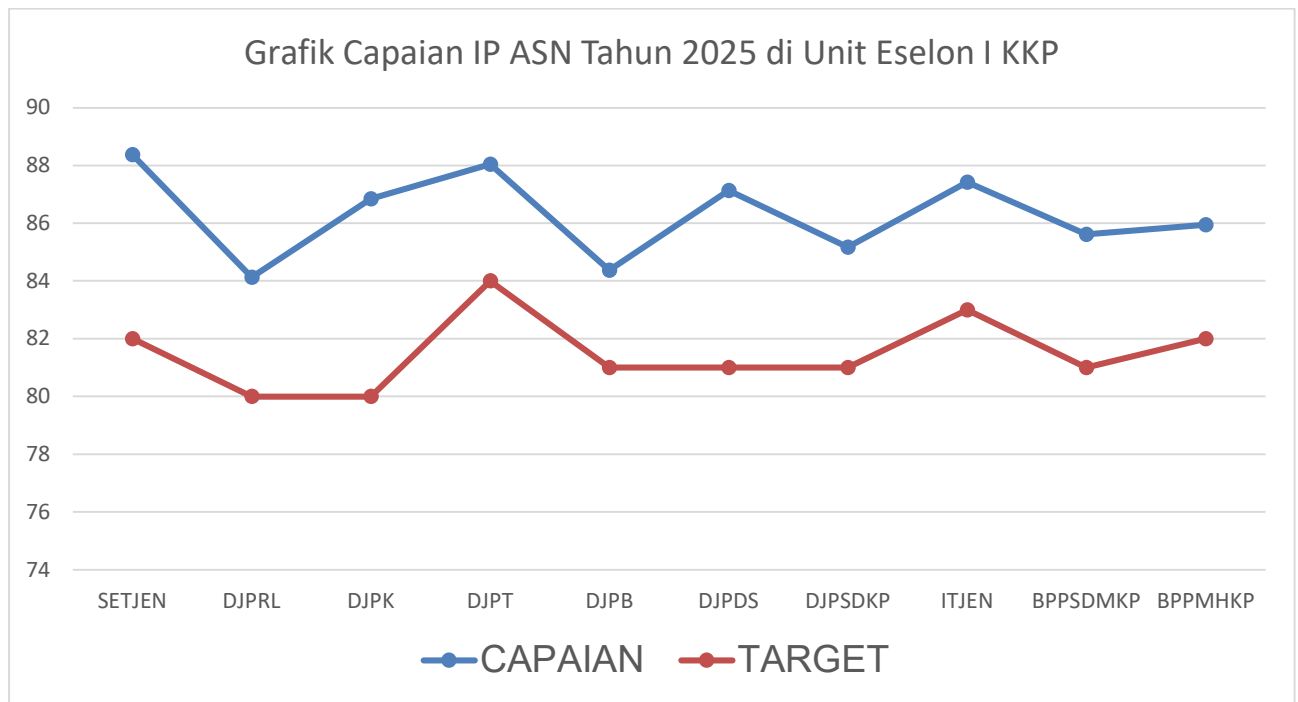
Nomor : 8/SJ.3/TU.140/I/2026

Tanggal : 04 Januari 2026

1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No.	Unit	Tahun 2025			Target 2026		
		Capaian	Target	Prosentase (%)	Periode Pengukuran	Semester I	Semester II/ Akhir Tahun
1	Setjen	88,37	82	107,76	Semesteran	75	82,5
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	84,13	80	105,16	Semesteran	77	81
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	86,84	80	108,55	Semesteran	77	81
4	Ditjen Perikanan Tangkap	88,04	84	104,80	Semesteran	77	84,5
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	84,37	81	104,16	Semesteran	74	81,5
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	87,13	81	107,56	Semesteran	74	81,5
7	Ditjen PSDKP	85,17	81	105,14	Semesteran	74	81,5
8	Inspektorat Jenderal	87,42	83	105,32	Semesteran	76	83,5
9	BPPSDMKP	85,61	81	105,69	Semesteran	74	81,5
10	BPPMHKP	85,94	82	104,74	Semesteran	75	82,5
	IPASN KKP	86,03 (Tinggi)	82 (Tinggi)	104,91	Semesteran	75,3 (Sedang)	82,5 (Tinggi)





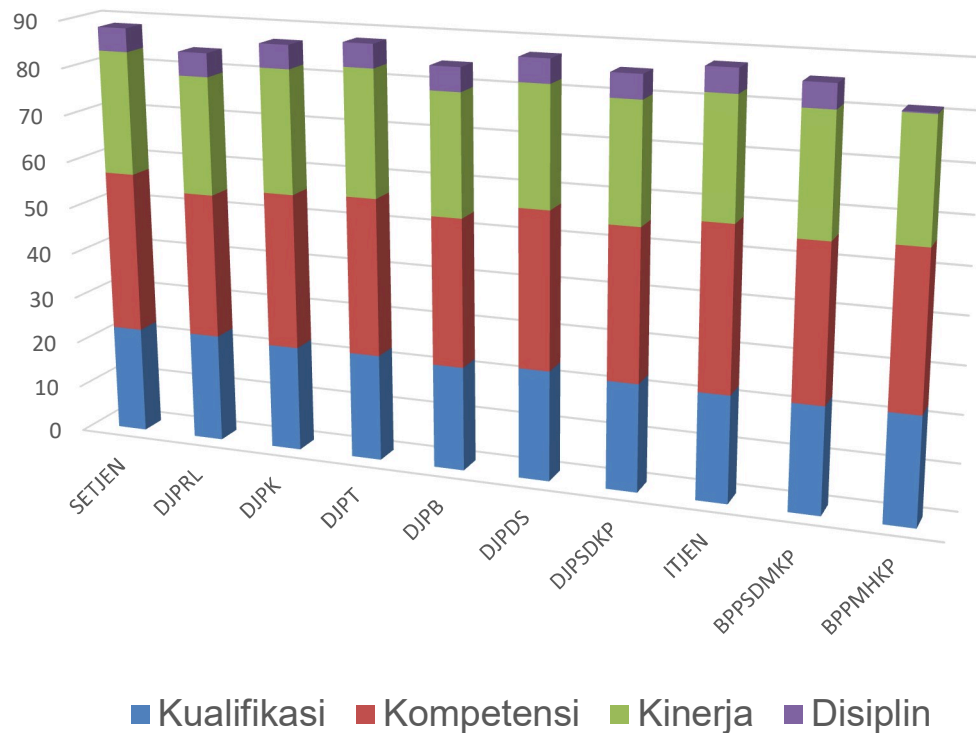
2. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	22,71	34,47	26,18	5	88,27
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	23,1	31	25,04	5	84,13
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	22,49	33,16	26,2	4,99	86,84
4	Ditjen Perikanan Tangkap	22,7	33,59	26,76	4,99	88,04
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	22,18	31,52	25,68	5	84,37
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	23,45	33,46	25,22	5	87,13
7	Ditjen PSDKP	22,84	32,24	25,1	4,99	85,17
8	Inspektorat Jenderal	22,59	34,68	25,15	5	87,42
9	BPPSDMKP	22,54	32,87	25,2	4,99	85,61
10	BPPMHKP	22,85	33,01	25,1	4,98	85,94
	Total	22,63	32,88	25,53	4,99	86,04 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah ASN yang dihitung sesuai ketentuan sebesar 11.887 ASN KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK 2025. Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.

Grafik IP ASN KKP Tahun 2025 berdasarkan
Dimensi Pengukuran

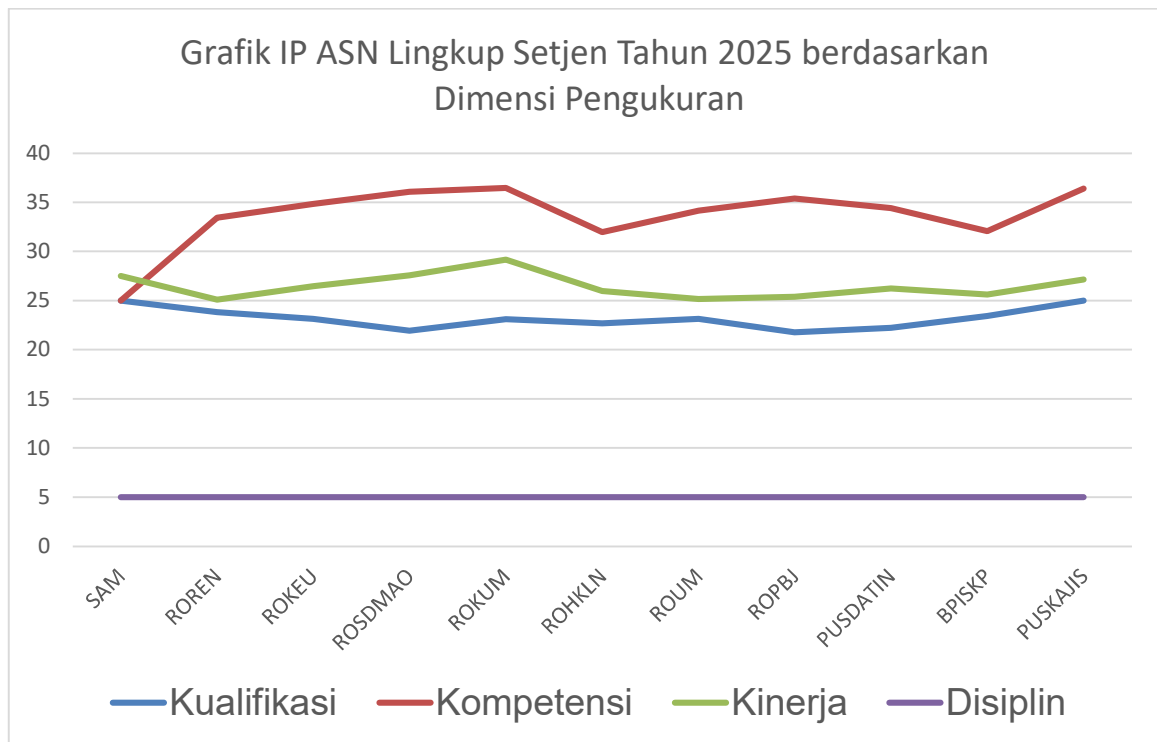


3. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
	Total	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 547 ASN lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK 2025. Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.



4. Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN) Tahun 2025
Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

a) Kualifikasi bobot nilai 25

Dimensi	Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh Pegawai (Bobot)					
				S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

b) Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi		
I	Nilai Kinerja			
	Sangat Baik	25		
	Baik	20		
	Butuh Perbaikan	15		
	Kurang	10		
	Sangat Kurang	5		
II	Diklat Struktural	Struktural	Fungsional	Pelaksana
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	10	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
III	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	10	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
IV	Diklat Teknis			
	Pernah Ikut Diklat Teknis	-	-	10
	Tidak Pernah Ikut Diklat Teknis	-	-	0
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	5	5	5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

c) Kinerja (Nilai SKP Tahun 2024) bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d) Disiplin (riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir), bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

e) Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah



LAMPIRAN 11

DATA DUKUNG CAPAIAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 14 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan IV Tahun 2025

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 562/ITJ.0/RC.510/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan s/d periode Triwulan IV Tahun Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 85,77%.
3. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 19 Desember 2025 dengan 70 temuan dan 144 saran rekomendasi dan nilai keuangan Rp.0,00 yaitu :
 - a. Tindak lanjut status tuntas sebanyak 38 saran/rekomendasi
 - b. Tindak lanjut status proses sebanyak 56 saran/rekomendasi
 - c. Tindak lanjut status pending sebanyak 50 saran/rekomendasi
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke I Tahun 2026 sebagaimana terlampir;
- 5.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal PK

Data Rekapitulasi Capaian IKU
 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
 Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	61	15	81	46	81	88,5
2	Dit. KE	18	3	80	15	80	80
3	Dit. P3K	19	4	81	15	81	94,3
4	Dit. Jasbar	11	4	80	7	80	96,5
5	Dit. SDK	2	0	80	0	80	95,2
6	Dit. KSG	3	1	81	2	81	97,2
7	BKKPN Kupang	2	0	80	2	80	98,4
8	BPSPL Makasar	1	1	100	0	0	100
9	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
10	LPSPL Sorong	2	1	80	1	80	98
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Denpasar	15	1	80	14	80	87
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
Jumlah		134	30	-	102	-	85,7

a.n. Direktur Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Miftahul Huda



LAMPIRAN 12

DATA DUKUNG CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOTA DINAS
NOMOR 119/DJPK.1/TU.210/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
Lingkup Ditjen PK Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah menindaklanjuti temuan kepatuhan dan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Adapun temuan tersebut antara lain 2 (dua) temuan kepatuhan senilai Rp357.650.852,00 yang sudah disetor ke Kas Negara per 15 Mei 2025 dan 2 (dua) temuan SPI yang sudah disampaikan tanggapan sepakat dan telah dilengkapi dokumen dukung yang dimaksud. Rincian 4 (empat) temuan kepatuhan tersebut sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 tidak sesuai ketentuan pada Ditjen PK senilai Rp109.734.338,00;
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi belanja 526 tidak sesuai kontrak pada Ditjen PK senilai Rp247.916.514,00;

Sedangkan rincian 2 (dua) temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari:

1. Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional tidak sesuai ketentuan;
2. Pembayaran Upah Tenaga Kerja melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan.

Demikian kami melaporkan, sekaligus mohon arahan Bapak lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miftahul Huda

Matrik TLHP BPK RI LK 2024

No.	Temuan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Eselon I	Satker	TL Kepatuhan Perundang-Undangan			TL SPI		
						Nilai Keuangan	TL Keuangan	Sisa	Tindak Lanjut	Keterangan	Hasil Telaahan
1	Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait supaya : a. Memerintahkan KPA satker terkait untuk : 1). Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 2). Memerintahkan PPK satker terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan menguji serta menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. b. Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran belanja barang non 526 sebesar Rp125.816.155,00 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.370.000,00 dengan menyetorkannya ke kas negara atau rekening operasional BLU.	2	Ditjen PK	Sekretariat Ditjen PKRL	69.364.338,00	69.364.338,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara NTPN No. CDC2461QVD8EQ2GQ Tanggal 14 Mei 2025 Rp69.364.338,00	Kekurangan volume pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja pimpinan Ditjen PKRL	
				Ditjen PK	Sekretariat Ditjen PKRL	40.370.000,00	40.370.000,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara NTPN No. BFBEE61QVD8DT0CI Tanggal 14 Mei 2025 Rp40.370.000,00	Denda Keterlambatan pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja pimpinan Ditjen PKRL	
2	Pelaksanaan pekerjaan konstruksi belanja 526 tidak sesuai kontrak sebesar Rp431.621.842,00	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen PB, Dirjen PDSPKP, dan Dirjen PKRL selaku KPA supaya : a. Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp431.621.842,00	2	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	31.401.720,00	31.401.720,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp31.401.720,00 NTPN No. 2D8880NA0DPSH0 GP Tanggal 2 Mei 2025	Pengadaan pondok informasi wisata bahari Kab. Kendal	
					Sekretariat Ditjen PKRL	9.410.217,00	9.410.217,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp9.410.217,00 NTPN No.064C748VVO17VIJ D Tanggal 28 April	Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon	

No.	Temuan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Eselon I	Satker	TL Kepatuhan Perundang-Undangan			TL SPI		
						Nilai Keuangan	TL Keuangan	Sisa	Tindak Lanjut	Keterangan	Hasil Telaahan
					Sekretariat Ditjen PKRL	207.104.577,00	207.104.577,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp207104577,00 NTPN No.783451JNG8CGND	Pengadaan bangunan dan mesin washing plan Bima	
3	Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya supaya : a. Menghentikan kebijakan merealisasikan belanja operasional dan belanja nonoperasional yang tidak sesuai peruntukan dan melebihi SBM b. Memerintahkan KPA pada masing-masing satker terkait untuk : 1). Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, dan 2). Memerintahkan agar PPK pada masing-masing satker terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan Belanja Operasional dan Nonoperasional	2	1. Ditjen PT 2. Setjen 3. Itjen 4. Ditjen PB 5. Ditjen PKRL 6. Ditjen PSDKP 7. Ditjen PDSPKP 8. BPPMHKP 9. BPPSDM	1. Setditjen PKRL 2. Direktorat Lingkup DJPKRL 3. UPT Lingkup DJPKRL					1. Kegiatan Bakti Nelayan pada Ditjen Perikanan Tangkap 2. Realisasi Belanja Barang Nonoperasional untuk pengadaan seminar kita belum sepenuhnya sesuai ketentuan	
4	Pembayaran Upah Tenaga Kerja melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan : a. Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait supaya menghentikan kebijakan pengangkatan pegawai oleh PPK yang tidak memedomani ketentuan manajemen pegawai dan; b. Sekretaris Jenderal KKP memerintahkan Kepala Biro SDMAO untuk berkoordinasi dengan Eselon I terkait dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkup KKP	2	1. Itjen 2. Ditjen PT 3. Ditjen PB 4. Ditjen PKRL 5. Ditjen PSDKP 6. BPPSDMKP 7. Setjen 8. Ditjen PDSPKP 9. BPPMHKP	1. Setditjen PKRL 2. Direktorat Lingkup DJPKRL 3. UPT Lingkup DJPKRL					1. Terdapat 89 orang tenaga kerja PJLP dengan lingkup pekerjaan/jabatan ASN 2. KKP tidak memiliki standar biaya upah tenaga kerja PJLP 3. Pengadaan tenaga kerja yang melaksanakan tugas Non ASN tidak dilaksanakan melalui penyediaan jasa alih daya (outsourcing)	
Jumlah			8			357.650.852,00	357.650.852,00	0			



LAMPIRAN 13

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBBM

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOTA DINAS
NOMOR 127/DJPK.1/TU.210/I/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Ketua Tim Kerja SDMAO
Hal : Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Berkenaan dengan pencapaian target terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada indikator kinerja Pembangunan Integritas dan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM ditingkat UPT, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Capaian indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan nilai total minimal 75;
2. Capaian indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan nilai total minimal 85.

Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedhy Wibowo Setiawan

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 127 /DJPK.1/TU.210/I/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

Hasil Capaian Nilai WBK

No	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK
1	BKKPN Kupang	Hasil Pemantauan Pengusulan WBBM TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 12 Juni 2025	89,52
2	LKKPN Pekanbaru	Hasil Pemantauan Pengusulan WBBM TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 10 Maret 2025	91,04
3	BPSPL Padang	Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024	90,40
4	BPSPL Pontianak	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	90,81
5	BPSPL Denpasar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	87,57
6	BPSPL Makassar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	87,41
7	LPSPL Serang	Hasil Pemantauan Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 10 Juni 2025	80,04
8	LPSPL Sorong	Hasil Penilaian TPI KKP Tahun 2021	81,64



LAMPIRAN 14

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025

Yth. : 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
5. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal
6. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
7. Para Kepala Pusat lingkup Badan
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dari : Kepala Biro Umum

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025

Tanggal : 21 November 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025, bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan unit organisasi Saudara. Selanjutnya dimohon kepada Saudara untuk melakukan koordinasi di lingkungan organisasi masing-masing untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai ketentuan.
2. Identifikasi, penataan dan penyediaan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif.
3. Melaksanakan program arsip vital organisasi dan membuat daftar arsip vital.
4. Unit organisasi menyampaikan daftar arsip aktif kepada Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II.
5. Pelaksanaan penyusutan arsip secara berkala sesuai dengan prosedur/ketentuan yang terdiri:
 - a) kegiatan penyusutan arsip aktif dengan melakukan pemindahan arsip yang telah memasuki retensi akhir arsip aktif/pemindahan inaktif ke *record center*;

- b) kegiatan penyusutan arsip inaktif dengan melakukan penilaian arsip yang telah memasuki retensi akhir untuk pemusnahan arsip atau penyerahan arsip statis.
6. Melakukan pengaturan dan penempatan arsip pada prasarana dan sarana yang sesuai dengan ketentuan yaitu sarana kearsipan meliputi folder arsip, guide/sekat arsip, boks arsip, dan rak arsip.
 7. Melakukan penataan, pengaturan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan yaitu ruang arsip atau ruangan yang ditunjuk dan difungsikan sebagai ruang arsip.
 8. Setiap unit organisasi melakukan peningkatan kompetensi SDM Arsiparis dan bagi yang belum memiliki arsiparis agar segera melakukan pengisian sesuai peta jabatan. dan Unit Kearsipan II (Sekretariat Ditjen, Sekretariat Itjen, Sekretariat Badan) agar dapat memenuhi/mengisi SDM Arsiparis sesuai peta jabatan dan melengkapi setidaknya sampai dengan jenjang arsiparis ahli muda.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran

Nomor : 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025

Tanggal : 21 November 2025

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
Sekretariat Jenderal							
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	68.66	30.00	99.33	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3	1
2	Biro Perencanaan	67.38	27.75	95.13	AA (SANGAT MEMUASKAN)	14	2
3	Biro Keuangan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	21	3
4	Pusat Data Statistik dan Informasi	54.68	30.00	84.68	A (MEMUASKAN)	31	4

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	62.04	21.75	83.79	A (MEMUASKAN)	35	5
6	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	54.45	27.75	82.20	AA (SANGAT MEMUASKAN)	39	6
7	Biro Hukum	70.00	7.00	77.00	BB (SANGAT BAIK)	42	7
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
8	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	68.40	30.00	98.40	AA (SANGAT MEMUASKAN)	5	1
9	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	67.38	30.00	97.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)	10	2
10	Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	66,71	27,75	94,46	AA (SANGAT MEMUASKAN)	16	3
11	Direktorat Jasa Kelautan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	19	4
12	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	70.00	27.75	92.81	AA (SANGAT MEMUASKAN)	29	5

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap							
13	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	70.00	27.75	97.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	6	1
14	Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	70.00	27.75	97.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	7	2
15	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	20	3
16	Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	23	4
17	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	63.62	20.25	83.88	A (MEMUASKAN)	34	5
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya							
18	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	66.21	30.00	96.21	AA (SANGAT MEMUASKAN)	13	1
19	Direktorat Ikan Air Laut	61.77	22.50	84.27	A (MEMUASKAN)	32	2

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
20	Direktorat Ikan Air Payau	65.63	17.50	83.13	A (MEMUASKAN)	38	3
21	Direktorat Ikan Air Tawar	61.68	17.50	79.18	BB (SANGAT BAIK)	41	4
22	Direktorat Rumput Laut	53.27	20.25	73.52	BB (SANGAT BAIK)	44	5
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
23	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	69.40	30.00	99.40	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2	1
24	Direktorat Pemasaran	70.00	27.75	97.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	8	2
25	Direktorat Logistik	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	18	3
26	Direktorat Pengolahan	61.40	22.50	83.90	A (MEMUASKAN)	33	4

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
27	Direktorat Pemberdayaan Usaha	64.24	17.25	81.49	A (MEMUASKAN)	40	5
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
28	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	70.00	30.00	100.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	1	1
29	Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	22	2
30	Direktorat Penanganan Pelanggaran	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	24	3
31	Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	25	4
32	Direktorat Pengendalian dan Operasi Armada	63.72	19.50	83.23	A (MEMUASKAN)	37	5
Inspektorat Jenderal							
33	Sekretariat Inspektorat Jenderal	68.66	27.75	96.41	AA (SANGAT MEMUASKAN)	12	1

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
34	Inspektorat I	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	26	2
35	Inspektorat III	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	27	3
36	Inspektorat V	70.00	23.50	93.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	28	4
37	Inspektorat II	68.00	25.00	93.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	28	5
38	Inspektorat IV	68.21	23.50	89.25	AA (SANGAT MEMUASKAN)	30	6
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
39	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	68.89	30.00	98.89	AA (SANGAT MEMUASKAN)	4	1
40	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	70.00	27.75	97.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	9	2

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
41	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	64.48	30.00	94.48	AA (SANGAT MEMUASKAN)	15	3
42	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	64.29	30.00	94.29	AA (SANGAT MEMUASKAN)	17	4
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
43	Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	67.38	30.00	97.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)	11	1
44	Pusat Pengendalian Mutu	61.82	21.75	83.57	A (MEMUASKAN)	36	2
45	Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	55.59	18.50	74.09	BB (SANGAT BAIK)	43	3

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT PENGOLAH LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
Sekretariat Jenderal							
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	60.62	20.25	80.87	A (MEMUASKAN)	87	Setjen hanya ada 1 UPT
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut							
2	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak	69.40	30.00	99.40	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2	1
3	Loka Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Sorong	66.80	21.75	88.55	A (MEMUASKAN)	36	2
4	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Denpasar	64.36	21.75	86.11	A (MEMUASKAN)	59	3

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
5	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Makassar	70.00	15.00	85.00	A (MEMUASKAN)	65	4
6	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	59.40	25.50	84.90	A (MEMUASKAN)	66	5
7	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang	63.00	18.50	81.50	A (MEMUASKAN)	84	6
8	Loka Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Serang	58.84	21.75	80.59	A (MEMUASKAN)	91	7
9	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	62.00	18.50	80.50	A (MEMUASKAN)	92	8
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap							
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	65.36	30.00	95.36	AA (SANGAT MEMUASKAN)	13	1
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	16	2

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
12	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	70.00	21.75	91.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	25	3
13	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	70.00	21.75	91.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	26	4
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	65.58	25.50	91.08	AA (SANGAT MEMUASKAN)	28	5
15	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	68.66	21.75	90.41	AA (SANGAT MEMUASKAN)	31	6
16	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	68.00	21.75	89.75	A (MEMUASKAN)	33	7
17	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	59.36	30.00	89.36	A (MEMUASKAN)	34	8
18	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	67.10	21.75	88.85	A (MEMUASKAN)	35	9

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
19	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	68.06	20.25	88.31	A (MEMUASKAN)	40	10
20	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	61.73	25.50	87.23	A (MEMUASKAN)	50	11
21	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	59.17	27.75	86.92	A (MEMUASKAN)	52	12
22	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	64.70	21.75	86.45	A (MEMUASKAN)	55	13
23	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	62.21	24.00	86.21	A (MEMUASKAN)	57	14
24	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	64.11	20.25	84.36	A (MEMUASKAN)	69	15
25	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	63.82	20.25	84.07	A (MEMUASKAN)	70	16

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
26	Balai Besar Penangkapan Ikan	65.37	16.50	81.87	A (MEMUASKAN)	79	17
27	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	57.92	21.75	79.67	BB (SANGAT BAIK)	95	18
28	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	57.57	21.75	79.32	BB (SANGAT BAIK)	96	19
29	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	48.11	27.75	75.86	BB (SANGAT BAIK)	104	20
30	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	54.50	20.25	74.75	BB (SANGAT BAIK)	107	21
31	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	44.63	20.25	64.88	B (BAIK)	123	22
32	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	40.85	22.50	63.35	B (BAIK)	127	23

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya							
33	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	69.33	30.00	99.33	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3	1
34	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	68.13	30.00	98.13	AA (SANGAT MEMUASKAN)	4	2
35	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	66.86	30.00	96.86	AA (SANGAT MEMUASKAN)	8	3
36	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	65.95	30.00	95.95	AA (SANGAT MEMUASKAN)	12	4
37	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	68.22	22.50	90.72	AA (SANGAT MEMUASKAN)	29	5
38	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	70.00	18.50	88.50	A (MEMUASKAN)	37	6

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
39	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	65.28	22.50	87.78	A (MEMUASKAN)	45	7
40	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin	68.66	17.50	86.16	A (MEMUASKAN)	58	8
41	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	60.43	22.50	82.93	A (MEMUASKAN)	73	9
42	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	63.62	17.50	81.12	A (MEMUASKAN)	86	10
43	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	63.36	17.50	80.86	A (MEMUASKAN)	88	11
44	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	66.50	13.75	80.25	A (MEMUASKAN)	93	12
45	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	58.88	17.50	76.38	BB (SANGAT BAIK)	103	13

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
46	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	47.52	27.75	75.27	BB (SANGAT BAIK)	106	14
47	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	43.55	17.50	61.05	B (BAIK)	132	15
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							
48	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	68.80	21.75	90.55	AA (SANGAT MEMUASKAN)	30	Ditjen PDS hanya ada 1 UPT
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
49	Pangkalan PSDKP Bitung	70.00	22.50	92.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	19	1
50	Stasiun PSDKP Ambon	70.00	22.50	92.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	21	2
51	Stasiun PSDKP Cilacap	70.00	22.50	92.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	22	3

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
52	Stasiun PSDKP Pontianak	70.00	22.50	92.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	23	4
53	Pangkalan PSDKP Lampulo	70.00	21.75	91.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)	24	5
54	Pangkalan PSDKP Batam	70.00	18.50	88.50	A (MEMUASKAN)	38	6
55	Pangkalan PSDKP Benoa	70.00	18.50	88.50	A (MEMUASKAN)	39	7
56	Stasiun PSDKP Biak	69.40	18.50	87.90	A (MEMUASKAN)	43	8
57	Stasiun PSDKP Tarakan	69.33	18.50	87.83	A (MEMUASKAN)	44	9
58	Stasiun PSDKP Tahuna	69.00	18.50	87.50	A (MEMUASKAN)	49	10

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
59	Pangkalan PSDKP Tual	68.00	18.50	86.50	A (MEMUASKAN)	54	11
60	Pangkalan PSDKP Jakarta	66.40	18.50	84.90	A (MEMUASKAN)	67	12
61	Stasiun PSDKP Belawan	57.31	23.50	80.81	A (MEMUASKAN)	89	13
62	Stasiun PSDKP Kupang	61.66	18.50	80.16	A (MEMUASKAN)	94	14
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							
63	SUPM Kota Agung	68.00	30.00	98.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	5	1
64	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang	67.00	30.00	97.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	6	2

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
65	Loka Riset Perikanan Tuna Benoa	66.77	30.00	96.77	AA (SANGAT MEMUASKAN)	9	3
66	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang	66.26	30.00	96.26	AA (SANGAT MEMUASKAN)	10	4
67	BPPP Tegal	66.18	30.00	96.18	AA (SANGAT MEMUASKAN)	11	5
68	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor	64.66	30.00	94.66	AA (SANGAT MEMUASKAN)	14	6
69	Politeknik AUP	63.06	30.00	93.06	AA (SANGAT MEMUASKAN)	17	7
70	BPPP Banyuwangi	62.97	30.00	92.97	AA (SANGAT MEMUASKAN)	18	8
71	SUPM Tegal	61.37	30.00	91.37	AA (SANGAT MEMUASKAN)	27	9

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
72	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros	65.71	22.50	88.21	A (MEMUASKAN)	41	10
73	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	61.94	26.25	88.19	A (MEMUASKAN)	42	11
74	Politeknik KP Dumai	65.78	21.75	87.53	A (MEMUASKAN)	46	12
75	Politeknik KP Bone	68.80	17.50	86.30	A (MEMUASKAN)	56	13
76	Politeknik KP Sidoarjo	55.56	30.00	85.56	A (MEMUASKAN)	63	14
77	SUPM Ladong Aceh	65.44	18.50	83.94	A (MEMUASKAN)	71	15

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
78	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	64.75	17.50	82.25	A (MEMUASKAN)	77	16
79	BPPP Ambon	64.29	17.50	81.79	A (MEMUASKAN)	80	17
80	BPPP Bitung	59.17	22.50	81.67	A (MEMUASKAN)	81	18
81	Akademi Komunitas KP Wakatobi	59.88	21.75	81.63	A (MEMUASKAN)	82	19
82	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi	61.33	20.25	81.58	A (MEMUASKAN)	83	20
83	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	68.13	13.00	81.13	A (MEMUASKAN)	85	21
84	Politeknik KP Karawang	58.20	22.50	80.70	A (MEMUASKAN)	90	22

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
85	Balai Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol	61.22	17.50	78.72	BB (SANGAT BAIK)	98	23
86	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur	60.05	17.50	77.55	BB (SANGAT BAIK)	101	24
87	Politeknik KP Sorong	44.32	30.00	74.32	BB (SANGAT BAIK)	108	25
88	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	41.99	30.00	71.99	BB (SANGAT BAIK)	111	26
89	SUPM Waiheru Ambon	46.86	22.50	69.36	B (BAIK)	115	27
90	Politeknik KP Jembrana	48.27	17.50	65.77	B (BAIK)	121	28
91	Politeknik KP Bitung	49.98	12.75	62.73	B (BAIK)	128	29

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
92	Politeknik KP Kupang	42.32	20.25	62.57	B (BAIK)	129	30
93	SUPM Pariaman	44.85	17.50	62.35	B (BAIK)	131	31
94	Balai Riset Perikanan Laut Jakarta	29.99	30.00	59.99	CC (CUKUP)	135	32
95	Balai Diklat Aparatur Sukamandi	38.28	17.50	55.78	CC (CUKUP)	137	33
96	Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi	38.27	17.50	55.77	CC (CUKUP)	138	34
97	Politeknik KP Pangandaran	35.79	17.50	53.29	CC (CUKUP)	139	35
98	Loka Riset Budidaya Rumput Laut Boalemo Gorontalo	23.55	18.50	42.05	C (KURANG)	143	36

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
99	BPPP Medan	22.66	17.50	40.16	C (KURANG)	145	37
Badan Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan							
100	Balai KIPM Semarang	69.40	30.00	99.40	AA (SANGAT MEMUASKAN)	1	1
101	Balai KIPM Balikpapan	66.89	30.00	96.89	AA (SANGAT MEMUASKAN)	7	2
102	Stasiun KIPM Gorontalo	64.15	30.00	94.15	AA (SANGAT MEMUASKAN)	15	3
103	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	70.00	22.50	92.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	20	4
104	Balai KIPM Entikong	60.24	30.00	90.24	AA (SANGAT MEMUASKAN)	32	5
105	Balai Uji Standar Karantina Ikan	70.00	17.50	87.50	A (MEMUASKAN)	47	6

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
106	Stasiun KIPM Palangkaraya	70.00	17.50	87.50	A (MEMUASKAN)	48	7
107	Stasiun KIPM Yogyakarta	63.66	23.50	87.16	A (MEMUASKAN)	51	8
108	Balai Besar KIPM Jakarta I	64.28	22.50	86.78	A (MEMUASKAN)	53	9
109	Balai Besar KIPM Makassar	55.83	30.00	85.83	A (MEMUASKAN)	60	10
110	Stasiun KIPM Palu	68.29	17.50	85.79	A (MEMUASKAN)	61	11
111	Balai KIPM Surabaya II	65.51	20.25	85.76	A (MEMUASKAN)	62	12
112	Stasiun KIPM Sorong	66.69	18.50	85.19	A (MEMUASKAN)	64	13

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
113	Stasiun KIPM Pontianak	69.40	15.00	84.40	A (MEMUASKAN)	68	14
114	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	65.51	17.50	83.01	A (MEMUASKAN)	72	15
115	Stasiun KIPM Cirebon	62.81	20.00	82.81	A (MEMUASKAN)	74	16
116	Stasiun KIPM Merauke	65.30	17.50	82.80	A (MEMUASKAN)	75	17
117	Stasiun KIPM Kupang	65.15	17.50	82.65	A (MEMUASKAN)	76	18
118	Stasiun KIPM Ternate	59.50	22.50	82.00	A (MEMUASKAN)	78	19
119	Balai KIPM Banjarmasin	58.73	20.00	78.73	BB (SANGAT BAIK)	97	20

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
120	Stasiun KIPM Pekanbaru	60.02	18.50	78.52	BB (SANGAT BAIK)	99	21
121	Stasiun KIPM Kendari	55.97	22.50	78.47	BB (SANGAT BAIK)	100	22
122	Stasiun KIPM Medan II	70.00	7.00	77.00	BB (SANGAT BAIK)	102	23
123	Balai KIPM Surabaya I	57.85	17.50	75.35	BB (SANGAT BAIK)	105	24
124	Stasiun KIPM Merak	62.96	10.00	72.96	BB (SANGAT BAIK)	109	25
125	Stasiun KIPM Bau Bau	61.33	11.50	72.83	BB (SANGAT BAIK)	110	26
126	Balai KIPM Tanjung Pinang	48.64	22.50	71.14	BB (SANGAT BAIK)	112	27

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
127	Stasiun KIPM Padang	52.29	18.50	70.79	BB (SANGAT BAIK)	113	28
128	Balai KIPM Denpasar	53.26	17.50	70.76	BB (SANGAT BAIK)	114	29
129	Balai KIPM Mataram	51.09	17.50	68.59	B (BAIK)	116	30
130	Balai KIPM Manado	44.82	23.50	68.32	B (BAIK)	117	31
131	Stasiun KIPM Jambi	44.96	22.50	67.46	B (BAIK)	118	32
132	Stasiun KIPM Bandung	52.20	15.00	67.20	B (BAIK)	119	33
133	Stasiun KIPM Batam	48.27	17.50	65.77	B (BAIK)	120	34

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
134	Stasiun KIPM Mamuju	43.02	22.50	65.52	B (BAIK)	122	35
135	Balai KIPM Jayapura	46.38	17.50	63.88	B (BAIK)	124	36
136	Balai KIPM Tarakan	46.32	17.50	63.82	B (BAIK)	125	37
137	Balai KIPM Ambon	46.05	17.50	63.55	B (BAIK)	126	38
138	Balai KIPM Jakarta II	44.94	17.50	62.44	B (BAIK)	130	39
139	Balai KIPM Lampung	48.67	12.00	60.67	B (BAIK)	133	40
140	Stasiun KIPM Aceh	41.27	18.75	60.02	B (BAIK)	134	41

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
141	Balai KIPM Medan I	39.30	20.25	59.55	CC (CUKUP)	136	42
142	Stasiun KIPM Bengkulu	34.54	17.50	52.04	CC (CUKUP)	140	43
143	Stasiun KIPM Bima	45.55	5.50	51.05	CC (CUKUP)	141	44
144	Stasiun KIPM Tahuna	43.04	5.50	48.54	C (KURANG)	142	45
145	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	31.93	10.00	41.93	C (KURANG)	144	46
146	Stasiun KIPM Palembang	16.51	5.50	22.01	D (SANGAT KURANG)	146	47

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT KEARSIPAN II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP
UNIT KEARSIPAN II						
1	Sekretariat BPPSDM	59.10	10.00	99.10	AA (SANGAT MEMUASKAN)	1
2	Sekretariat DJPDS	60.00	10.00	97.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	2
3	Sekretariat DJPT	58.20	10.00	96.20	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3
4	Sekretariat BPPMHKP	60.00	10.00	95.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	4
5	Sekretariat ITJEN	56.70	10.00	93.70	AA (SANGAT MEMUASKAN)	5
6	Sekretariat DJPSDKP	55.50	10.00	93.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	6
7	Sekretariat DJPKRL	55.50	10.00	92.50	AA (SANGAT MEMUASKAN)	7
8	Sekretariat DJPB	52.80	10.00	90.80	AA (SANGAT MEMUASKAN)	8



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto



LAMPIRAN 15

DATA DUKUNG CAPAIAN PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 4	% Capaian Target IKU TW 4	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
01	Sekretariat Jenderal	3	357,549,859,996	448,763,141,996	91,213,282,000	Sesuai	76.00%	91.19%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	3,868,642,000	3,868,642,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	3,092,504,918,600	3,092,504,918,600	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,461,299,259,718	1,461,299,259,718	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,404,052,006,574	1,404,052,006,574	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	62,082,313,281	62,082,313,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	2,377,171,057,536	2,377,171,057,536	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	208,693,653,108	208,693,653,108	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	100,936,435,522	100,936,435,522	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	9,068,158,146,335	9,159,371,428,335	91,213,282,000			99.02%	



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9,069,898,000	-	9,069,898,000			9,069,898,000	9,069,898,000	0	100.00%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	422,159,781,996	14,006,635,000	436,166,416,996			344,953,134,996	344,953,134,996	91,213,282,000	126.44%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,526,827,000		3,526,827,000			3,526,827,000	3,526,827,000	0	100.00%
TOTAL		434,756,506,996	14,006,635,000	448,763,141,996	-	-		357,549,859,996	91,213,282,000	108.81%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 91.19%	

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	3,868,642,000	-	3,868,642,000			3,868,642,000	3,868,642,000	0	100.00%
TOTAL		3,868,642,000	-	3,868,642,000	-	-		3,868,642,000	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 100.00%	

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,654,763,000	450,642,000	5,105,405,000		109,857,000	4,995,548,000	5,105,405,000	0	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,500,368,000	1,726,822,000	4,227,190,000		173,053,000	4,054,137,000	4,227,190,000	0	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,299,090,000	-	6,299,090,000		208,227,000	6,090,863,000	6,299,090,000	0	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	5,026,187,000	-	5,026,187,000		216,547,000	4,809,640,000	5,026,187,000	0	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	463,513,809,000	-	463,513,809,000		457,069,402,000	6,444,407,000	463,513,809,000	0	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	4,000,680,000	-	4,000,680,000		269,268,000	3,731,412,000	4,000,680,000	0	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	3,066,333,000	-	3,066,333,000		107,070,000	2,959,263,000	3,066,333,000	0	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,391,089,000	-	4,391,089,000		686,480,000	3,704,609,000	4,391,089,000	0	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,338,592,000	-	2,338,592,000		44,900,000	2,293,692,000	2,338,592,000	0	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,160,369,582,000	-	1,160,369,582,000		1,156,224,800,000	4,144,782,000	1,160,369,582,000	0	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	3,096,535,000	-	3,096,535,000		143,086,000	2,953,449,000	3,096,535,000	0	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,174,331,000	2,026,728,000	4,201,059,000		149,001,000	4,052,058,000	4,201,059,000	0	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	2,103,023,000	6,400,000	2,109,423,000		7,744,000	2,101,679,000	2,109,423,000	0	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,017,529,000	2,082,335,000	3,099,864,000		201,385,000	2,898,479,000	3,099,864,000	0	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,871,854,000	-	4,871,854,000		611,181,000	4,260,673,000	4,871,854,000	0	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	3,309,753,000	51,637,000	3,361,390,000		40,946,000	3,320,444,000	3,361,390,000	0	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,956,661,000	-	2,956,661,000		56,249,000	2,900,412,000	2,956,661,000	0	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,045,920,000	2,346,994,000	5,392,914,000		444,154,000	4,948,760,000	5,392,914,000	0	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,243,950,000	31,000,000	61,274,950,000		55,630,617,000	5,644,333,000	61,274,950,000	0	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000	-	2,358,509,000		0	2,358,509,000	2,358,509,000	0	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,382,333,600	-	6,382,333,600		548,134,000	5,834,199,600	6,382,333,600	0	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	38,627,180,000	-	38,627,180,000		31,472,039,000	7,155,141,000	38,627,180,000	0	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	20,507,865,000	-	20,507,865,000		3,614,615,000	16,893,250,000	20,507,865,000	0	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,259,136,398,836	16,790,025,164	1,275,926,424,000		1,252,038,840,210	23,887,583,790	1,275,926,424,000	0	100.00%
TOTAL		3,066,992,335,436	25,512,583,164	3,092,504,918,600	-	2,960,067,595,210	132,437,323,390	3,092,504,918,600	-	100.0000%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note :		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%										
= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%										

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	14,153,419,615	118,921,000	14,272,340,615		6,523,696,615	7,748,644,000	14,272,340,615	0	100.00%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	23,779,406,000	-	23,779,406,000		18,389,599,000	5,389,807,000	23,779,406,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	14,509,226,000	1,101,106,000	15,610,332,000		11,268,723,000	4,341,609,000	15,610,332,000	0	100.00%
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	42,758,045,000	11,655,239,000	54,413,284,000		24,328,660,000	30,084,624,000	54,413,284,000	0	100.00%
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	4,388,427,000	-	4,388,427,000		1,128,953,000	3,259,474,000	4,388,427,000	0	100.00%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	17,324,561,000	7,151,046,000	24,475,607,000		5,342,752,000	19,132,855,000	24,475,607,000	0	100.00%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	10,819,324,000	976,321,000	11,795,645,000		6,766,620,000	5,029,025,000	11,795,645,000	0	100.00%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,244,294,000	-	9,244,294,000		5,564,366,000	3,679,928,000	9,244,294,000	0	100.00%
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	6,885,546,000	3,379,211,000	10,264,757,000		7,134,462,000	3,130,295,000	10,264,757,000	0	100.00%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	9,742,232,000	5,638,145,000	15,380,377,000		10,457,450,000	4,922,927,000	15,380,377,000	0	100.00%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	5,054,907,000	2,061,297,000	7,116,204,000		5,387,502,000	1,728,702,000	7,116,204,000	0	100.00%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	9,787,646,000	4,338,000	9,791,984,000		6,646,293,000	3,145,691,000	9,791,984,000	0	100.00%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	4,507,731,000	4,183,662,000	8,691,393,000		4,424,860,000	4,266,533,000	8,691,393,000	0	100.00%
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	5,293,648,000	2,703,818,000	7,997,466,000		6,797,648,000	1,199,818,000	7,997,466,000	0	100.00%
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	3,761,994,000	1,942,249,000	5,704,243,000		2,157,558,000	3,546,685,000	5,704,243,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1,236,302,182,103	2,071,318,000	1,238,373,500,103		1,218,838,384,103	19,535,116,000	1,238,373,500,103	0	100.00%
TOTAL		1,418,312,588,718	42,986,671,000	1,461,299,259,718	-	1,341,157,526,718	120,141,733,000	1,461,299,259,718	-	100.00%

FORMULA PERHITUNGAN

Note :

= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%

= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi

100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	29,445,819,000	-	29,445,819,000		25,192,451,000	4,253,368,000	29,445,819,000	0	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	12,662,396,999	-	12,662,396,999		7,770,543,000	4,891,853,999	12,662,396,999	0	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,896,368,000	-	21,896,368,000		16,792,289,000	5,104,079,000	21,896,368,000	0	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	17,612,902,000	-	17,612,902,000		13,374,397,000	4,238,505,000	17,612,902,000	0	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	19,452,293,500	-	19,452,293,500		17,312,873,500	2,139,420,000	19,452,293,500	0	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,739,797,500	-	16,739,797,500		14,367,938,500	2,371,859,000	16,739,797,500	0	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	1,202,705,796,575	-	1,202,705,796,575		1,191,786,130,000	10,919,666,575	1,202,705,796,575	0	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,929,268,000	-	14,929,268,000		11,918,715,000	3,010,553,000	14,929,268,000	0	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,169,047,000	-	18,169,047,000		15,535,927,000	2,633,120,000	18,169,047,000	0	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,104,332,000	-	9,104,332,000		7,403,801,000	1,700,531,000	9,104,332,000	0	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,355,502,000	-	9,355,502,000		7,660,581,000	1,694,921,000	9,355,502,000	0	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	6,463,175,000	-	6,463,175,000		3,524,502,000	2,938,673,000	6,463,175,000	0	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	9,899,835,000	-	9,899,835,000		8,610,962,000	1,288,873,000	9,899,835,000	0	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,415,150,000	-	8,415,150,000		7,097,827,000	1,317,323,000	8,415,150,000	0	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	7,200,324,000	-	7,200,324,000		4,931,464,000	2,268,860,000	7,200,324,000	0	100.00%
TOTAL		1,404,052,006,574	-	1,404,052,006,574	-	1,353,280,401,000	50,771,605,574	1,404,052,006,574	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi 100.00%								

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,499,025,000	-	13,499,025,000	5,947,202,000		7,551,823,000	13,499,025,000	0	100.00%
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	48,583,288,281	-	48,583,288,281	36,065,535,000		12,517,753,281	48,583,288,281	0	100.00%
TOTAL		62,082,313,281	-	62,082,313,281	42,012,737,000	-	20,069,576,281	62,082,313,281	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%								

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	576,115,000		1,269,824,000	1,845,939,000	0	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-		2,534,284,000	2,534,284,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6,063,515,000	-	6,063,515,000			6,063,515,000	6,063,515,000	0	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	114,882,000	-	114,882,000	-		114,882,000	114,882,000	0	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	630,829,000	1,492,437,000	2,123,266,000	47,589,000		2,075,677,000	2,123,266,000	0	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,716,863,000	5,714,647,000	9,431,510,000	5,753,200,000		3,678,310,000	9,431,510,000	0	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2,313,249,000	-	2,313,249,000	289,374,000		2,023,875,000	2,313,249,000	0	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2,124,597,000	-	2,124,597,000	276,203,000		1,848,394,000	2,124,597,000	0	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	19,799,969,000	-	19,799,969,000	16,630,596,000		3,169,373,000	19,799,969,000	0	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000	-	1,453,775,000			1,453,775,000	1,453,775,000	0	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,579,025,000	-	2,579,025,000			2,579,025,000	2,579,025,000	0	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,697,213,000	-	3,697,213,000			3,697,213,000	3,697,213,000	0	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2,085,628,000	-	2,085,628,000			2,085,628,000	2,085,628,000	0	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,756,209,000	197,855,000	7,954,064,000	1,611,115,000		6,342,949,000	7,954,064,000	0	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,935,402,000	-	4,935,402,000	-		4,935,402,000	4,935,402,000	0	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,514,000	-	904,514,000			904,514,000	904,514,000	0	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,671,292,000	543,937,000	6,215,229,000	-		6,215,229,000	6,215,229,000	0	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219,049,000	1,237,094,000	1,456,143,000			1,456,143,000	1,456,143,000	0	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBR	1,223,254,000	74,096,000	1,297,350,000			1,297,350,000	1,297,350,000	0	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442,411,000	483,225,000	925,636,000			925,636,000	925,636,000	0	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,941,830,000	-	1,941,830,000			1,941,830,000	1,941,830,000	0	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000			2,089,200,000	2,089,200,000	0	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15,571,107,000	-	15,571,107,000	5,777,684,000		9,793,423,000	15,571,107,000	0	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,209,869,000	-	2,209,869,000	1,086,997,000		1,122,872,000	2,209,869,000	0	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1,538,411,000	3,197,761,000	4,736,172,000	1,451,020,000		3,285,152,000	4,736,172,000	0	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2,539,286,000	2,389,850,000	4,929,136,000	3,316,996,000		1,612,140,000	4,929,136,000	0	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	711,207,000	1,923,054,000	2,634,261,000	1,156,133,000		1,478,128,000	2,634,261,000	0	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,426,832,644	-	27,426,832,644	24,892,476,044		2,534,356,600	27,426,832,644	0	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799,005,000	2,064,944,000	2,863,949,000	530,979,000		2,332,970,000	2,863,949,000	0	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,438,446,000	-	1,438,446,000	220,898,000		1,217,548,000	1,438,446,000	0	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	9,709,402,000	-	9,709,402,000	6,378,092,000		3,331,310,000	9,709,402,000	0	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,966,563,000	5,209,960,000	8,176,523,000	6,240,852,000		1,935,671,000	8,176,523,000	0	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,486,312,000	-	7,486,312,000	1,860,000		7,484,452,000	7,486,312,000	0	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	229,198,000		1,067,307,000	1,296,505,000	0	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	910,955,000	1,088,140,000	1,999,095,000	755,610,000		1,243,485,000	1,999,095,000	0	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	2,989,553,000	16,902,000	3,006,455,000	902,105,000		2,104,350,000	3,006,455,000	0	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851,173,000	-	851,173,000			851,173,000	851,173,000	0	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,049,687,000	-	1,049,687,000			1,049,687,000	1,049,687,000	0	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,580,550,000	-	1,580,550,000	436,305,000		1,144,245,000	1,580,550,000	0	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	507,390,000		1,456,527,000	1,963,917,000	0	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25,694,351,464	-	25,694,351,464	10,527,303,000		15,167,048,464	25,694,351,464	0	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183,690,000	-	183,690,000	50,650,000		133,040,000	183,690,000	0	100.00%
TOTAL		179,765,764,108	28,927,889,000	208,693,653,108	89,646,740,044	-	119,046,913,064	208,693,653,108	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000		3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000		1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000		935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	8,000,000		620,386,000	628,386,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	-	1,490,331,000	182,390,000		1,307,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000		2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000		605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000		888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	266,630,000		2,703,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000		986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000		4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,680,000		1,644,259,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000		7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-		154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,352,000		3,200,968,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000		8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000		336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-		35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	88,620,000		584,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000		1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000		1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000		411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	450,880,000		2,690,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-		599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000		117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659,700	58,810,000	201,469,700	21,550,000		179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000		658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000		754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	168,960,000		1,502,549,000	1,671,509,000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	1,819,998,000	-	1,819,998,000	385,950,000		1,434,048,000	1,819,998,000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	1,474,110,000	-	1,474,110,000	181,490,000		1,292,620,000	1,474,110,000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000		412,970,000	474,690,000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	18,000,000		988,732,000	1,006,732,000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000		858,989,000	866,989,000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,255,000		1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-		152,919,000	152,919,000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	105,837,000		1,235,834,000	1,341,671,000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358,000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	40,994,400,000	-	40,994,400,000	36,836,599,000	272,130,000	3,885,671,000	40,994,400,000	0	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	7,576,678,000	-	7,576,678,000	174,516,000	4,673,911,000	2,728,251,000	7,576,678,000	0	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	27,424,390,000	-	27,424,390,000	21,447,885,000	1,027,302,000	4,949,203,000	27,424,390,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	26,488,912,000	-	26,488,912,000	19,886,050,000	3,418,731,000	3,184,131,000	26,488,912,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	16,024,348,000	-	16,024,348,000	11,832,138,000	2,225,040,000	1,967,170,000	16,024,348,000	0	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	14,006,000,985	-	14,006,000,985	10,488,817,000	994,620,000	2,522,563,985	14,006,000,985	0	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7,133,555,000	-	7,133,555,000	263,002,000	3,953,616,000	2,916,937,000	7,133,555,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	33,127,842,000	-	33,127,842,000	28,419,306,000	3,247,674,000	1,460,862,000	33,127,842,000	0	100.00%
9	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,153,460,465,551	50,934,466,000	2,204,394,931,551	1,322,441,260,000	861,749,091,551	20,204,580,000	2,204,394,931,551	0	100.00%
TOTAL		2,326,236,591,536	50,934,466,000	2,377,171,057,536	1,451,789,573,000	881,562,115,551	43,819,368,985		-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN INDIKATOR	
									100.00%	



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Teguh Wibowo



LAMPIRAN 16

DATA DUKUNG CAPAIAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana baik pada unit organisasi eselon I maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa salah satu tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni tahap evaluasi mandiri dilakukan melalui pengisian kuesioner, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari dua kategori unit kerja yang telah diklasifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari tahapan pengisian kuesioner penilaian mandiri (*Self Assessment Questionnaire/SAQ*) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ZAKI MUBAROK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025
TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI
MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

A. Informatif (Nilai 90 s.d. 100)

PPID Pelaksana Eselon I

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	100
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	100
3.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	100
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
6.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
7.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	100
8.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
9.	Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100

PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	100
2.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	100
3.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	100
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	100
5.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	100
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	100
7.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	100
8.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	100
9.	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	100
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	100

11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	100
12.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	100
13.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	100
14.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	100
15.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	100
16.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi	100
17.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	100
18.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang	100
19.	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem	100
20.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	100
21.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Ambon	100
22.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa	100
23.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual	100
24.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak	100
25.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	100
26.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	100
27.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	100
28.	Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	100
29.	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	100
30.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	100
31.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram	100
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Sorong	100
33.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon	100
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh	100
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II	100
36.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan	100
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate	100
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang	100
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon	100
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung	100
41.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan	100

	Hasil Perikanan (BKIPM) Banjarmasin	
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam	99,90
43.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	99,90
44.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	99,88
45.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	99,80
46.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	99,80
47.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor	99,73
48.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	99,70
49.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I	99,70
50.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merak	99,60
51.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	99,50
52.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap	99,40
53.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	99,38
54.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak	99,35
55.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	99,35
56.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	99,30
57.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke	99,11
58.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	99,05
59.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo	98,88
60.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura	98,85
61.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar	98,80
62.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	98,55
63.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Luwuk Banggai	98,50
64.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Yogyakarta	98,50
65.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna	98,50
66.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan	98,25
67.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta	97,85
68.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima	97,80
69.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	97,60
70.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	97,52
71.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	97,32
72.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	97,31
73.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bengkulu	97,30

74.	Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros	97,10
75.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangkaraya	96,93
76.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam	96,85
77.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan	96,83
78.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi	96,78
79.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	96,32
80.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	96,05
81.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkal Pinang	95,82
82.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong	95,68
83.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bau - Bau	95,58
84.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	95,45
85.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	95,40
86.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung	95,40
87.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang	95,10
88.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Medan II	94,80
89.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang	94,65
90.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon	94,63
91.	Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	94,18
92.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak	94,10
93.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	93,35
94.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju	93,35
95.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado	93,13
96.	Balai Uji Standar KIPM	93,05
97.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	92,90
98.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	92,80
99.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	92,65
100.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Gorontalo	92,60
101.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	92,42
102.	Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta	92,17
103.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Boalemo Gorontalo	92,15
104.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol Buleleng Singaraja	92,10
105.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang	91,60
106.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,41
107.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	91,35

B. Menuju Informatif (Nilai 80 s.d. 89,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	89,81
2.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	89,80
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	89,02
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	88,64
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Medan I	88,30
6.	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	86,57
7.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	85,81
8.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	84,75
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya II	84,62
10.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	84,21
11.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palu	83,65
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	82,85
13.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	82,70
14.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	82,36
15.	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	82,19
16.	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	82,17
17.	Balai Besar Penangkapan Ikan	81,98
18.	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang	80,11
19.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon	80,10

C. Cukup Informatif (Nilai 60 s.d. 79,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar	79,80
2.	Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi	79,27
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	79,02
4.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	76,10
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong Aceh	74,55
6.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	74,15
7.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Wakatobi	72,70
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tanjung Pinang	71,25
9.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru	70,82
10.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	70,19
11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	69,56
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	69,18

13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kendari	67,41
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta I	67,35
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	66,25
16.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tanjung Balai Asahan	62,87
17.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tahuna	62,10

D. Kurang Informatif (Nilai 40 s.d. 59)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	53,14
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	47,32

E. Tidak Informatif (Nilai < 39,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	0

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ZAKI MUBAROK



LAMPIRAN 17

DATA DUKUNG CAPAIAN DOKUMEN OPERASIONALISASI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.2/BKKPN/OT.120/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Verifikasi dan
Monitoring/Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

2 Januari 2026

Yth. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
di Jakarta

Berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) ke 3 BKKPN Kupang yaitu tersedianya Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen), terdapat 2 kegiatan untuk mencapai IKU tersebut yaitu Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Sehubungan telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan tersebut, berikut kami laporkan hasil pelaksanaan sebagai berikut

A. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

1. Kegiatan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2025 di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu dan perairan di sekitarnya
2. Terdapat 8 Subjek Hukum yang menjadi sasaran pelaksanaan Verifikasi yaitu Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur ketiga subjek hukum ini mengajukan dalam proses pengajuan Fasilitas Persetujuan KKPRL bagi masyarakat lokal kegiatan budidaya rumput laut. Selanjutnya Pemerintah Provinsi NTT (kegiatan Dermaga Onan Batu), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (kegiatan Keramba Jaring Apung), PT ASDP Cabang Kupang (kegiatan Dermaga Hansisi), PT. Elisten (kegiatan Keramba Jaring Apung) dan PT TOM (Budidaya Mutiara). Ke 8 subjek hukum ini belum memiliki KKPRL
3. Pagu Anggaran sebesar Rp43.465.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp42.476.100,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) atau sekitar 97,72% dari total anggaran

4. Berdasarkan hasil kegiatan beberapa saran dan rekomendasi yaitu :
- Dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan Fasilitas PKKPRL bagi Masyarakat lokal perlu dipertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran Tugas Pembantuan
 - Peningkatan Kapasitas SDM, dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan teknis secara berkala untuk meningkatkan keterampilan staf dalam proses verifikasi. Selain itu dengan adanya tambahan personel yang memadai dapat memudahkan proses kegiatan verifikasi.
 - Peningkatan Koordinasi, dilakukan dengan membentuk forum koordinasi rutin yang melibatkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan lokal, dan instansi terkait. Selain itu pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi dan berbagi informasi antar-stakeholder.
 - Penguatan Teknologi dan Infrastruktur, adanya integrasi teknologi seperti GIS dan drone untuk mendukung kegiatan monitoring dan verifikasi lapangan. Selain itu perlu penambahan peralatan survei yang memadai untuk meningkatkan efisiensi kerja.
 - Dukungan Peningkatan koordinasi antar Kementerian teknis dalam mendorong percepatan pengurusan KKPRL bagi Kementerian/Badan yang memiliki kegiatan pemanfaatan ruang laut terutama di dalam Kawasan Konservasi

B. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

1. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober di 5 (lima) Kawasan Konservasi wilayah kewenangan BKKPN Kupang yaitu di Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan, Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Laut Banda, dan Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang
2. Kegiatan penilaian kepatuhan dilakukan terhadap 8 (delapan) subjek hukum yaitu: PT Perusahaan Listrik Negara (2 KKPRL di NTT), Yayasan Ekosistem Gili Indah (1 KKPRL di NTB), Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung (1 KKPRL di NTB), PT Bahana Maluku (1 KKPRL di Banda), PT Jaya Samudera Siantan (1 KKPRL di Papua Barat Daya), Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia (2 KKPRL di NTB dan Sulawesi Selatan)
3. Hasil penilaian kepatuhan menunjukkan bahwa 2 (dua) subjek hukum mendapat penilaian taat dengan catatan dan 6 (enam) subjek hukum mendapat penilaian tidak taat

4. Pagu anggaran sebesar Rp 65.150.000 dengan realisasi Rp Rp 64.936.420 atau mencapai 99,67%
5. Berdasarkan hasil kegiatan beberapa saran dan rekomendasi yaitu:
 - Usulan metode spesifik untuk lokasi pengendalian yang sulit untuk dijangkau dan memiliki resiko tinggi bagi keselamatan tim pelaksana contoh penempatan instalasi pipa dan kabel bawah laut
 - Dalam hal diperlukan pengumpulan data penilaian kepatuhan berupa kuesioner maka hasil dari kuesioner tersebut diusulkan untuk mendapatkan bobot penilaian dalam menentukan penilaian akhir/rekapitulasi hasil analisis penilaian
 - Perlu perhatian khusus pada saat permohonan KKPRL maupun pelaksanaan pengendalian KKPRL untuk KKPRL berupa garis/line, baik dari segi metode pengendalian maupun perlengkapan yang digunakan, mengingat penempatan/penggelaran instalasi laut dengan KKPRL berupa line/garis seperti kabel dan pipa memiliki resiko lebih besar mengalami pergeseran/tidak sesuai dengan jalur KKPRL yang dimiliki
 - Usulan kegiatan pelatihan monitoring KKPRL/analisis GIS/sejenisnya untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksana pengendalian
 - Usulan penetapan standar kompetensi bagi petugas pelaksana/penilai
6. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan terlampir dalam tautan berikut <https://shorturl.at/ycNZq>.

Demikian laporan disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Ramli Firman

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
2. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Ditjen PRL
3. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Ditjen PRL
4. Direktur Konservasi Ekosistem, Ditjen PK

Lampiran

Nomor : B.2/BKKPN/OT.120/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**DATA PENGENDALIAN KKPRL TAHUN 2025
BKKPN KUPANG**

No	Nomor KKPRL	Jenis KKPRL	Subjek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil
1	B-543/MEN-KP/X/2020	IZIN LOKASI PERAIRAN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Temporary Jetty dan Terminal Khusus dalam Rangka Pembanguna Pembangkit Tenaga Listrik dan Fasilitas Pendukung	NTT	Taat dengan Catatan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban KKPRL
2	01082410515300008	PERSETUJUAN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kegiatan Penunjang PLTU Bolok 1 dan 2	NTT	Tidak Taat - adanya kegiatan reklamasi tanpa izin - belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban KKPRL
3	B.733/MEN-KP/VI/2023	PERSETUJUAN	Yayasan Ekosistem Gili Indah	Restorasi Terumbu Karang Struktur Instalasi	NTB	Tidak Taat - penempatan media restorasi melebihi area KKPRL yang

No	Nomor KKPRL	Jenis KKPRL	Subjek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil
				Biorock dan Turbin Dynorotor		dimiliki (di luar area KKPRL) - belum memiliki/mengajukan perizinan lainnya sehingga habis masa berlaku - belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban KKPRL
4	2712231051520023	PERSETUJUAN	Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung	Pipa Bawah Laut Air Bersih	NTB	Tidak Taat - terdapat pipa eksisting yang melebihi/di luar jalur KKPRL dengan jarak terjauh kurang lebih 82 meter - Belum memiliki perizinan berusaha sesuai dengan jenis kegiatan di KKPRL - belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban KKPRL
5	03082310518100002	PERSETUJUAN	PT Bahana Maluku	Jetty Bahana Maluku Banda	MALUKU	Tidak Taat - Belum memiliki perizinan lainnya

No	Nomor KKPRL	Jenis KKPRL	Subjek Hukum	Jenis Kegiatan	Lokasi	Hasil
6	18092410519600002	PERSETUJUAN	PT Jaya Samudera Siantan	Penempatan Keramba Jaring Apung Pembesaran Pisces Bersirip Laut	PAPUA BARAT DAYA	Taat dengan Catatan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban KKPRL
7	B.1830/MEN- KP/IX/2024	PERSETUJUAN	Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia	Transplantasi Terumbu Karang Dan Transplantasi Lamun	NTB	Tidak Taat - Terdapat bangunan yang melebihi area KKPRL - Belum memiliki perizinan lainnya
8	B.1945/MEN- KP/IX/2024	PERSETUJUAN	Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia	Transplantasi Terumbu Karang	SULAWESI SELATAN	Tidak Taat - Belum memiliki perizinan lainnya

Plh. Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Ramli Firman